



BULLETIN
RENSTRAJAK

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2025

Penerbit:

**Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

ISSN 3063-8364



**BULLETIN**

RENSTRAJAK

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2025

“BSKDN bukan hanya badan teknokratis, melainkan juga think tank yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan kepentingan jangka panjang.”

DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.PD
(KEPALA BSKDN KEMENDAGRI)

BSKDN KEMENDAGRI TINGKATKAN KETEPATAN LAYANAN DASAR MELALUI KOLABORASI PROGRAM SKALA

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI BIMBINGAN SURVEI OPINI PUBLIK

BSKDN KEMENDAGRI JALIN KERJA SAMA STRATEGIS DENGAN TASPEN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN TINGKATKAN PERLINDUNGAN ASN

VISI

Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif

MISI

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (research based policy);
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mewujudkan kelembagaan Strategi Kebijakan yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

BULLETIN **RENSTRA JAK**

Informasi Program Kegiatan Bagian Perencanaan BSKDN 2025



DITERBITKAN OLEH :

**Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri**

ALAMAT REDAKSI :

**Jl. Kramat Raya No.132, RT.1/RW.9, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

E-MAIL :

bskdn@kemendagri.go.id

WEBSITE :

bskdn.kemendagri.go.id/website

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

PENASEHAT :

Dr. Yusharto Huntounggo, M.Pd

PENANGGUNG JAWAB :

Dr. Noudy R.P Tendean, S.IP, M.Si

PIMPINAN REDAKSI :

Tomy Veryanto Bawulang, S.Pd., M.Ed.,Lead, Ph.D.

SEKRETARIS REDAKSI:

Rachman Kosasih, S.T

REDAKTUR PELAKSANA:

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

TIM REDAKSI:

Tomy Veryanto Bawulang, S.Pd., M.Ed.,Lead, Ph.D.

Rachman Kosasih, ST

Yos Saputra, S.Kom

Adi Nugraha, S.Stat

Tito Dwian Maulana, S.Stat

Sindy Tervia, S.Stat

Mohammad Rizky Luthfiah Aziz, S.H.Intl., M.I.Pol.

Anselmus Herisno Dwicahyo,SE

Gogo Ricky Martin Purba, S.Tr.IP.

Annisa Putri Riyanto, S.IP.

Dea Afdila, S.Tr.IP.

Toriq Dwi Citra Permata, S.Tr.IP.

Ferry Pradana, S.Tr.IP.

Zaeb Awaluddin Zikri, S.Tr.IP.

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

Dwi Indarti, S.Kom.

Lina Widayanti, A.md.Ak.

Rina Yuliana, SE.

Supriyoko, SE.

TIM KREATIF DESAIN:

Devi Ariefta Cahyani, S.H.

Nada Ulhaq, S.I.A

PENYUNTING:

Rachman Kosasih, ST

Mohammad Rizky Luthfiah Aziz, S.H.Intl., M.I.Pol.

Anselmus Herisno Dwicahyo,SE

Adi Nugraha, S.Stat

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Bulletin Renstrajak BSKDN Kemendagri yang kami hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menerbitkan Bulletin Renstrajak volume ke 2 nomor 2 yang merupakan terbitan untuk triwulan April - Juni 2025.

Sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri terus berkomitmen untuk memperkuat perencanaan strategis, pengembangan kebijakan yang adaptif, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. Melalui pendekatan berbasis kajian ilmiah dan analisis kebijakan yang mendalam, BSKDN berperan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan.

Bulletin ini disusun oleh Bagian Perencanaan BSKDN sebagai sarana informasi yang merekam rangkaian kegiatan utama dan capaian strategis selama periode April s.d Juni 2025. Beberapa kegiatan unggulan yang kami tampilkan dalam edisi ini antara lain:

“BSKDN Kemendagri Tingkatkan Ketepatan Layanan Dasar melalui Kolaborasi Program SKALA dan BSKDN Kemendagri Jalin Kerja Sama Strategis dengan TASPEN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindungan ASN.”

Penyusunan bulletin ini bertujuan untuk mempermudah para pemangku kepentingan dan pembaca dalam memahami proses perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan strategis di lingkungan BSKDN.

Kami menyadari bahwa keberlanjutan dan kualitas bulletin ini sangat bergantung pada dukungan, masukan, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengajak seluruh pembaca dan mitra kerja untuk terus mendukung upaya kami dalam menjaga konsistensi dan peningkatan mutu informasi yang disajikan.

Selamat membaca, semoga bulletin ini bermanfaat dan menginspirasi.

Hormat kami,

**Bagian Perencanaan
BSKDN Kemendagri**

DAFTAR ISI

1

SUSUNAN UMUM

Susunan Dewan Redaksi	1
Pengantar Redaksi	2
Daftar Isi	3-4

1

KEGIATAN UTAMA

BSKDN perkuat layanan dasar tepat sasaran melalui Program SKALA	5-8
Kerjasama BSKDN, TASPEN dan BPJS Ketenagakerjaan	9-10
Pembahasan Rancangan Peraturan Mendagri dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan	11-12



3

SERBA SERBI BAGREN

Serba Serbi April	13-38
Serba Serbi Mei	39-86
Serba Serbi Juni	87-142



4

INFO BAGREN

Literasi Perencanaan	143-144
Artikel Bagren	145-170
Galeri Bagren	171-174
Kuliner Nusantara	175-178
Pesona Nusantara	179-182



BSKDN perkuat layanan dasar tepat sasaran melalui Program SKALA

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan penguatan layanan dasar yang tepat sasaran melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan program SKALA merupakan kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

"SKALA berfokus pada penguatan sistem yang telah ada agar menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan," kata Bima saat Rapat mengenai SKALA di Ruang Command Center. Dia menekankan bahwa Indonesia saat ini berada di titik krusial menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan kepemimpinan yang substantif, berbasis data dan riset, serta berani mengambil keputusan yang tidak politis.

Program SKALA juga bisa diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah dan pelayanan publik yang berbasis data serta bukti ilmiah. "Saya kira yang harus ada di sini adalah yang punya passion untuk diskusi, yang punya passion untuk buat riset, yang punya passion untuk advokasi policy," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti pentingnya kepala daerah memiliki ketahanan terhadap godaan politik jangka pendek dan popularitas semu. Ia mencontohkan bagaimana tokoh seperti Lee Kuan Yew mampu membangun legacy kepemimpinan yang kuat melalui kebijakan yang tidak selalu populer namun berdampak besar.



"Kata Lee Kuan Yew, dia tidak pernah pusing dengan polling dan opini publik. Dan menurut dia, pemimpin seharusnya tidak terombang-ambing," ujarnya. Lebih lanjut, Bima mengkritisi sejumlah tantangan politik lokal, lemahnya sistem meritokrasi, serta rendahnya remunerasi kepala daerah yang menyebabkan banyak talenta potensial enggan terjun ke birokrasi. Masalah-masalah ini, menurut Bima, perlu menjadi kajian strategis BSKDN.

Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi mendalam terhadap berbagai indeks yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, termasuk BSKDN. Dia menilai indeks yang baik bukan hanya soal posisi atau skor, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, narasi kebijakan yang kuat dan konsisten sangat diperlukan, sehingga seluruh program dapat dimaknai publik secara tepat. "Menarik untuk didiskusikan soal indeks ini. Bukannya tidak penting, tapi barangkali [bisa] lebih disederhanakan," ungkap Bima.

Bima berharap kemitraan dengan SKALA tidak berhenti pada kegiatan simbolik belaka, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan struktural dan pemikiran strategis yang mendalam. Untuk itu, ia mendorong BSKDN menjadi pusat diskusi kebijakan nasional yang berani menyentuh isu-isu krusial seperti otonomi daerah, sistem politik, manajemen kependudukan, dan reformasi fiskal daerah.

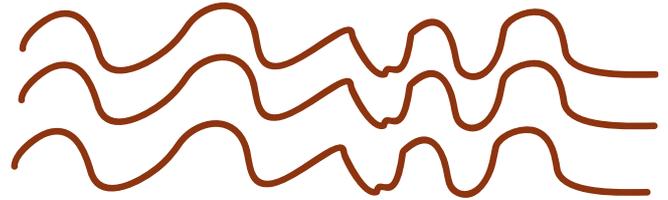




BSKDN bagus sekali bisa fokus kepada kajian tentang otonomi daerah yang hari ini kembali hangat untuk diperbincangkan,” ucapnya.

Tak ketinggalan, Bima juga menyoroti pentingnya seleksi peserta dalam Program SKALA agar sesuai dengan tujuan peningkatan kapasitas kepala daerah. Berdasarkan pengalamannya belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, pemilihan peserta harus lebih mengedepankan faktor individu, bukan hanya berdasarkan penilaian terhadap sistem yang memang telah matang.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan. Ia pun menekankan BSKDN bukan hanya badan teknokratis, melainkan juga think tank yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan kepentingan jangka panjang.



BSKDN, sambung dia, juga terus memperkuat kapasitasnya, termasuk melalui sejumlah perbaikan infrastruktur seperti command center, studio digital, serta fasilitas perpustakaan dan penerbitan jurnal kebijakan.

“Menjadi think tank untuk menghasilkan berbagai hasil yang diperoleh, untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” ungkap Yusharto. Berikutnya, Direktur Knowledge Management and Partnership SKALA Megha Kapoor menegaskan kerja sama ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat sistem pelayanan dasar yang inklusif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama di wilayah tertinggal.

SKALA mengusung pendekatan 3P: Praktik, Pembelajaran, dan Pengaruh, untuk mendorong pembelajaran dari lapangan yang bisa memengaruhi kebijakan nasional.

Adapun kemitraan antara BSKDN dan SKALA sejak 2024 hingga sekarang telah mencakup beberapa hal. Pertama, penguatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan di daerah. Kedua, pembentukan komunitas analis kebijakan di enam provinsi. Ketiga, penyusunan draf regulasi tentang tata kelola dan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan di daerah. Keempat, penyusunan draf modul penulisan policy brief bagi analis kebijakan (birokrasi, akademisi, dan LSM).



BSKDN Kemendagri Jalin Kerja Sama Strategis dengan TASPEN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindungan ASN

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Taspen Life sepakat untuk memperluas kerja sama perlindungan sosial bagi aparatur sipil negara (ASN). Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan kolaborasi ini penting untuk mewujudkan ASN yang sejahtera, mandiri secara finansial, dan terlindungi

“Melalui kerja sama ini, ASN di BSKDN bisa lebih dini mempersiapkan masa pensiun dan berinvestasi,” ujarnya secara daring saat membuka acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BSKDN dan Taspen Life di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

“Melalui kerja sama ini, ASN di BSKDN bisa lebih dini mempersiapkan masa pensiun dan berinvestasi,” ujarnya secara daring.

Lebih lanjut, Yusharto mengapresiasi langkah Taspen yang aktif melakukan sosialisasi beragam produk investasi dan perlindungan kepada jajarannya. Menurutnya, upaya tersebut dapat membangun budaya berinvestasi secara aman dan berkelanjutan berbasis layanan asuransi. Selain itu, penandatanganan kerja sama ini jadi salah satu bentuk konkret transformasi tata kelola SDM aparatur yang tidak hanya berorientasi pada kinerja.



Selain itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam melindungi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan. Hal ini terutama dalam menganalisis percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di seluruh Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menyukseskan program tersebut. “Sehingga program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini maupun kemiskinan pada umumnya bisa mencapai sasaran,” ucapnya.

Apalagi penghapusan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Karena itu, langkah ini merupakan strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan, baik dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Dia menjelaskan, penghapusan kemiskinan merupakan salah satu isu yang diatensi oleh BSKDN Kemendagri. Pihaknya juga memiliki berbagai inovasi yang salah satu tujuannya adalah menghapus kemiskinan. Hal ini misalnya dalam mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Selain memudahkan pelayanan, hal ini juga untuk memberikan kemudahan berinvestasi.



Pembahasan Rancangan Peraturan Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Melalui Bimbingan Survei Opini Publik

Dalam rangka memperkuat peran kelembagaan dan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan berbasis data, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar kegiatan bertajuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan Melalui Bimbingan Survei Opini Publik dan Pembahasan Rancangan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan, Kamis (19/06).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dibuka secara resmi oleh Kepala BSKDN dan turut dihadiri oleh Sekretaris BSKDN, Kepala Pusat I dan II, Biro Hukum Setjen Kemendagri, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BSKDN.

Hadir sebagai narasumber utama Dimas Ramadhan, M.IP dari Populis Center dan Dr. Imam Radianto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menyampaikan materi tentang Pengantar Survei Opini Publik serta Pedoman Strategi Kebijakan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat basis ilmiah dalam proses penyusunan strategi kebijakan di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri yang turut hadir dalam sesi kunjungan menyampaikan bahwa BSKDN memiliki potensi besar dalam menghadirkan informasi cepat dan valid terkait isu-isu aktual yang menjadi perhatian publik, khususnya dalam ruang lingkup kewenangan Kemendagri. Oleh karena itu, Survei Opini Publik menjadi instrumen penting dalam mendukung respons kebijakan yang presisi dan terukur.

Disebutkan, Survei Opini Publik dapat dilakukan melalui empat metode utama, yaitu:

1. Survei Online
2. Telesurvey (melalui telepon)
3. Survei Tatap Muka Langsung (Face to Face)
4. Survey Paper (berbasis hasil riset terdahulu)
5. Setiap metode memiliki keunggulan yang disesuaikan dengan tujuan survei, metode pengambilan sampel, waktu, biaya, dan jenis pertanyaan yang digunakan.





Untuk meningkatkan efektivitas survei, BSKDN akan terus memperkaya database responden, baik dari sisi jumlah maupun kualitas data responden. Hal ini penting guna menghasilkan keluaran survei yang lebih representatif dan akurat.

Sebagai bentuk penguatan kerja sama kelembagaan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara BSKDN dan Populis Center, sebagai langkah awal membangun kemitraan antara Kemendagri dan lembaga survei di bawah naungan Persepsi. Penandatanganan ini akan ditindaklanjuti dengan laporan resmi kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri dan menjadi dasar menuju penandatanganan MoU antara Kemendagri dan Persepsi.

Dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan, dijelaskan terdapat dua jenis luaran utama, yaitu:

- Kebijakan Praktis: berupa petunjuk/disposisi dan surat edaran rekomendasi;
- Kebijakan Strategis: berupa instruksi dan peraturan/regulasi.

Selain itu, pembahasan juga menekankan bahwa revisi Permendagri harus mengadopsi pendekatan evidence-based serta terintegrasi dengan sistem pemerintahan daerah. Pengambilan keputusan diharapkan dapat ditransformasikan dari yang berbasis intuisi menjadi lebih sistematis, berbasis data, dan terstruktur.

Bagian Perencanaan BSKDN menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal proses penguatan kapasitas kelembagaan dan implementasi survei opini publik secara teknokratis dan partisipatif, sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap penguatan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.



Serba Serbi April

Rapat Hak dan Jaminan Sosial bagi ASN serta Potensi Usaha Pasca Purna Tugas

Pemerintah selalu berupaya untuk terus memberikan kapasitas dan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak hanya pada saat masih aktif bertugas, tapi juga saat memasuki masa purna.

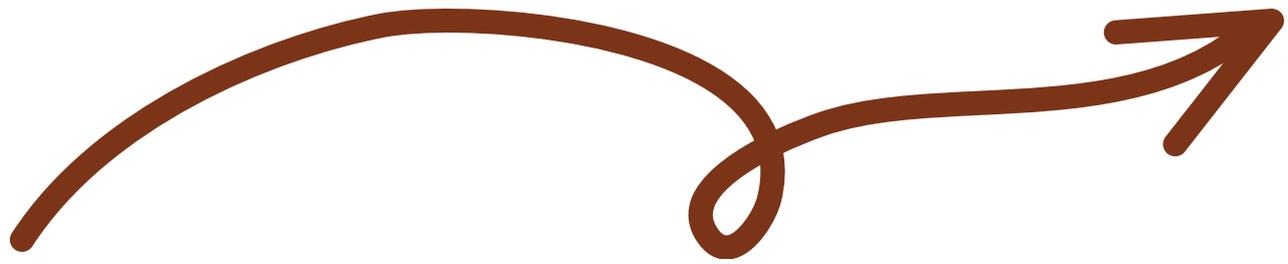
Sebagai salah satu wujud implementasi perlindungan terhadap ASN tersebut, BSKDN Kemendagri bekerja sama dengan Taspen menyelenggarakan rapat di Ruang Rapat Aula pada Rabu, 9 April 2025, pukul 09.00–12.00 WIB. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Kepala BSKDN Kemendagri dan dihadiri oleh Tim Taspen, Pegawai Pusat, beserta Bagian-Bagian di lingkup BSKDN Kemendagri.

Dalam pertemuan ini, disampaikan Sosialisasi Program Taspen yang bertujuan memberikan informasi lengkap mengenai program-program Taspen yang tersedia, yaitu asuransi, tabungan hari tua, dan dana pensiun, kecuali bagi ASN di Kementerian Pertahanan yang sejak tahun 1971 dikelola oleh Asabri. Adapun program-program Taspen yang disosialisasikan meliputi Tabungan Hari Tua.

bulanan yang diterima penerima sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa pengabdian; Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan kecacatan; dan Jaminan Kematian, yaitu perlindungan atas risiko kematian akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian kepada ahli waris.



Bapak Kepala BSKDN juga memberikan arahan penting, “Masa pensiun harus dipandang sebagai masa yang masih produktif, penggunaan hak dan jaminan harus bijak, dan setiap ASN diharapkan dapat mempersiapkan masa depannya demi hidup yang lebih bermakna” ujarnya. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya ajang sosialisasi, tapi juga momentum penting demi terwujudnya ASN yang tetap dapat berkarya.



Rapat Penyusunan Strategi Rencana Kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan BPJS Ketenagakerjaan Serta Pembahasan Draft Revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD

Pemerintah terus berkomitmen menyelaraskan perencanaan kerja dan regulasi demi tercapainya visi pelayanan masyarakat. Dalam upaya tersebut, Badan Perencanaan BSKDN aktif mengikuti Rapat Penyusunan Strategi Kerja BSKDN-BPJS Ketenagakerjaan dan Pembahasan Revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.



A. Penyusunan Strategi Rencana Kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan BPJS Ketenagakerjaan Serta Penyusunan Draft Surat Edaran

Rapat dilaksanakan di Ruang CC pada Kamis, 10 April 2025, pukul 10.00 WIB, dibuka oleh Sekretaris BSKDN dan dihadiri BPJS Ketenagakerjaan beserta Pejabat Fungsional Kemendagri. Dalam pertemuan ini, disampaikan bahwa Kemendagri telah menerbitkan beberapa SE terkait UCJ, dan BSKDN tengah menyusun Surat Edaran percepatan UCJ, melaksanakan monev di daerah, dan menargetkan peningkatan UCJ 20% per tahun. Saat ini rata-rata capaian UCJ masih 15%. Draft SE Mendagri Percepatan Capaian UCJ juga tengah disiapkan dan siap diajukan.

B. Pembahasan Draft Revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD

Rapat dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 10 April 2025, pukul 09.00–15.00 WIB, dipandu Tim Pusat 3 dan diikuti DKM dan Tim Perundang-undangan. Dalam pertemuan dibahas pengurangan indikator, sinkronisasi, dan harmonisasi ITKPD. Ahli juga dilibatkan demi memastikan ukuran dan data dapat diterapkan secara maksimal.



Serba Serbi April

Rapat Konsultansi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjadi pedoman pembangunan di daerah. Salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Selatan, turut menyusun RPJMD demi mewujudkan visi dan misinya untuk tahun 2025-2029.

Pembahasan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, diikuti 223 peserta, termasuk perwakilan Bangda, Biro Perencanaan, komponen lingkup Kemendagri, Kementerian, dan Lembaga. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III.

Dalam pertemuan ini ditekankan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, dan menjadi bagian penting dari visi pembangunan provinsi dan nasional.

Daerah menyusun rencana pembangunannya berdasarkan sistem perencanaan yang terintegrasi, dikoordinasikan dan disinergikan oleh BAPPEDA Provinsi.

Hal ini demi menjaga keselarasan perencanaan daerah dan pusat, sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN. Selain itu, konsistensi perencanaan dan penganggaran juga menjadi aspek penting, sehingga apa yang direncanakan dapat dianggarkan, dan sebaliknya. Penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMN, kemudian ditetapkan melalui Perda. Rancangan awal RPJMD harus disusun paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.



Selain itu, terdapat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah (KDH) yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun, disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN agar terdapat keselarasan program dalam pelaksanaan pembangunan.

Rapat Konsolidasi Belanja Operasional Perkantoran (002) Kemendagri Pasca Efisiensi Tahun Anggaran 2025 dan Diskusi Penyusunan Indikator Kinerja Utama & Manual Indikator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Guna mendukung program pemerintah, terjadi upaya efisiensi di lingkungan pemerintahan Indonesia, termasuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga demi mewujudkan tata kelola yang lebih matang, efektif, akuntabel, dan transparan, Rapat Konsolidasi Belanja Operasional Perkantoran (kode 002) Kemendagri Pasca Efisiensi tahun anggaran 2025 dilaksanakan pada pukul 09.00–13.00 WIB secara daring melalui platform Zoom, dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan diikuti perwakilan masing-masing Unit Kerja Eselon I, di mana pertemuan tersebut membahas pembukaan blokir anggaran Rp 3,18 miliar (kecuali perjalanan dinas), kebutuhan belanja operasional pasca efisiensi, dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) diminta untuk kembali melakukan pemetaan dan perhitungan kebutuhan belanja operasional secara rinci, kemudian menyampaikan hasil perhitungannya kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 21 April 2025.



Rapat Diskusi Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Manual Indikator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara Zoom Meeting dan diikuti oleh perwakilan dari BSKDN, Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, dan seluruh perwakilan pusat dan bagian di lingkup BPSDM Kemendagri, dengan total peserta mencapai 23 orang. Dalam pertemuan tersebut, dibahas proses penyusunan Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN), yang nantinya berguna untuk mengukur pencapaian kompetensi aparatur, meliputi aspek pengembangan, sertifikasi, dan metode perhitungan indeks.

Selain aspek teknis, pertemuan juga menitikberatkan pada pentingnya manajemen pemerintahan, yaitu upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat secara transparan, akuntabel, dan sesuai visi. Dalam hal ini, prinsip manajemen pemerintahan yang dikemukakan Hendri Fayol, perencanaan, pengoperasian, pengarahan, dan pengendalian, diterapkan demi tercapainya tata kelola yang matang. Tujuannya yaitu demi percepatan proses pembangunan, mendukung otonomi daerah, menjaga hubungan harmonis pusat dan daerah, dan mewujudkan visi pemerintahan yang unggul.

Selain aspek manajerial, rapat juga membahas tantangan dan upaya perbaikan yang tengah diupayakan, seperti desentralisasi kewenangan, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam menyusun rancangan indikator kinerja, nantinya akan digunakan ukuran-ukuran yang relevan, seperti indeks kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, indeks pengelolaan keuangan, indeks perencanaan, indeks pengawasan, dan indeks kompetensi aparatur. Dengan ukuran-ukuran tersebut, kinerja dapat dievaluasi secara matang demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih unggul, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, berkualitas, dan merata di seluruh daerah.

Terdapat beberapa rancangan indikator kinerja pembentukan ITKPDN, yaitu nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKP OTDA), indeks pengelolaan keuangan daerah (IKP KEUDA), indeks perencanaan pembangunan daerah (IKP BANGDA), indeks pengawasan pemerintahan daerah (IKP ITJEN), dan indeks kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri (IKU BPSDM), yang saat ini tengah disesuaikan sesuai sasaran strategis dan IKP BPSDM, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

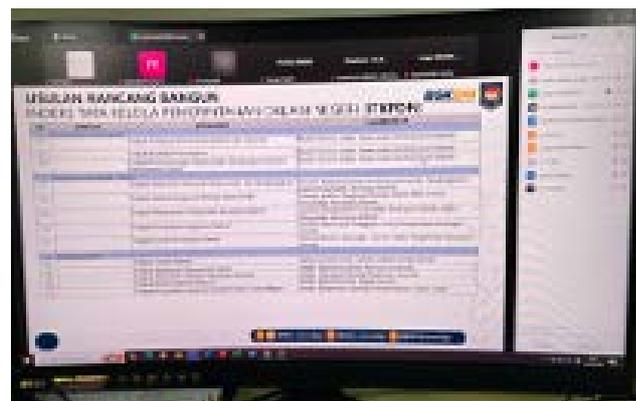


Rapat Koordinasi Kebijakan Penganggaran dalam Konteks Kelembagaan dan Peran Strategis ITKPDN

Sebagai tindak lanjut dari upaya BSKDN untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja pemerintahan, diselenggarakan Rapat Koordinasi terkait Arah Kebijakan Penganggaran dan Peran ITKPDN. Langkah ini merupakan bagian penting demi memastikan perencanaan dan penggunaan anggaran dapat berjalan lebih matang, terarah, dan sesuai kebutuhan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas peran ITKPDN sebagai instrumen ukuran kinerja, sehingga nantinya dapat menjadi acuan yang lebih akurat dan relevan demi tercapainya visi dan misi pemerintah.

Rapat Koordinasi terkait Arah Kebijakan Penganggaran dan Peran ITKPDN dilaksanakan pada pukul 09.00–12.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 BSKDN dan secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Kewilayahan dan diikuti oleh perwakilan pusat dan bagian di lingkup BSKDN, yang turut memberikan masukan demi perbaikan perencanaan ke depannya.

Pertemuan ini membahas sejumlah agenda penting, di antaranya mengenai peran ITKPDN dan arah kebijakan penganggaran yang tengah disusun-



dan diproyeksikan untuk masa mendatang. Dalam pembahasannya, disepakati bahwa ITKPDN masih akan digunakan sebagai instrumen ukuran kinerja, sesuai kesimpulan rapat bersama Biro Perencanaan.

Selain itu, ditekankan juga bahwa fokus penilaian nantinya bukan pada proses pembinaan, melainkan pada output atau hasil akhir yang dicapai dari program yang dijalankan. Hal ini penting demi memastikan ukuran kinerja yang diterapkan dapat lebih akurat, relevan, dan mampu mendorong perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan di daerah.

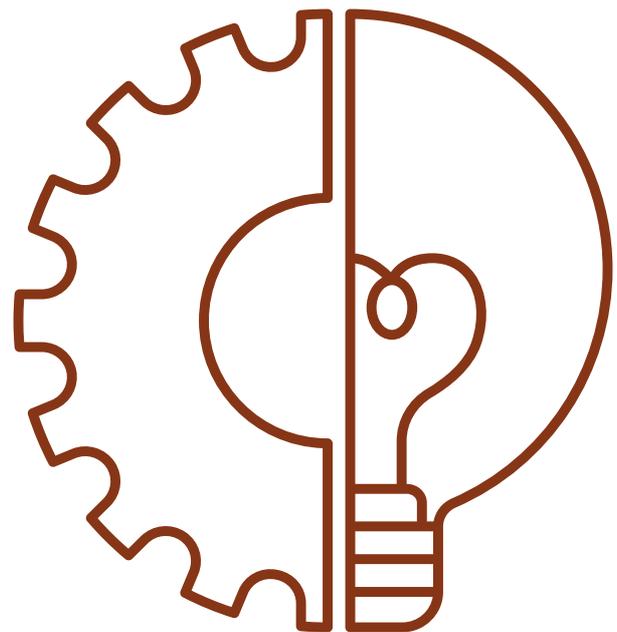
Serba Serbi April

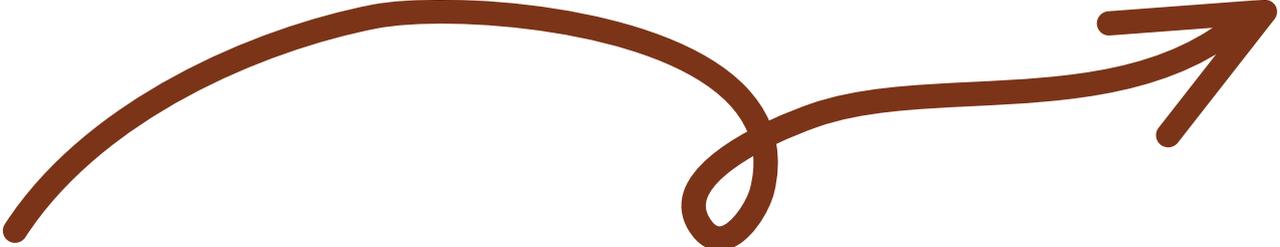
Rapat Persiapan Pelaksanaan IGA (Innovative Government Award) 2025

Sebagai tindak lanjut dari upaya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) demi mendukung kelancaran pelaksanaan Innovative Government Awards (IGA) 2025, Bagian Perencanaan (Bagren) melaksanakan rapat pembahasan pada Kamis, 17 April 2025. Rapat ini menjadi langkah penting demi memastikan segala aspek, mulai dari infrastruktur, koordinasi, hingga kerja sama, dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai visi kegiatan IGA 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Bagren tersebut menyepakati beberapa langkah penting. Di antaranya, Bagren diminta menyiapkan surat pengantar dari BSKDN ke Komdigi perihal permohonan penggunaan cloud server untuk mendukung aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Hal ini nantinya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut ke Pusdatin, mengingat prosedur pembuatan surat terkait data dan informasi harus melalui Pusdatin. Selain itu, Bagren juga tengah menyiapkan konsep Tim Pengelola Data di Command Center, yang nantinya konstruksi dan rancangannya akan disampaikan pada Senin mendatang kepada Bapak Kaban.

Dalam upaya efisiensi anggaran, proses validasi data inovasi nantinya dapat dijalankan melalui skema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), sehingga Bagren diminta menyiapkan konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS) apabila nantinya PKM diberlakukan, dan juga merekap data PKS yang pernah dijalin dengan beberapa universitas negeri, seperti UNSRI, UNILA, dan Udayana, sebagai calon pelaksana PKM. Tak lupa, Bagren juga diminta untuk mengecek kembali progres surat pengajuan kerja sama dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) demi kelanjutan koordinasi yang tengah berjalan.





Pelatihan Peningkatan Kapasitas Komunikasi Publik bagi Pegawai BSKDN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi publik aparatur, Bagian Perencanaan mengikuti kegiatan Training Komunikasi Publik dan Teknik Menghadapi Publik yang dilaksanakan pada hari Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Bagian SDMO BSKDN dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris BSKDN. Peserta berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan BSKDN.



Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari media Bisnis Indonesia. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya membangun komunikasi publik yang efektif di instansi pemerintah.

Beberapa poin yang disoroti dalam penyampaian materi antara lain mencakup teknik menyusun narasi kebijakan agar lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta strategi dalam menghadapi media dan menjalin hubungan yang positif dengan insan pers.

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh para peserta. Melalui pelatihan ini, diharapkan kapasitas pegawai BSKDN dalam menyampaikan informasi dan kebijakan kepada publik dapat meningkat, serta mampu mendorong penyebaran informasi yang profesional dan kredibel di lingkungan pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, Bagian Perencanaan berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam praktik kerja sehari-hari, khususnya dalam penyusunan narasi kebijakan dan pengelolaan informasi publik, guna mendukung citra positif kelembagaan BSKDN secara berkelanjutan.



Serba Serbi April

Rapat Pemantauan Triwulan I RKP 2025 Lingkup Pemerintah Daerah

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengikuti rapat Pemantauan Triwulan I Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 lingkup Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas. Rapat dilaksanakan pada Senin, 21 April 2025 secara daring melalui Zoom dan dihadiri oleh unit kerja eselon I Kemendagri, dengan perwakilan BSKDN diwakili oleh Sekretaris Badan.

Rapat ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait strategi, tantangan, dan capaian kinerja Rumusan Output Prioritas Nasional (RO PN) dari masing-masing unit kerja Kemendagri selama Triwulan I 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Badan menyampaikan bahwa pada RO PN penguatan inovasi pemerintahan daerah terdapat penyesuaian target karena efisiensi, dan telah dilakukan uji penyempurnaan instrumen Indeks Inovasi Daerah yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga termasuk Bappenas.

Untuk RO PN Daerah Metropolitan, tidak terdapat perubahan target, namun terjadi penyesuaian anggaran dari Rp1,5 miliar menjadi Rp.350 Juta.

Persiapan pelaksanaan pilot project di wilayah metropolitan tahun 2025 juga telah dilakukan melalui rapat koordinasi internal. Disampaikan pula bahwa terdapat kendala teknis berupa keterbatasan kapasitas penyimpanan pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Upaya perbaikan tengah dilakukan dengan meningkatkan ruang penyimpanan agar sistem dapat berfungsi optimal dalam mendukung pelaporan dan pengukuran kinerja inovasi daerah.

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, BSKDN berharap dapat terus bersinergi dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pembangunan daerah.



Konsolidasi Pemutakhiran Rancangan Renstra Kemendagri 2025–2029

Sebagai bagian dari proses finalisasi dokumen perencanaan strategis, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat konsolidasi hasil pemutakhiran Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada pukul 11.00 hingga 14.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan unit kerja eselon I (UKE I) di lingkungan Kemendagri.



Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa rancangan tujuan dan sasaran strategis Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) tercermin pada Tujuan 4 Sasaran 1 (T4S1), yaitu meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan, dan pengawasan-

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum-linmas). Setiap unit kerja eselon I juga diarahkan sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Asta Cita terkait Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025 - 2029, khususnya pada agenda memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Sebagai tindak lanjut, masing-masing UKE I diminta untuk:

- Menyampaikan target indikator kinerja tahun 2025–2029 disertai dengan Manual Indikator (dokumen perhitungan) untuk IKSS/IKU;
- Menyusun Manual Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan rincian output pada Matriks Kinerja Rancangan Renstra; dan
- Melakukan pemutakhiran dokumen Renstra pada aplikasi KRISNA-RENSTRA sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Serba Serbi April

Rapat Finalisasi SOP dan Pembahasan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SDPDN

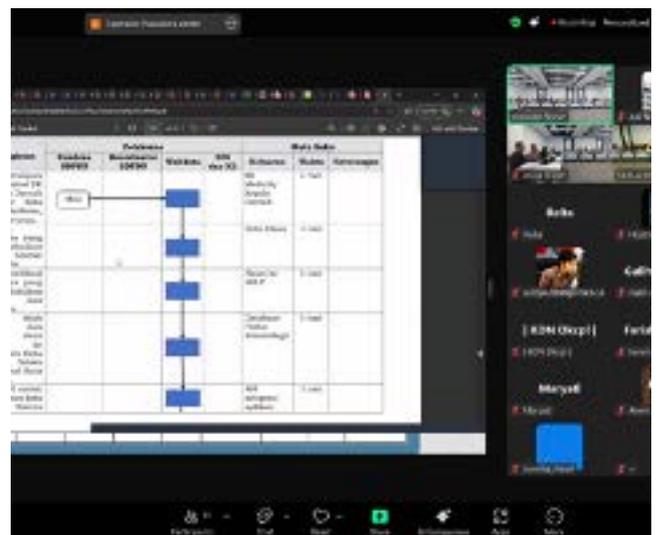
Dalam rangka memperkuat tata kelola data yang terintegrasi dan mendukung terwujudnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Kementerian Dalam Negeri terus mendorong implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi digital. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah penyusunan dokumen regulatif dan teknis yang menjadi acuan seluruh komponen dalam pengelolaan data yang akurat, terpadu, dan dapat diakses lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya kebijakan SDPDN, telah dilaksanakan rapat penyusunan dan finalisasi Standard Operating Procedure (SOP) serta pembahasan petunjuk teknis pelaksanaan SDPDN pada pukul 09.00–16.00 WIB melalui Zoom Meeting.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa struktur SOP SDPDN akan mencakup empat bagian utama, yakni SOP perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebaran data. Proses penyusunan dilakukan bersama-

tenaga ahli dari Pusdatin dan program SKALA, disertai diskusi aktif dengan seluruh komponen untuk mengonfirmasi SOP yang sudah ada serta memberikan masukan terhadap format penyusunan yang disepakati.

Selain finalisasi SOP, turut dibahas petunjuk teknis SDPDN yang mencakup lima aspek utama: cakupan data, portal berbagi pakai, pembinaan, kelembagaan, dan penyebarluasan. Integrasi data akan dimuat dalam SOP penyebarluasan karena terhubung dengan SPLP sesuai Permenkominfo No. 1 Tahun 2024. Finalisasi SOP ditargetkan selesai dalam dua minggu, sementara pendetailan petunjuk teknis dalam tiga minggu, sebelum dibahas kembali pada forum selanjutnya.



Konsultasi Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan sinkronisasi arah pembangunan nasional dan daerah, Direktorat PEIPD mengadakan rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting dengan peserta sebanyak 238 orang dari berbagai unsur, termasuk Bangda, Biro Perencanaan, komponen di lingkungan Kemendagri, serta kementerian dan lembaga terkait.



The screenshot shows a presentation slide titled 'MISI 1' with the subtitle 'MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI, INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN'. It features a table with columns for the years 2025, 2026, 2027, 2028, and 2029. The table lists various indicators and their corresponding values for each year. On the left side of the slide, there is a box for 'Sasaran 3.1' (Target 3.1) which reads 'Berkembangnya nilai-nilai Kualitas Unggulan' and a 'Strategi' (Strategy) box below it.

Rapat ini membahas pentingnya penyelarasan RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota dalam periode yang sama, khususnya dalam hal indikator kinerja dan periodesasinya. Penyusunan RPJMD diarahkan untuk mengadopsi pendekatan manajemen strategis, logic model, serta prinsip berpikir sistem dan sistem dinamis. Disampaikan pula bahwa RPJMD wajib memuat visi-

misi kepala daerah terpilih serta mengintegrasikan kebijakan nasional guna mendukung pencapaian Asta Cita. Pokok-pokok penyelarasan meliputi penyesuaian sasaran pembangunan (indikator, baseline 2025, target 2029), sinkronisasi Indikator Utama Pembangunan (IUP) antara RPJMN dan RPJMD, serta pemetaan program daerah terhadap prioritas nasional.

Dalam pembahasan khusus, disoroti bahwa RPJMD Provinsi Sulawesi Barat masih memiliki sejumlah catatan, antara lain: terdapat indikator yang belum dicantumkan dan masih dalam proses perhitungan, belum tampak pengelompokan arah kebijakan berbasis lokasi prioritas sebagaimana diatur dalam RPJMN 2025–2029, serta belum adanya program prioritas yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah, sanitasi aman berketahanan iklim, dan pemrosesan residu.

Rapat ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah dalam menyempurnakan dokumen RPJMD agar sejalan dengan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Serba Serbi April

Penguatan SPIP Terintegrasi 2025 dan Persiapan Penilaian Maturitas: Menuju Tata Kelola yang Lebih Akuntabel

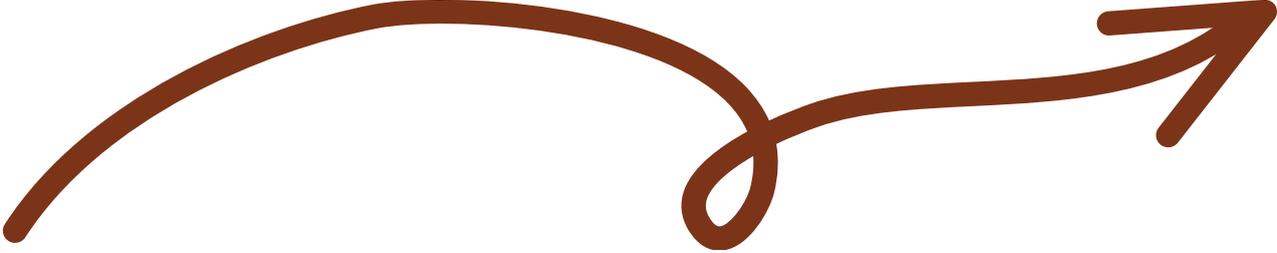
Upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan terus dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Biro Perencanaan menyelenggarakan rapat penyusunan Rencana Aksi Area of Improvement (AoI) SPIP Terintegrasi Tahun 2025 sekaligus persiapan penilaian maturitas SPIP periode 2024–2025. Kegiatan dilaksanakan secara daring pada pukul 10.00–12.00 WIB dan diikuti oleh seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE-I) Kemendagri.

Terkait AoI SPIP Terintegrasi 2025, setiap unit kerja diminta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya dengan menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan memiliki batas waktu yang jelas. Dokumen rencana aksi ini akan menjadi dasar peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP di tahun berikutnya. Template rencana telah disampaikan dan diharapkan segera dilengkapi.

Sementara itu, penilaian maturitas SPIP untuk periode 2024–2025 akan segera dimulai. Seluruh unit kerja diminta menyiapkan dokumen pendukung sesuai indikator penilaian yang berlaku. Tim Koordinasi SPIP akan memberikan asistensi teknis apabila dibutuhkan dalam proses penyusunan.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif semata, melainkan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya pengendalian di setiap unit kerja. Melalui keterlibatan aktif seluruh UKE-I dalam menyusun rencana aksi dan mempersiapkan penilaian maturitas, diharapkan terwujud sistem pengawasan internal yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Kemendagri dapat berjalan secara lebih transparan dan efisien.





Penguatan IKU melalui Penyesuaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam rangka penyesuaian indikator kinerja strategis, Bagian Perencanaan BSKDN mengikuti rapat koordinasi bersama Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri. Rapat ini diselenggarakan untuk membahas penyesuaian dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, khususnya terkait penerapan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN) sebagai bagian dari IKU pada lima Unit Kerja Eselon I, termasuk BSKDN.

Dalam forum tersebut, dibahas bahwa BSKDN akan mengambil peran sebagai instansi penilai terhadap pelaksanaan ITKPDN. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, akan disusun Rincian Output (RO) baru yang memuat secara rinci tugas, mekanisme penilaian, serta koordinasi teknis lintas unit. RO ini diharapkan menjadi pedoman kerja yang standar dan akuntabel guna menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan ITKPDN.

Disampaikan pula bahwa pelaksanaan ITKPD yang sebelumnya dilakukan oleh BSKDN tidak akan dilanjutkan dan akan digantikan oleh ITKPDN.

Namun, format Rincian Output dari ITKPD sebelumnya rencananya tetap digunakan, dengan terlebih dahulu melalui pembahasan bersama BAPPENAS guna memastikan kesesuaian substansi dan tata kelola program.

Dalam kesempatan yang sama, dibahas pula indikator kinerja terkait jumlah rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri. Biro Perencanaan akan berperan dalam mengoordinasikan proses pencatatan dan pelaporan indikator tersebut agar tetap selaras dengan arahan pimpinan dan kebijakan kelembagaan yang berlaku.

Secara keseluruhan, proses penyesuaian IKU ini menjadi bagian penting dalam penguatan peran BSKDN sebagai lembaga strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif, terukur, dan berorientasi hasil. Diharapkan hasil rapat ini menjadi titik awal bagi penguatan kolaborasi antar unit serta penetapan indikator yang lebih selaras dengan tantangan kebijakan dan prioritas nasional ke depan.

Serba Serbi April

Penyusunan Draft Kerja Sama Strategis antara BSKDN dan Taspen Life

Penguatan kolaborasi antara instansi pemerintah dan mitra layanan keuangan menjadi langkah penting dalam mendukung program kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan ASN. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan rapat penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama dengan Taspen Life. Rapat berlangsung pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB di Ruang Rapat Command Center, dipimpin oleh Sekretaris BSKDN, serta dihadiri oleh perwakilan dari unit pusat dan bagian terkait, perwakilan Taspen Life, dan Unit Kerja Eselon I Kemendagri.

Pembahasan meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan produk asuransi Taspen Save dan Taspen Group Personal Accident. Selain itu, dibicarakan pula potensi optimalisasi program kerja sama yang mencakup peningkatan kapasitas dan inovasi daerah untuk mendukung layanan pemerintahan serta perlindungan ASN di lingkungan BSKDN. Perhatian khusus diberikan pada aspek perlindungan data dan jaminan keamanan informasi pribadi penerima manfaat.

Kerja sama ini diharapkan menjadi model sinergi yang tidak hanya memperkuat program internal BSKDN, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pegawai dan mendorong inovasi layanan publik secara menyeluruh. Draft perjanjian akan difinalisasi dalam waktu dekat agar implementasi kerja sama dapat segera dilakukan secara efektif dan terukur.

Ke depan, BSKDN terus mendorong pola kemitraan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kelembagaan. Harapannya, inisiatif seperti ini dapat memperkuat ekosistem strategis antarinstitusi serta menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.



Evaluasi Kinerja Anggaran TW I dan Rencana Strategis 2025–2029

Guna meninjau progres pelaksanaan anggaran serta menyelaraskan arah kebijakan jangka menengah, Kemendagri menggelar rapat evaluasi dan pengendalian kinerja anggaran yang juga mencakup penajaman rancangan rencana strategis tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 14.00–16.00 WIB di Ruang Rapat SBP Kemendagri dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, serta dihadiri oleh perwakilan Unit Kerja Eselon I.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal menyampaikan adanya penurunan capaian realisasi anggaran secara umum pada TW I TA 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. BSKDN menjadi salah satu unit kerja yang capaian realisasinya berada di bawah rata-rata. Selain itu, Sekjen menekankan pentingnya keselarasan pelaksanaan program dengan visi dan misi Kemendagri periode 2025–2029, termasuk penyusunan program kerja yang adaptif terhadap arah pembangunan nasional.

Kemendagri juga akan mengimplementasikan kebijakan Manajemen Talenta dalam pengisian-

jabatan struktural ke depan, menggantikan mekanisme open bidding yang selama ini digunakan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesesuaian kompetensi dan efektivitas tata kelola SDM.



Serba Serbi April

Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029

Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menyampaikan pentingnya penyusunan RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

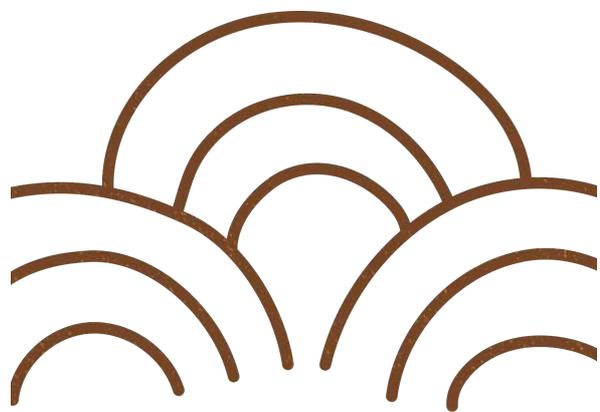
Masih dalam rangka memperkuat sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan nasional, Bagian Perencanaan turut mengikuti rapat konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat PEIPD. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Bangda, Biro Perencanaan, berbagai komponen di lingkup Kemendagri, serta kementerian dan lembaga terkait, dengan total partisipasi sebanyak 220 peserta.

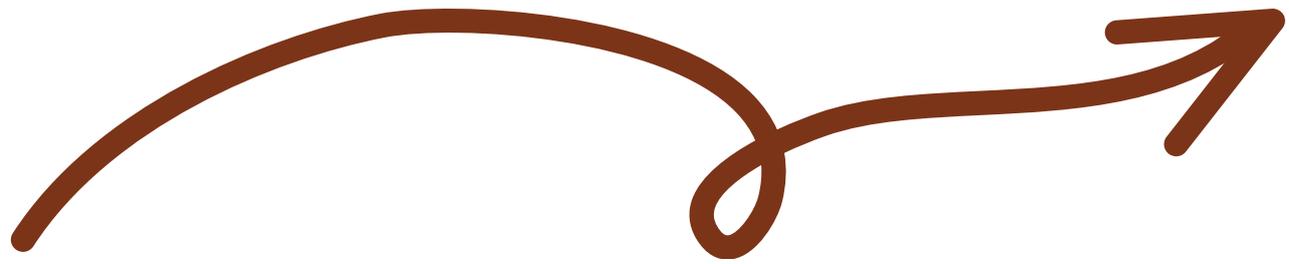
Pembahasan dalam forum tersebut menyoroti pentingnya penajaman substansi kinerja jangka menengah agar lebih kontekstual dan terukur. Meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merujuk pada isu-isu strategis nasional dalam penyusunan kinerjanya,

masih ditemukan sejumlah indikator sasaran yang memerlukan perbaikan, baik dari segi kelayakan pengukuran maupun target yang belum menunjukkan arah peningkatan yang signifikan.

Sejumlah indikator seperti kualitas lingkungan, ketahanan energi, air, dan pangan masih memerlukan klarifikasi.

Arah pembangunan kewilayahan juga dinilai belum sesuai pengelompokan prioritas wilayah dalam Lampiran RPJMN 2025–2029. Selain itu, belum teridentifikasi program prioritas daerah yang mendukung agenda strategis nasional seperti hilirisasi nikel, rumput laut, dan ketahanan pangan. Pemprov Sulsel diharapkan menyempurnakan substansi RPJMD agar selaras dengan RPJMN, RPJPD, serta memperhatikan potensi lokal dan semangat otonomi daerah.

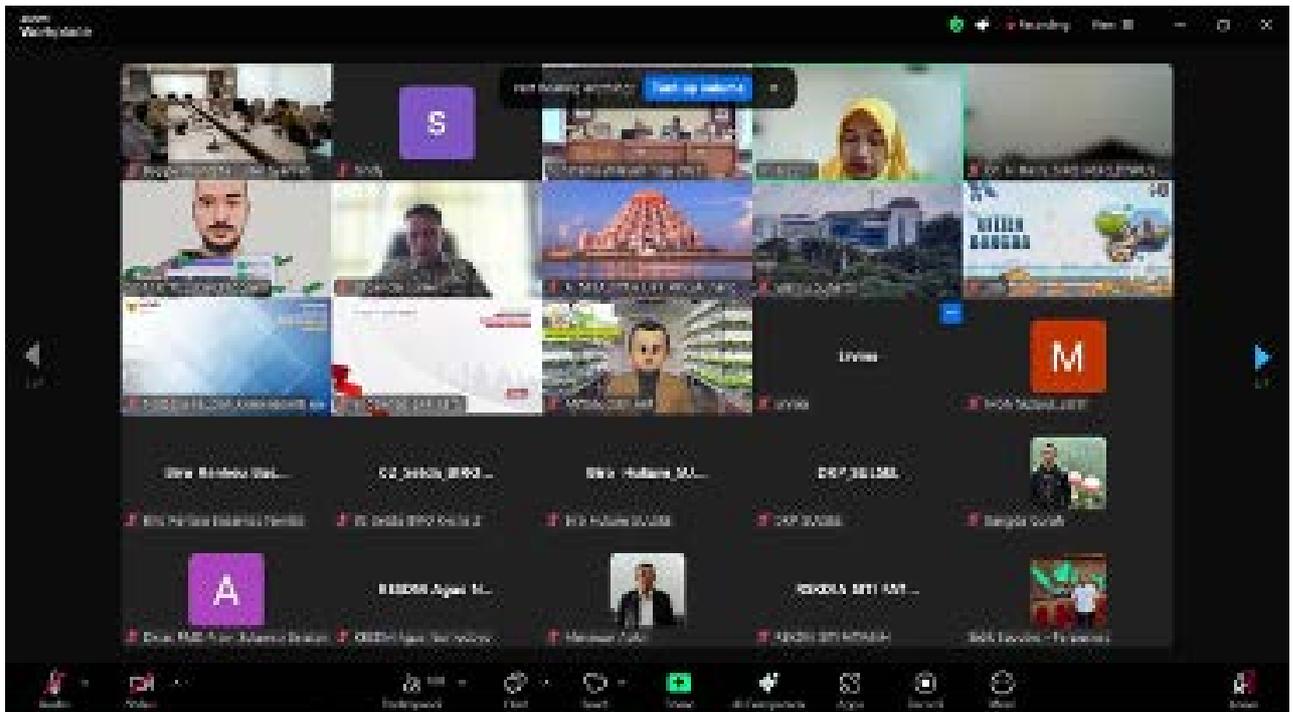
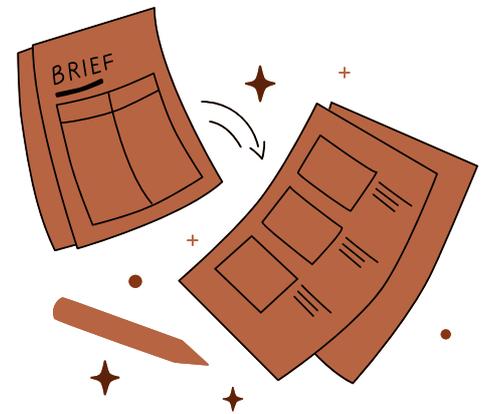




Perwakilan Ditjen Bina Bangsa Kemendagri memberikan beberapa arahan dan koreksi, antara lain:

- Penajaman isu strategis berdasarkan data sektoral dan kondisi aktual daerah
- Penyelarasan indikator kinerja dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017
- Pentingnya integrasi dengan prioritas nasional dan agenda SDGs
- Perlu dipertegas sinkronisasi program antar tingkatan pemerintahan
- Perlu pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam tahap konsultasi publik

Melalui partisipasi aktif dalam berbagai agenda tersebut, diharapkan peran BSKDN dalam mendukung perencanaan, pengendalian, serta sinergi kebijakan strategis nasional dan daerah dapat semakin optimal dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan dalam negeri.



Serba Serbi April

Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029

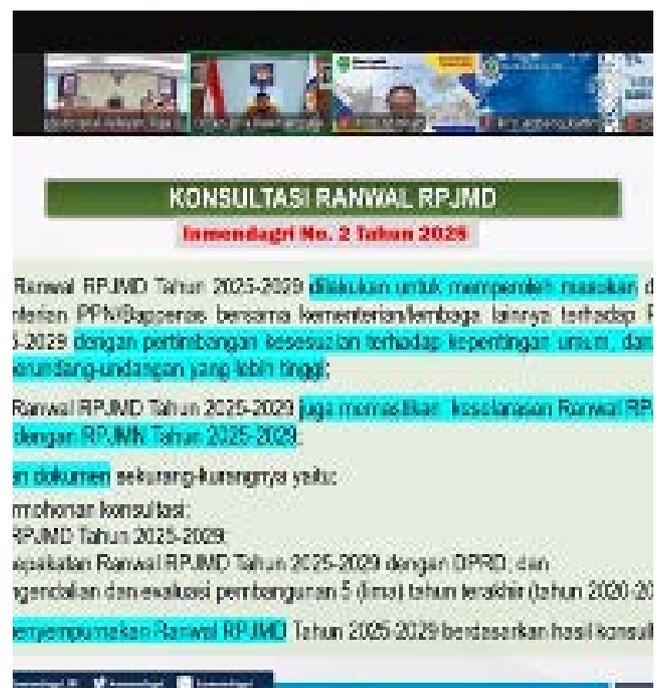
Dalam rangka mendorong sinkronisasi arah pembangunan daerah dan nasional, Bagian Perencanaan BSKDN mengikuti rapat konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, 25 April 2025. Rapat ini dipimpin oleh Direktorat PEIPD dan diikuti oleh perwakilan dari Bangda, Biro Perencanaan, komponen lingkup Kemendagri, serta kementerian dan lembaga lainnya, dengan jumlah peserta tercatat sebanyak 239 orang.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan format penjabaran RPJPD yang diklasifikasikan berdasarkan misi pembangunan daerah. Masing-masing misi tersebut juga telah dikelompokkan secara sektoral, yang menunjukkan keselarasan struktur logis antar dokumen perencanaan.

DDukungan program prioritas daerah terhadap sebagian besar kegiatan prioritas utama RPJMN tercermin dalam program akreditasi layanan kesehatan, pendidikan, riset dan inovasi daerah, serta pengembangan komoditas unggulan. Selain itu, dokumen RPJMD dinilai telah berorientasi pada hasil dan disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang relevan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang perlu dilakukan penyesuaian karena dinilai belum cukup spesifik. Penetapan target pada sejumlah indikator juga menjadi perhatian, mengingat ditemukan adanya target yang justru lebih rendah dibandingkan kondisi awal.

Melalui forum ini, diharapkan dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih disempurnakan agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara lebih tajam dan terukur.



Rapat Pembahasan Materi Perubahan Kelembagaan BSKDN menjadi Direktorat Jenderal BUMD

Sebagai tindak lanjut atas arahan pimpinan terkait rencana perubahan kelembagaan, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar rapat internal untuk membahas penyesuaian tugas, fungsi, dan output kelembagaan dalam konteks peralihan menjadi Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (Ditjen BUMD).

Kepala BSKDN memberikan arahan kepada masing-masing Pusat Strategi Kebijakan (PSK) I, II, dan III untuk segera melakukan rekapitulasi terhadap seluruh output hasil kerja selama periode 2019 hingga 2024. Dokumen rekapitulasi tersebut diminta untuk dilengkapi dengan informasi mengenai disposisi dari Menteri Dalam Negeri terhadap setiap rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan. Langkah ini dipandang penting sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas serta pelacakan tindak lanjut kebijakan strategis yang telah dirumuskan.

Sementara itu, Pusat Strategi Kebijakan IV diminta untuk memperluas ruang lingkup kajian, dengan tidak hanya berfokus pada inovasi pemerintahan, tetapi juga-

mencakup isu-isu strategis lainnya yang sesuai dengan nomenklatur kelembagaan. Termasuk di dalamnya adalah aspek pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, sebagai bagian integral dari penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, Kepala BSKDN juga menekankan agar seluruh pegawai tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, seraya menunggu kejelasan lebih lanjut dan dasar hukum resmi terkait transformasi kelembagaan. Penegasan ini disampaikan guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan secara tertib, akuntabel, dan tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Serba Serbi April

Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029

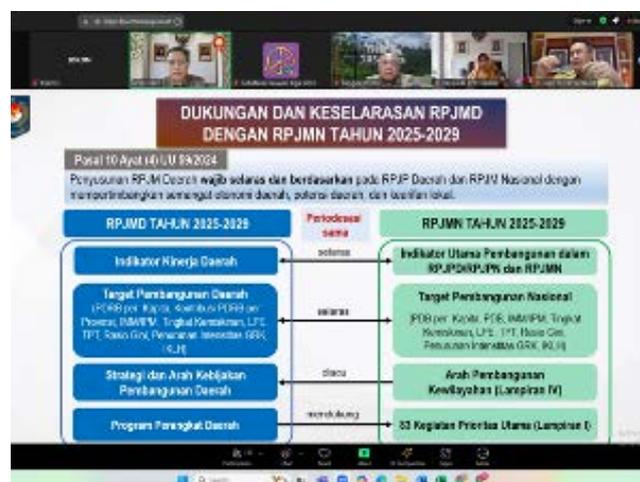
Dalam rangka mendukung keselarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, Bagian Perencanaan mengikuti rapat konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh 162 peserta, terdiri dari perwakilan Bangda, Biro Perencanaan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa sejumlah isu strategis menjadi fokus utama dalam penyusunan Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, antara lain: pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan daya saing sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, konektivitas wilayah, transformasi ekonomi, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Beberapa program prioritas yang direncanakan meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan termasuk penanganan stunting an UHC,

serta pengembangan produk unggulan daerah dan kawasan industri. Selain itu, direncanakan pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah 3T, penguatan partisipasi pemuda melalui pelatihan dan mentoring, rehabilitasi lahan bekas tambang, serta peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan akuntabilitas.

Sebagai bentuk dukungan teknis, Bagian Perencanaan menyampaikan komitmennya untuk terus mengikuti dan memantau proses penyusunan RPJMD di seluruh daerah, guna memastikan arah kebijakan dan program yang dirancang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur.





Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah

Sebagai bagian dari proses perumusan kelembagaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pemerintahan daerah, telah dilaksanakan rapat pembahasan mengenai usulan pembentukan Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (Ditjen BUMD) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Rapat berlangsung di RSU Gedung A Kemendagri dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, dengan dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Jenderal, BSKDN, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, dan Ditjen Keuangan Daerah.

Dalam rapat tersebut dibahas urgensi pembentukan Ditjen BUMD serta sejumlah alternatif langkah kelembagaan yang memungkinkan integrasi atau peleburan fungsi dari unit-unit kerja eselon I yang relevan. Dari berbagai skema yang diajukan, Sekretaris Jenderal menyampaikan keputusan bahwa tugas dan fungsi penyusunan rekomendasi kebijakan akan tetap dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I sesuai kewenangannya.

Selanjutnya, pelaksanaan fungsi pembinaan inovasi daerah direncanakan untuk dialihkan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Sementara itu, terkait dengan keberadaan perangkat daerah BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah), muncul usulan agar fungsi pembinaannya juga dilaksanakan oleh Ditjen Otda, dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan mandat kelembagaan.

Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan kerangka kelembagaan yang lebih efektif dan terintegrasi guna mendukung penguatan tata kelola BUMD dan inovasi daerah di masa mendatang.



Serba Serbi April

Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara BSKDN dan Bank Syariah Indonesia

Sebagai langkah awal dalam membangun kemitraan strategis di bidang layanan perbankan syariah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan rapat penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Bank Syariah Indonesia (BSI). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Video Conference dan dipimpin langsung oleh Sekretaris BSKDN, dengan dihadiri oleh Kepala Bagian SDMO, perwakilan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusfasker) Setjen Kemendagri, serta tim dari BSI.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penelaahan seluruh pasal dalam draf Nota Kesepahaman untuk memastikan keselarasan dengan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu poin utama yang telah disepakati adalah ruang lingkup kerja sama yang mencakup penyediaan jasa layanan perbankan syariah secara umum.

Pusfasker Setjen Kemendagri akan melakukan verifikasi terhadap surat pengajuan kerja sama yang telah disampaikan oleh BSI kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri. Setelah mendapatkan

arahan lebih lanjut dari Sekjen, dokumen draf Nota Kesepahaman akan diproses dan diserahkan kepada Biro Hukum Setjen untuk harmonisasi substansi sebelum ditandatangani secara resmi.

Secara paralel, draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga mulai disusun antara BSKDN dan unit teknis dari BSI untuk mengatur pelaksanaan program atau jasa secara lebih rinci. Dalam proses ini, Bagian Perencanaan menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penyusunan kedua dokumen serta mengawal pelaksanaan kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan antara kedua pihak.



Pembahasan Catatan Sementara Hasil Reviu dan Telaahan Rancangan Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2025–2029

Sebagai bagian dari proses konsolidasi dan penyesuaian dokumen perencanaan jangka menengah, Bagian Perencanaan mengikuti rapat pembahasan catatan sementara hasil reviu dan telaahan terhadap Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029. Rapat dilaksanakan secara daring pada pukul 13.00 hingga 16.00 WIB dan diikuti oleh Inspektorat Jenderal (Itjen), Biro Perencanaan, serta unit kerja eselon I di lingkungan Kemendagri.

Dalam forum tersebut, Biro Perencanaan menyampaikan bahwa penyusunan dokumen Renstra Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) tetap merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Kemendagri, mengingat hingga saat ini belum terdapat dasar hukum yang mengatur nomenklatur baru terkait rencana perubahan kelembagaan.

Inspektorat Jenderal memberikan sejumlah catatan terhadap penyusunan Renstra BSKDN, salah satunya adalah belum sepenuhnya mempedomani Surat Edaran Bersama (SEB) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Rincian Output (RO) dan Komponen Rincian Output (KRO).

Selain itu, Itjen juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana pengembangan aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dengan mempertanyakan kejelasan target akhir dari program tersebut setelah dialokasikan anggaran selama lima tahun.

Melalui pembahasan ini, diharapkan setiap unit kerja dapat menyempurnakan dokumen Renstra agar lebih akuntabel, terukur, serta sesuai dengan kerangka regulasi dan arahan strategis pembangunan nasional.



Serba Serbi April

Rapat Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2025

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis nasional yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan melayani. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan struktur organisasi, tetapi juga menekankan pentingnya transformasi pola pikir dan budaya kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui unit-unit kerja eselon I, termasuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), terus berkomitmen untuk menyusun rencana aksi yang selaras dengan target prioritas nasional dan indikator kinerja utama.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, Bagian Perencanaan mengikuti agenda rapat penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Rapat diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Setjen Kemendagri secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, dipimpin oleh Perencana Ahli Muda (Sinamo R.), dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh unit kerja eselon I Kemendagri secara daring maupun luring.

Rapat ini menindaklanjuti hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024, yang mencatat bahwa dari 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 4 indikator dengan capaian di bawah 90%. Beberapa indikator yang menjadi perhatian mencakup tingkat kapabilitas auditor Kemendagri, kapasitas PPUPD nasional, nilai evaluasi penyelenggaraan pemda, dan indeks pengawasan pemda. Untuk itu, ditekankan perlunya peningkatan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada dokumen Renja tahun berjalan.



Dari sisi kinerja BSKDN, seluruh IKU tahun 2024 telah berhasil mencapai target. Namun demikian, dua Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) BSKDN belum memenuhi target capaian. Penerapan inovasi SPBE melalui platform PUJAINDAH tercapai pada 177 dari 191-

daerah (92,67%), sedangkan penilaian inovasi daerah berbasis indeks terealisasi pada 529 dari 542 daerah (97,60%).

Sebagai tindak lanjut, unit kerja eselon I diminta untuk menyampaikan capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 secara triwulanan kepada Biro Perencanaan. Masing-masing unit juga diminta menyusun Renaksi Kinerja Eselon I dan II (IKP dan IKK) yang mengacu pada PK masing-masing serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Penekanan disampaikan agar seluruh pelaksanaan tugas dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme cascading kinerja, sehingga amanah pimpinan dapat dijalankan secara utuh dan akuntabel oleh pejabat pelaksana.

Melalui forum ini, diharapkan seluruh unit kerja semakin memperkuat koordinasi dan komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Peran aktif dan kolaboratif dari masing-masing unit sangat diperlukan untuk memastikan bahwa capaian indikator kinerja tidak hanya memenuhi target, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani masyarakat secara optimal.



Serba Serbi Mei

Rapat Penyusunan ITKPDN

Kementerian Dalam Negeri melalui koordinasi antar unit eselon I menyelenggarakan rapat penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN) sebagai langkah strategis dalam pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan berbasis data.

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta membahas struktur awal rancang bangun ITKPDN yang diharapkan dapat menjadi alat ukur utama dalam evaluasi kualitas tata kelola daerah. ITKPDN disusun dengan mengintegrasikan berbagai indeks sektoral yang selama ini dikembangkan oleh unit kerja eselon I (UKE I) pengampu kebijakan terkait.

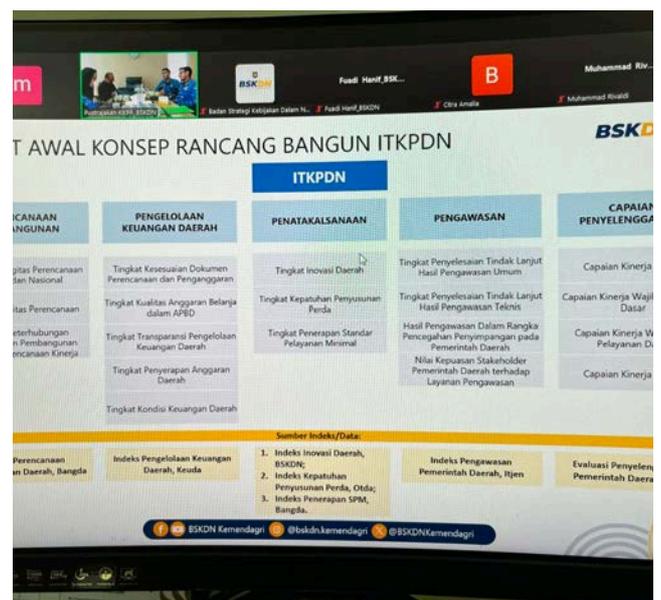
Dalam pembahasan, dijelaskan bahwa Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri merupakan ukuran komposit terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, penatalaksanaan pemerintahan, pengawasan internal, serta capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengukuran ini akan bersumber dari data dan indikator yang selama ini telah dikembangkan oleh UKE I teknis terkait.

Adapun lima indikator utama yang dirumuskan dalam ITKPDN meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Penatalaksanaan Pemerintahan
4. Pengawasan Pemerintahan Daerah
5. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rapat juga dibahas bahwa untuk bobot penilaian masing-masing indikator saat ini masih dalam proses pengkajian dan perumusan. Pembahasan lanjutan akan dijadwalkan guna memfinalisasi formula penilaian serta integrasi sistem pelaporan data berbasis digital.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan Taspen

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar rapat koordinasi bersama PT Taspen Life dalam rangka membahas finalisasi kerja sama strategis yang bertujuan memperkuat fasilitasi pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan pekerja formal dan informal.

Rapat dilaksanakan pada pukul 14.00 hingga 15.00 WIB di Ruang Command Center BSKDN, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris BSKDN. Rapat turut dihadiri secara daring oleh Kepala BSKDN dan Direktur Pemasaran PT Taspen Life, serta secara langsung oleh perwakilan manajemen PT Taspen Life dan pejabat fungsional di lingkungan BSKDN.

Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk sinergi lintas sektor antara pemerintah dan lembaga asuransi jiwa nasional untuk mendorong peningkatan perlindungan sosial dan penguatan kapasitas daerah. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- Penyusunan program peningkatan kapasitas dan inovasi daerah terkait layanan publik dan perlindungan sosial.
- Dukungan terhadap layanan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan program asuransi hari tua.

- Pertukaran data strategis dalam mendukung kebijakan perlindungan tenaga kerja.
- Serta kegiatan lainnya yang disepakati dalam kerangka kerja sama.

Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerja sama akan berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Masing-masing pihak akan bertanggung jawab atas biaya yang timbul selama pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kerja sama ini, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan, dengan melibatkan tim teknis dari kedua institusi.



Serba Serbi Mei

Konfirmasi Pencermatan Atas Usulan Relaksasi Efisiensi Belanja Kemendagri TA.2025

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengusulkan pagu relaksasi sebesar Rp2.620.329.000 kepada Biro Perencanaan (Biroren) Kementerian Dalam Negeri. Usulan tersebut disampaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi strategis BSKDN sepanjang Tahun Anggaran 2025.

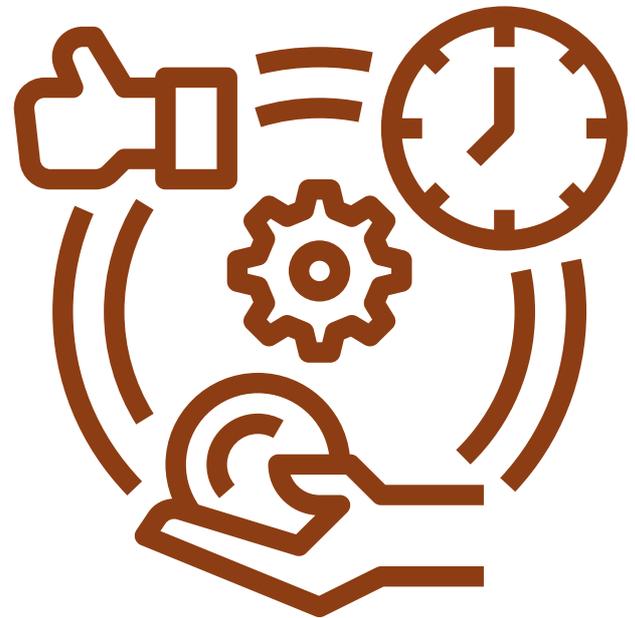
Dalam forum koordinasi bersama Biroren, disampaikan bahwa usulan relaksasi anggaran ini mencakup kebutuhan pemeliharaan gedung dan bangunan, serta berbagai aspek penunjang aktivitas kantor lainnya. Hingga saat ini, realisasi anggaran BSKDN tercatat telah mencapai Rp4,4 miliar atau sekitar 27% dari total pagu yang tersedia.

Pihak Biroren menyoroti perlunya penjelasan lebih lanjut terkait prioritas utama dari usulan relaksasi serta risiko yang mungkin timbul apabila kegiatan tidak direalisasikan. BSKDN menjelaskan bahwa meskipun belanja operasional bangunan menjadi salah satu fokus, terdapat sejumlah kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam usulan relaksasi ini, yaitu:

- Pemenuhan tambahan anggaran snack tamu dinas untuk kebutuhan satu tahun penuh;
- Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi seluruh pegawai PPNPN di lingkungan BSKDN;
- Pembiayaan penerbitan Jurnal Bina Praja, yang menjadi media utama diseminasi hasil kajian strategis BSKDN, sekaligus mendukung pengembangan karir pejabat fungsional seperti Analis Kebijakan, Perencana, dan Statistisi;
- Honorarium tim jurnal, termasuk pembiayaan bagi para reviewer dan penerjemah dari kalangan akademisi, profesional, dan pakar dari universitas;
- Pengadaan pakaian dinas untuk seluruh pegawai BSKDN, tidak terbatas pada pegawai baru;
- Kebutuhan untuk pencapaian target Indeks Pemeliharaan gedung yang telah sesuai Standar Biaya Masukan (SBM), sebagian di antaranya saat ini masih dalam proses penyerapan anggaran.

Selain itu, Biroren menegaskan bahwa keputusan final terkait penambahan Tunjangan Kinerja (Tukin) akan disampaikan pada akhir Mei 2025. Untuk itu, anggaran cadangan untuk pemenuhan tukin tidak diperkenankan digunakan sampai adanya arahan atau keputusan resmi lebih lanjut.

Usulan relaksasi ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan strategis BSKDN yang berorientasi pada pelayanan kebijakan publik, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembinaan inovasi daerah secara berkelanjutan.



USULAN RELAKSASI BLOKIR BAGIAN UMUM 2025 160425 fix - Excel

Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Acrobat Terabox Tell me what you want to do

Font Alignment Number Styles Cells Editing

REALISASI (akan disampaikan)

USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN BSKDN

KEGIATAN	OPERASIONAL						JUMLAH	CATATAN
	BIAYA	ANGKA BLOKIR	REALISASI (akan disampaikan)	USULAN RELAKSASI UNTUK KEGIATAN EKSTISTING	KEGIATAN BARU	JUMLAH		
	16.367.163.000	3.185.747.000		2.620.329.000	0	2.620.329.000	2.620.329.000	
Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	9.198.423.000	987.521.000		987.521.000		987.521.000	987.521.000	Pemenuhan pembayaran BPJS kepada seluruh pegawai PPNPN
Langganan daya dan jasa	1.254.000.000	34.500.000		34.500.000		34.500.000	34.500.000	Penambahan pembayaran langganan daya dan jasa telepon selama satu tahun
Pemeliharaan kantor	1.950.616.000	360.050.000		360.050.000		360.050.000	360.050.000	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan peralatan mesin, pompa air, alat kesehatan poliklinik umum dan gigi
Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	1.012.350.000	254.510.000		254.510.000		254.510.000	254.510.000	Pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas untuk service rutin, penggantian suku cadang dan pembelian bahan bakar untuk seluruh kendaraan dinas selama 1 tahun agar dapat berfungsi secara optimal
Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	165.000.000	146.000.000		146.000.000		146.000.000	146.000.000	Pemberian konsumsi piket kepada pamdal yang bertugas
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	325.750.000	325.750.000		325.750.000		325.750.000	325.750.000	Penyediaan pakaian dinas yang ditujukan untuk seluruh pegawai (PNS, PPNPN, Pengemudi, Petugas Kebersihan), setelah ditahun tahun sebelumnya tidak ada pengadaan pakaian dinas
Dukungan Pelayanan Kesehatan	229.288.000	114.644.000		114.644.000		114.644.000	114.644.000	Pembelian obat-obatan dan fogging guna menjaga kesehatan dan kenyamanan pegawai dalam bekerja

netilan mandiri BSKDN Sheet1

was screen

Serba Serbi Mei

Pelaksanaan Bimtek Penilaian mandiri SPIP Tahun 2025

Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), telah diselenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2025, pada hari Selasa, 17 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Monev Biro Perencanaan.

Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, dan dipimpin oleh Biro Perencanaan Kemendagri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bimtek dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unit kerja, termasuk BSKDN dan Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Melalui pembahasan langsung terhadap tabel penilaian yang mencakup aspek kegiatan pengendalian, pemantauan pengendalian internal, dan penilaian risiko. Materi tersebut dikembangkan untuk membantu para tim asesor internal memahami standar penilaian serta langkah-langkah pengisian eviden yang benar dan terukur.

Sebagaimana dijelaskan dalam paparan, SPIP merupakan sistem menyeluruh yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintah dengan tujuan memberikan keyakinan memadai atas pencapaian:

- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi,
- Keandalan pelaporan keuangan dan kinerja,
- Pengamanan aset negara,
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para asesor yang telah ditunjuk mampu menyusun penilaian mandiri SPIP dengan tepat, berdasarkan eviden yang objektif dan terverifikasi. Ke depan, hasil penilaian mandiri ini akan menjadi dasar penting dalam penguatan pengendalian internal serta peningkatan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.



Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Tahun 2024- 2025 dan mempersiapkan rencana kerja Tahun 2025-2026

Bertempat di Hotel Novotel Cikini, Jakarta, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mengawali proses penyusunan penyesuaian Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan/AWP) Program SKALA untuk periode 2025–2026. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas, Kementerian Keuangan, serta mitra pembangunan DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) Australia, dan Tim Program SKALA.

Rapat dibuka oleh Ibu Tirta Sudjiarto, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, bersama Hannah Derwent, Counsellor Human Development dari DFAT. Dalam sambutannya, kedua pihak menekankan pentingnya keberlanjutan Program SKALA yang inklusif dan strategis dalam mendukung agenda desentralisasi, penguatan tata kelola, serta integrasi prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Agenda utama rapat ini mencakup:

- Evaluasi pelaksanaan AWP tahun 2024–2025,
- Penajaman prioritas kegiatan untuk AWP 2025–2026, dan
- Penguatan strategi kolaborasi lintas sektor dalam kerangka desentralisasi yang lebih responsif dan partisipatif.

Dalam hal ini, Bagian Perencanaan BSKDN menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemantauan dan pencermatan terhadap rangkaian pelaksanaan Program SKALA, guna memastikan kontribusi nyata program terhadap tugas dan fungsi strategis BSKDN dalam mendukung reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Pemutakhiran Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Dalam rangka menyempurnakan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengikuti rapat pemutakhiran matriks kinerja dan kerangka pendanaan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan Kemendagri. Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon I, termasuk dari unsur Inspektorat Jenderal (Itjen) yang memberikan catatan strategis atas penyusunan Renstra.

Dalam pembahasan tersebut, Itjen Kemendagri menyampaikan sejumlah masukan dan evaluasi terhadap rumusan RO (Rumusan Output) dalam matriks kinerja yang masih belum sepenuhnya mengikuti kaidah penyusunan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RO oleh Kementerian/Lembaga.

Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan substansi RO yang menjadi perhatian Itjen. Sebagai contoh, RO FBA.001 disesuaikan menjadi: "Daerah yang menerapkan difusi inovasi dalam pengendalian inflasi pada pemerintah daerah." Selain itu, target dan capaian indikator RO juga mendapatkan sorotan agar dapat meningkat secara konsisten setiap tahunnya, sebagai bagian dari prinsip kinerja berkelanjutan.

TARGET DAN SATUAN				ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
				*****	*****	*****	*****	*****	BSKDN
									BSKDN
47	47,5	48	48,5						
63	66	69	72						



Serba Serbi Mei

Konfirmasi Pencermatan atas Usulan Relaksasi Efisiensi Belanja Kementerian Dalam Negeri TA 2025

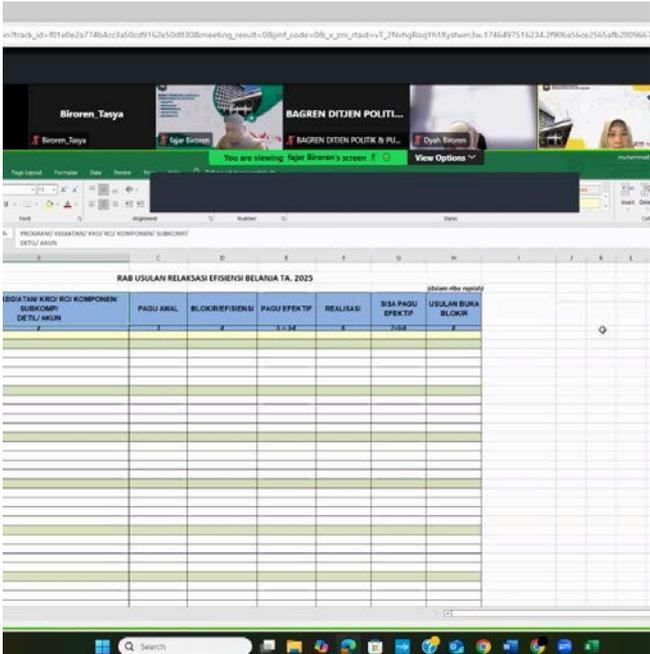
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Perencanaan menyelenggarakan rapat koordinasi usulan relaksasi efisiensi belanja TA 2025, yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 09.30 WIB hingga 11.00 WIB secara daring melalui Zoom Meeting.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Anggaran Biro Perencanaan dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) di lingkungan Kemendagri. Dalam arahannya, Kepala Bagian Anggaran menekankan pentingnya ketepatan data dan justifikasi dalam penyampaian usulan relaksasi dan buka blokir anggaran, agar pelaksanaan anggaran tetap efisien, akuntabel, serta mendukung pencapaian output yang telah direncanakan.

Penyusunan matriks tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara rincian output dan anggaran capaian output, sehingga setiap perubahan atau penyesuaian tetap dalam kerangka mendukung target kinerja.

Sebagai langkah tindak lanjut, seluruh UKE I diharapkan dapat segera menyampaikan dokumen usulan relaksasi sesuai format dan batas waktu yang ditentukan, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengusulan kepada instansi pengelola anggaran.

Dengan adanya forum koordinasi ini, diharapkan seluruh proses efisiensi dan penyesuaian belanja TA 2025 dapat dilakukan secara terstruktur dan tepat sasaran, guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kemendagri.



The screenshot displays a Zoom meeting interface with a shared Excel spreadsheet. The spreadsheet is titled "RAB USULAN RELAKSASI EFISIENSI BELANJA TA. 2025" and includes columns for "SUBKOMP. DETIL AWAL", "PAGU AWAL", "BLOKIR/EFISIENSI", "PAGU EFEKTIF", "REALISASI", "SISA PAGU EFEKTIF", and "USULAN BUKA BLOKIR". The spreadsheet is currently empty, with only the header row visible. The Zoom meeting controls are visible at the bottom of the screen.

Pemutakhiran Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Dalam rangka menyempurnakan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengikuti rapat pemutakhiran matriks kinerja dan kerangka pendanaan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan Kemendagri. Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon I, termasuk dari unsur Inspektorat Jenderal (Itjen) yang memberikan catatan strategis atas penyusunan Renstra.

Dalam pembahasan tersebut, Itjen Kemendagri menyampaikan sejumlah masukan dan evaluasi terhadap rumusan RO (Rumusan Output) dalam matriks kinerja yang masih belum sepenuhnya mengikuti kaidah penyusunan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RO oleh Kementerian/Lembaga.

Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan substansi RO yang menjadi perhatian Itjen. Sebagai contoh, RO FBA.001 disesuaikan menjadi: "Daerah yang menerapkan difusi inovasi dalam pengendalian inflasi pada pemerintah daerah." Selain itu, target dan capaian indikator RO juga mendapatkan sorotan agar dapat meningkat secara konsisten setiap tahunnya, sebagai bagian dari prinsip kinerja berkelanjutan.

TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	CATATAN PERUBAHAN
2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
										BSKDN	3. 001.001 Program Strategi Pusat dan Daerah
					*****	*****	*****	*****	*****	BSKDN	
46,5	47	47,5	48	48,5						BSKDN	
60	63	66	69	72							



Serba Serbi Mei

Persiapan Penyusunan Materi Program Pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan dari BSKDN kepada Bupati Indramayu

Dalam rangka penguatan kapasitas pemerintahan daerah, Bupati Indramayu dijadwalkan akan melaksanakan Program Pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan ke Kantor Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) pada Selasa, 15 Juli 2025, pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.

Program ini dirancang sebagai bentuk pembinaan dan fasilitasi kepada kepala daerah guna meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta strategi nasional pembangunan.

Selama kunjungan, materi pembinaan akan difokuskan pada tugas dan fungsi BSKDN serta unit kerja eselon II (UKE II) di lingkungan BSKDN. Materi juga akan mencakup pendalaman terhadap isu-isu strategis dan aktual yang ditangani oleh masing-masing pusat, seperti strategi pengembangan inovasi daerah, penguatan indeks tata kelola pemerintahan, serta metode penyusunan rekomendasi kebijakan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, masing-masing pusat di lingkungan BSKDN telah diminta untuk menyiapkan bahan paparan yang mencakup:

- Penjelasan mengenai tugas dan fungsi unit kerja;
- Proses penjaringan isu strategis dan metode analisisnya;
- Proses pengkajian serta penyusunan rekomendasi kebijakan;
- Penjelasan tentang pengukuran indeks dan metode evaluasinya.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja.



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Kerjasama Dengan Mitra

Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dan mengantisipasi dinamika kebijakan strategis nasional, Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN menyelenggarakan rapat penting bersama mitra pembangunan dan pelaksana program, yang dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik dan dihadiri oleh sejumlah mitra strategis, yakni Eka T.P. Simanjutak (Yayasan Nusantara Sejati), Budi Rahardjo (Plan C Institute), Sarjuni Adicahya (PT Surveyor Indonesia), dan Sigit Murwito (Kemitraan).

Dalam forum diskusi tersebut, para peserta membahas arah kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN) serta Laporan Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintahan Daerah (LPEPD) di berbagai daerah.

Pihak Kemitraan menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan BSKDN akan tetap dilakukan secara intens, terutama dengan adanya perubahan arah kebijakan strategis nasional dan kemungkinan dampak dari kebijakan internasional, seperti kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (USA) yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan dukungan dari Ford Foundation.

Isu penting lainnya adalah rencana perubahan struktur organisasi BSKDN menjadi Direktorat Jenderal BUMD. Meski demikian, seluruh mitra menyambut baik adanya komitmen bahwa komunikasi dan kolaborasi akan tetap berjalan dan justru diharapkan membuka peluang kerjasama baru ke depan.



Serba Serbi Mei

Rapat konsolidasi rancangan renstra tahun 2025-2029

Dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan strategis dan rencana pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) telah melaksanakan rapat konsolidasi bersama Biro Perencanaan (Biroren) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pemutakhiran Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri Tahun 2025–2029.

Pertemuan ini membahas sejumlah penyesuaian penting dalam rangka memastikan keselarasan antar program dan kegiatan strategis lintas kementerian. Salah satu poin utama yang disepakati adalah perubahan nama Result Output (RO) ITKPD menjadi ITKPDN. Perubahan nomenklatur ini telah disetujui oleh pihak Bappenas, dengan catatan agar dilakukan penyesuaian target dan indikator agar sejalan dengan cakupan program ITKPDN secara keseluruhan.

Selain itu, turut disepakati pula penyesuaian nomenklatur pada RO terkait pilot project inovasi tematik. Semula, RO tersebut berbunyi “Daerah Metropolitan yang Difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik”, kini disederhanakan menjadi “Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik”. Penghapusan istilah “metropolitan” dilakukan untuk menghindari pembatasan wilayah sasaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat menjangkau lebih luas dan beragam daerah sesuai kebutuhan program inovasi yang ditargetkan.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penyesuaian target pada RO Daerah yang Difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri. Akibat adanya efisiensi anggaran, target yang semula mencakup 546 daerah kini dikoreksi menjadi 530 daerah. Penyesuaian ini tetap mempertahankan efektivitas capaian program, dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang tersedia.

FGD Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Percepatan Capaian Universal Coverage Jamsostek

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan percepatan capaian perlindungan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan rapat strategis membahas pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), yang dilaksanakan pada Kamis, 8 Mei 2025, bertempat di Ruang Command Center BSKDN, pukul 10.00 s.d. 12.30 WIB.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris BSKDN dan dihadiri oleh Asisten Deputi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran. Turut hadir secara daring perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta para pejabat struktural dan fungsional dari lingkungan BSKDN.

Dalam paparannya, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan gambaran umum cakupan Jamsostek saat ini. Dari total 147,71 juta angkatan kerja di Indonesia, terdapat 139,85 juta penduduk bekerja dan 101,81 juta pekerja potensial yang eligible untuk perlindungan sosial. Untuk segmen pekerja

formal sebanyak 40,72 juta pekerja, sekitar 80,05% atau 32,6 juta pekerja telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, dari 60,1 juta pekerja informal, baru sekitar 14,41% atau 8,80 juta pekerja yang tercakup hingga data per 24 Februari 2024.

Tingkat coverage perlindungan sosial dinilai masih rendah, khususnya pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pekerja layanan publik, serta pekerja rentan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas kepesertaan secara inklusif dan berkeadilan.



Dari sisi kebijakan fiskal, narasumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan penggunaannya untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berasal dari perkebunan sawit, minimal 80% dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dan maksimal 20% dapat digunakan untuk kegiatan lain yang ditentukan, termasuk perlindungan sosial bagi pekerja sawit yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial.

Selain itu, terungkap bahwa beberapa pemerintah daerah telah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur alokasi anggaran Jamsostek melalui Dana Desa. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala teknis akibat adanya surat edaran dari Kementerian Desa yang melarang penggunaan Dana Desa untuk Jamsostek. Hal ini mendorong adanya kebutuhan akan dukungan regulasi dari Kementerian Keuangan untuk memberikan ruang penggunaan Dana Desa dalam mendukung program perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Bagian Perencanaan BSKDN menyatakan kesiapannya untuk mengawal pelaksanaan peningkatan Universal Coverage Jamsostek, terutama dalam bentuk tindak lanjut kerja sama yang telah dibangun antara BSKDN dan BPJS Ketenagakerjaan, guna mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan pekerja, baik formal maupun informal.



Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kemendagri Tahun 2025

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemendagri Tahun 2025, Biro Perencanaan Kemendagri menggelar rapat koordinasi secara daring pada pukul 13.30 WIB melalui Zoom Meeting. Rapat ini dipimpin langsung oleh Biro Perencanaan dan diikuti oleh perwakilan seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kemendagri, termasuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).

Rapat ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan implementasi rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di masing-masing unit kerja. Seluruh perwakilan unit menyampaikan progres pelaksanaan, capaian, serta kendala yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan koordinasi lanjutan.

Dalam arahnya, Biro Perencanaan menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen dan data dukung sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Diharapkan, seluruh unit kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi AKIP secara terstruktur dan komprehensif.

Bagian Perencanaan BSKDN menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut AKIP, khususnya di lingkungan BSKDN. Upaya tersebut dilakukan melalui:

- Koordinasi intensif dengan seluruh unit kerja terkait,
- Pengumpulan dan verifikasi data dukung dari masing-masing unit,
- Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap hambatan yang mungkin timbul selama proses implementasi.

Dengan sinergi lintas unit kerja, diharapkan pelaksanaan rencana aksi ini dapat berjalan secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

DEKLIN	PENANGGUNGJAWAB	PROSES PELAKSANAAN	KEMALAH	HASIL TINDAK LANJUT	DATA DUKUNG	CATATAN
Monev	Bagian Monev dan Pelaporan Kinerja, Biro Perencanaan	Tahap dilaksanakan rapat koordinasi dan peninjauan data capaian 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 untuk seluruh unit kerja.	Terdapat dalam pengumpulan data dukung yang belum lengkap dan data dukung yang belum terverifikasi.	Perencanaan laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut AKIP Tahun 2024.	1. Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan Nomor: P/10/1/2024 tanggal 23 Januari 2024, ke seluruh unit kerja. 2. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: P/10/1/2024 tanggal 23 Januari 2024, ke seluruh unit kerja. 3. Laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut AKIP Tahun 2024.	Terdapat
BSKDN	Bagian Perencanaan Program, Biro Perencanaan dan seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE-I) lingkungan Kemendagri	Monev indikator masih dalam proses penyelesaian.	Perencanaan Manual Indikator dan capaian belum selesai dengan perencanaan kinerja 2023-2029.	1. Perencanaan Indikator Manual Indikator Kinerja di tingkat Kementerian. 2. Arah perencanaan untuk seluruh Kementerian dan Lembaga di lingkungan Kemendagri Tahun 2025.	1. Surat Sekretaris Jenderal Nomor: P/10/1/2024 tanggal 23 Januari 2024, ke seluruh unit kerja. 2. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: P/10/1/2024 tanggal 23 Januari 2024, ke seluruh unit kerja. 3. Laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut AKIP Tahun 2025-2029 dan 2023-2029.	Terdapat

Serba Serbi Mei

Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri tentang ITKPDN

Rapat digelar di Ruang Rapat Pusat 2 BSKDN dan dipimpin oleh Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan, serta dihadiri oleh Pejabat Statistisi, Analisis Hukum, dan perwakilan dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri yang turut serta secara daring.

Dalam rapat tersebut dibahas bahwa Ranpermendagri ITKPD kini tengah dalam proses penyempurnaan, salah satunya adalah perubahan nomenklatur menjadi ITKPDN (Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nasional). Indeks ini dirancang sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri, sehingga pengembangannya diarahkan untuk memiliki struktur dan metodologi yang kokoh dan berkelanjutan.

ITKPDN sendiri akan menjadi indeks komposit yang mengintegrasikan berbagai indeks existing yang telah dikembangkan oleh Kemendagri dan instansi terkait. Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan nilai indeks, penyusunan ITKPDN akan dibatasi pada dimensi dan indikator yang bersifat makro, sehingga meskipun terjadi revisi pada indeks-indeks penyusun,

Bagian Perencanaan BSKDN turut melaksanakan peran strategis dalam proses ini melalui fasilitasi dan asistensi penyusunan Ranpermendagri, termasuk melakukan penelaahan terhadap aspek legal dan substansi agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BSKDN dalam mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan daerah secara nasional melalui instrumen kebijakan yang terukur, integratif, dan berbasis bukti.





Rapat Konsultasi RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 136 peserta yang berasal dari unsur Ditjen Bangda, Biro Perencanaan, BSKDN, Ditjen Bina Pemdes, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

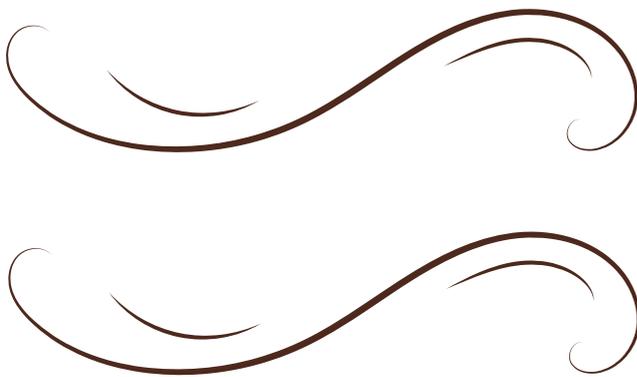
Dalam rapat ini disampaikan bahwa Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan desain awal, pendalaman oleh OPD dan internal pemerintah provinsi, pelaksanaan forum konsultasi publik, hingga penyampaian dokumen ke DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam rapat ini disampaikan bahwa Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan desain awal, pendalaman oleh OPD dan internal pemerintah provinsi, pelaksanaan forum konsultasi publik, hingga penyampaian dokumen ke DPRD Provinsi Gorontalo.

Tujuan pembangunan daerah diarahkan pada lima aspek strategis: peningkatan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan kualitas SDM, kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski demikian, terdapat beberapa catatan penting yang diberikan dalam rapat, di antaranya:

- Masih banyak indikator kinerja sasaran yang belum terisi atau bersifat terlalu teknis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound).
- Format penulisan dokumen RPJMD belum menggunakan ketentuan terbaru, termasuk dalam hal integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), di mana dokumen yang digunakan masih mengacu pada KLHS RPJPD Tahun 2024.
- Pembaruan data dan format dokumen menjadi prioritas penting dalam proses penyempurnaan rancangan RPJMD agar selaras dengan regulasi dan arah kebijakan nasional.



Serba Serbi Mei

Rapat Pembahasan Penataan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah

BSKDN menggelar rapat internal di Ruang Rapat Vidcon BSKDN pada Rabu, membahas tindak lanjut hasil rapat Sekretaris BSKDN bersama Ditjen Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Otonomi Daerah (OTDA), dan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), terkait pembentukan Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (Dirjen BUMD).

Dalam pemaparan laporan hasil rapat sebelumnya, Sekretaris BSKDN menyampaikan bahwa masing-masing pihak—baik Ditjen Keuda, Ditjen OTDA, Biro Ortala, maupun Bagian SDMO BSKDN—telah menyusun usulan struktur organisasi untuk Dirjen BUMD. Salah satu usulan yang mengemuka berasal dari Ditjen OTDA, yakni menyarankan struktur organisasi Dirjen BUMD agar mengacu pada pola struktur organisasi yang digunakan oleh Kementerian BUMN, guna memastikan keselarasan fungsi dan efektivitas pembinaan BUMD di daerah.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pembentukan Dirjen BUMD, Kepala BSKDN menekankan pentingnya pengisian jabatan struktural maupun fungsional oleh SDM yang berkompeten dan berpengalaman, sesuai dengan nomenklatur bidang dan jabatannya masing-masing. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan transformasi organisasi tetap berjalan selaras dengan tujuan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai bentuk kesiapan internal, Kepala BSKDN juga meminta seluruh pegawai BSKDN untuk segera mempelajari dan mendalami peran dan fungsi Dirjen BUMD, terutama yang berkaitan dengan pembinaan kepada pemerintah daerah. Pemahaman ini dinilai penting untuk memperkuat kesiapan SDM dalam menghadapi perubahan nomenklatur kelembagaan yang akan datang. Ditegaskan pula bahwa formasi jabatan struktural di Dirjen BUMD nantinya akan tetap mengacu pada formasi jabatan struktural yang telah berlaku di BSKDN, dengan tetap mengedepankan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



Rapat FGD terkait upaya peningkatan nilai survey penilaian integritas Kemendagri tahun 2025

FGD ini merupakan tindak lanjut dari hasil SPI yang dilaksanakan pada 22 Januari 2025 serta surat dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) tertanggal 27 Maret 2025. Dalam surat tersebut, KPK menyampaikan hasil SPI 2024 yang menempatkan Kemendagri dengan skor 75,23 dalam kategori “waspada”. Acara ini turut menghadirkan narasumber dari KPK RI, Bapak F. Putra, yang memberikan pemaparan mendalam terkait hasil indeks dan langkah-langkah perbaikan.

FGD ini merupakan tindak lanjut dari hasil SPI yang dilaksanakan pada 22 Januari 2025 serta surat dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) tertanggal 27 Maret 2025. Dalam surat tersebut, KPK menyampaikan hasil SPI 2024 yang menempatkan Kemendagri dengan skor 75,23 dalam kategori “waspada”. Acara ini turut menghadirkan narasumber dari KPK RI, Bapak F. Putra, yang memberikan pemaparan mendalam terkait hasil indeks dan langkah-langkah perbaikan.

Secara nasional, Indeks Integritas Nasional tahun 2024 berada di angka 71,53 (kategori rentan), dengan nilai tertinggi diraih oleh Bank Indonesia (86,7) dan nilai terendah oleh Kabupaten Seram Bagian Timur (52,9). Sementara itu, Indeks Integritas Kemendagri meningkat 3,52 poin dari tahun sebelumnya menjadi 75,23. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan indeks dari responden ekspert (+16,08) dan responden eksternal (+3,09), meskipun terdapat penurunan dari responden internal sebesar -4,16 poin.

Dari 13 unit kerja di lingkungan Kemendagri, masih terdapat 7 unit kerja yang mendapatkan nilai 0, termasuk BSKDN, yang memperoleh nilai internal 74,32 dan nilai ekspert 80,97, namun tidak ada nilai dari responden eksternal. Rekomendasi Perbaikan dari KPK
Beberapa poin penting yang menjadi fokus

Rekomendasi dari KPK, antara lain:

- Mempertahankan dan memperkuat program antikorupsi, seperti penguatan pengawasan internal, penerapan kode etik, dan sistem whistleblowing yang efektif.



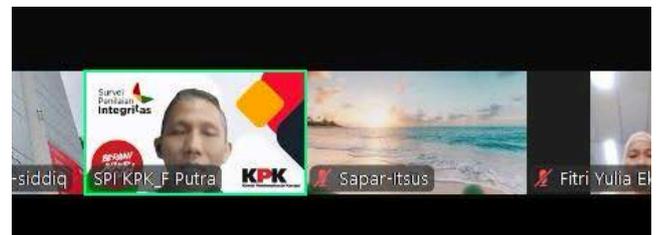
- Memperbaiki kualitas data populasi responden internal, eksternal, dan ekspert melalui verifikasi, pemutakhiran berkala, serta pengelolaan data berbasis teknologi.
- Menjaga validitas survei dengan menghindari pengkondisian responden dan memastikan pelaksanaan survei yang transparan dan objektif.
- Mengembangkan sistem pelaporan yang akurat, seperti kewajiban pengisian buku tamu pada setiap unit layanan, untuk meningkatkan kualitas data responden eksternal.
- Memastikan kelengkapan kontak responden, terutama nomor WhatsApp, agar survei dapat menjangkau lebih luas dan representatif.

Rencana Tindak Lanjut SPI

Sebagai tindak lanjut dari hasil SPI 2024, Kemendagri akan menyusun program rencana aksi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tersebut. FGD ini juga menegaskan pentingnya sinergi lintas unit kerja dalam menjaga dan meningkatkan integritas di lingkungan Kemendagri.

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan SPI di lingkungan Kemendagri, Koordinator SPI Bapak Hasbi As-siddiq (Itjen Kemendagri) dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut di nomor kontak: 0896 4419 9366.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kemendagri dalam meningkatkan budaya integritas dan antikorupsi yang sistemik dan berkelanjutan, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas tinggi.



SKS INTEGRITAS PERINDIKATOR: UNIT KERJA KEMENDAGRI

UNIT KERJA	Internal	Ekstern
MBER DAYA MANUSIA	86.99	0.00
DALAM NEGERI	74.32	0.00
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	64.75	89.00
KEUANGAN DAERAH	69.40	89.81
PEMBANGUNAN DAERAH	68.16	0.00
PEMERINTAHAN DESA	65.07	0.00
IDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	71.12	91.67
OMI DAERAH	68.56	87.40
K DAN PEMERINTAHAN UMUM	74.08	91.85
	66.44	0.00
LAM NEGERI	69.60	0.00
	73.30	88.14
PRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	63.81	0.00

Rapat Tindak Lanjut Kerja Sama antara BSKDN dengan SKALA

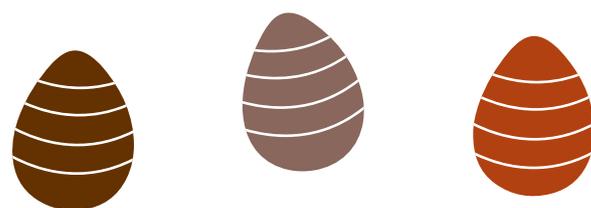
Pertemuan ini membahas pelaksanaan kegiatan kolaboratif BSKDN-SKALA dalam Annual Work Plan (AWP) 2024–2025 serta persiapan untuk penyusunan AWP 2025–2026. Disampaikan bahwa kerja sama kedua pihak selama ini telah berkontribusi pada capaian intermediate outcome dalam area fokus penguatan perencanaan daerah guna mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Salah satu contoh nyata dari implementasi kerja sama ini adalah Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan untuk Pelayanan Dasar Inklusif yang telah dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dan Maluku, sebagai bagian dari inisiatif memperkuat kapasitas perencanaan kebijakan publik yang responsif terhadap kelompok rentan.



Selain itu, rapat juga membahas area fokus lanjutan, yakni dukungan terhadap peningkatan komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan kualitas belanja daerah. Meskipun target output berupa fasilitasi teknis untuk penguatan kapasitas kepala daerah belum tercapai hingga periode pelaporan (1 Juli – 31 Desember 2024), Tim SKALA telah menyampaikan Lembar Kegiatan Program SKALA 2024/2025 untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Sekretaris BSKDN sebagai bentuk kelanjutan kerja sama strategis ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSKDN juga menyampaikan harapan agar rencana perubahan nomenklatur BSKDN menjadi Direktorat Jenderal BUMD tidak mengganggu kelangsungan kemitraan dengan SKALA. Hal ini mengingat bahwa isu layanan dasar tetap erat kaitannya dengan optimalisasi peran BUMD di daerah, sehingga kerja sama yang telah terbangun perlu terus dijaga dan dikembangkan.



Serba Serbi Mei

Focus Group Discussion (FGD) Revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian

FGD ini diselenggarakan dalam rangka pembahasan revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang dirancang untuk diubah menjadi Pedoman Strategi Kebijakan di lingkungan Kemendagri dan Pemda.

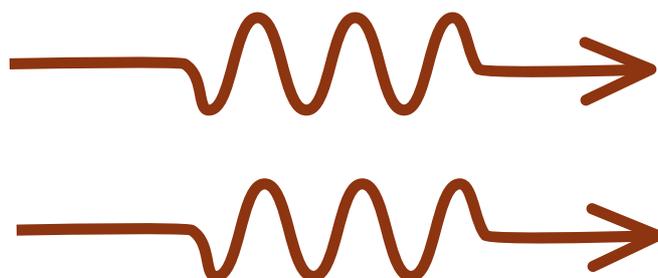
Dalam diskusi terungkap bahwa revisi regulasi ini merupakan kebutuhan nyata di daerah, mengingat pentingnya kejelasan dan penguatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai penggerak reformasi kebijakan publik berbasis bukti. Revisi ini diharapkan membawa perubahan pada tata kelola JFAK di daerah dan meningkatkan atensi pemerintah daerah terhadap pemanfaatannya secara optimal.



Proses revisi ini tidak hanya akan mengatur mengenai jabatan fungsional, tetapi juga memuat substansi pembinaan organisasi dan sistem strategi kebijakan di daerah, termasuk membedakan secara tegas antara analis kebijakan dengan profesi fungsional lain seperti peneliti atau legal drafter.

Disampaikan pula bahwa draft revisi Permendagri sedang dalam proses pematangan, dan ditargetkan pada bulan Juni 2025 sudah dapat diajukan ke Biro Hukum Kemendagri untuk proses harmonisasi regulasi lebih lanjut.

BSKDN berkomitmen untuk terus mengawal proses revisi secara intensif, mengingat peraturan ini menjadi salah satu elemen kunci dalam penguatan tata kelola kebijakan berbasis bukti, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme ASN dalam perumusan kebijakan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.



Pembahasan pelaksanaan Program Review dengan pemanfaatan aplikasi Liqlid dari Liquitous Jepang

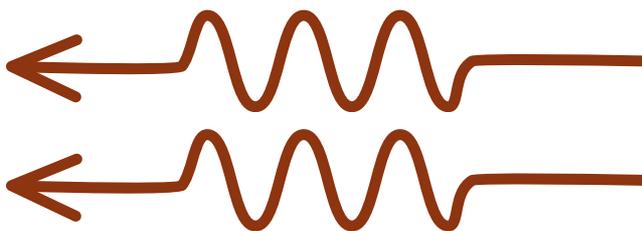
BSKDN terus mendorong inovasi dalam proses perumusan kebijakan publik melalui penguatan partisipasi warga. Bertempat di Ruang Command Center BSKDN, telah dilaksanakan rapat kerja sama strategis yang membahas pemanfaatan platform Liqlid sebagai sarana partisipasi warga secara daring. Rapat dilaksanakan pukul 16.00–17.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kepala BSKDN. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari Liquitous Inc., Yayasan Nusantara Sejati, dan Koso Nippon, serta diikuti secara langsung oleh seluruh Pejabat Fungsional dan Pelaksana BSKDN.

Dalam arahannya, Kepala BSKDN menekankan pentingnya inovasi digital dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Platform Liqlid sendiri adalah sebuah aplikasi daring partisipasi warga yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan warga untuk berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga menyusun kebijakan secara kolaboratif.

Lebih jauh, dijelaskan bahwa aplikasi Liqlid tidak hanya sebagai wadah komunikasi, namun juga memiliki kemampuan untuk menganalisis proses partisipatif, termasuk konten pendapat yang disampaikan warga, tingkat keterlibatan peserta, dan perubahan kesadaran publik selama proses berlangsung.

Melalui kolaborasi ini, BSKDN berharap kerja sama dengan Liquitous dan mitra terkait dapat menjadi model baru transformasi digital dalam tata kelola kebijakan, khususnya dalam rangka menjawab tantangan era pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

BSKDN akan terus mengawal pelaksanaan kerja sama ini, serta memastikan pemanfaatan Liqlid dapat terintegrasi secara strategis ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.



Serba Serbi Mei

Rapat Pembahasan Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempercepat proses transformasi kelembagaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menjadi Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (Ditjen BUMD). Upaya ini ditandai dengan dilaksanakannya rapat pembahasan struktur organisasi Ditjen BUMD yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung H Lantai 12 Kemendagri.

Dalam rapat ini, dilakukan diskusi mendalam mengenai opsi dan skema struktur organisasi yang akan diusulkan untuk Ditjen BUMD. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyusunan kelembagaan baru yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan BUMD secara nasional.

Direncanakan pada minggu keempat bulan Mei 2025, pembahasan lebih lanjut akan dilaksanakan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mendapatkan penyelarasan dan persetujuan formal atas rancangan struktur yang diusulkan.

Biro Ortala menyampaikan bahwa proses transformasi kelembagaan ini telah memiliki timeline resmi yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, dengan target penyelesaian seluruh proses perubahan menjadi Ditjen BUMD pada akhir Juli 2025.

Transformasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan Kemendagri dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas BUMD secara nasional, sehingga diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan publik yang lebih efisien melalui entitas BUMD.



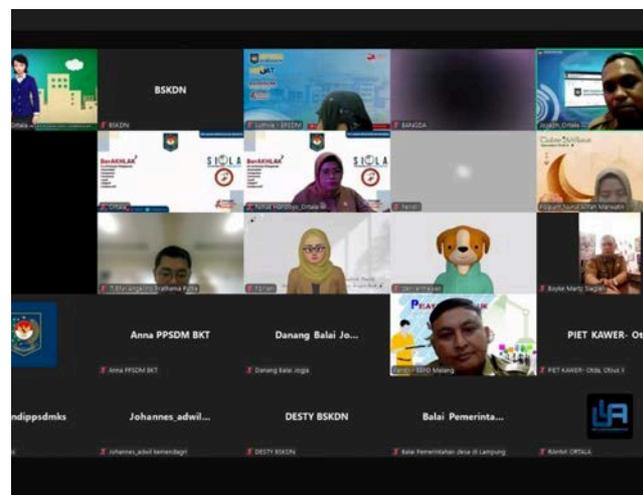
Rapat Pembahasan Terhadap masing-masing aspek PEKPPP

Dalam rangka memperkuat tata kelola pelayanan publik yang profesional dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Selasa, 17 Juni 2025. Rapat berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE-I) di lingkungan Kemendagri yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan melalui layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masing-masing unit kerja memaparkan perkembangan terkini, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang telah dan akan diterapkan untuk memperkuat performa pada masing-masing aspek tersebut. Masing-masing unit kerja memaparkan perkembangan terkini, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang telah dan akan diterapkan untuk memperkuat performa.

Melalui forum ini, diharapkan adanya sinkronisasi kebijakan antar-unit kerja dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas layanan. Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan menjadi sorotan penting sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Dalam Negeri mendorong agar seluruh satuan kerja di lingkungan kementerian, serta pemerintah daerah, menjadikan hasil evaluasi PEKPPP sebagai rujukan utama dalam merumuskan program peningkatan pelayanan publik di masa mendatang.



Serba Serbi Mei

Rapat Konsultasi Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Dalam upaya memastikan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan rapat daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 17 Juni 2025, pukul 13.30 s.d. 16.30 WIB. Rapat ini dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah serta jajaran Kementerian Dalam Negeri.

Fokus utama rapat ini adalah penajaman isu-isu strategis daerah dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang partisipatif, rapat turut menekankan pentingnya pelibatan pemangku kepentingan secara luas. Melalui forum konsultasi publik, masyarakat diundang untuk berperan aktif dalam proses perencanaan agar dokumen RPJMD mencerminkan aspirasi nyata dan kebutuhan riil di lapangan.

Dengan penyusunan RPJMD yang lebih inklusif dan strategis, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

KESELARASAN 45 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN			
4 indikator memiliki angka target berbeda	20 indikator belum memiliki angka target	12. Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan c. Persentase Desa Mandiri
18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Nasional < Daerah)	1. Usia Harapan Hidup a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	24. Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)
42. Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nasional < Daerah)	5. Hasil Pembelajaran c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun d. Harapan Lama Sekolah	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN b. Rasio kewirausahaan daerah	30. Indeks Demokrasi Indonesia
44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Nasional < Daerah)	11. a. Rasio PDB Industri Pengolahan	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	32. Tingkat Inflasi (%)
15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a. Tingkat Pengangguran Terbuka (Nasional < Daerah)	3. Insidensi Tuberkulosis a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
21 indikator belum tercantum	4. Cakupan kesepertaan jaminan kesehatan nasional	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
	5. Hasil Pembelajaran a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15	9. Cakupan kesepertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	40. Indeks Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a. Ketahanan energi • Konsumsi listrik per kapita b. Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan
		10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal a. Jumlah penyandang disabilitas yang m endapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan b. Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/provinsi	41. Indeks Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
		11. Pertumbuhan PDRB Pertanian	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a. Ketahanan Energi • Kapasitas Tampung Air • Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air-Slap Minum Perpipaan
			45. Persentase
		12. Pengembangan Pariwisata b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB d. Return on Asset (ROA) BUMD	
		15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	
		29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	
		31. Rasio Pajak terhadap PDB	
		33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB b. Aset Dana Pensiun/PDRB c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi Total Kredit/PDRB	

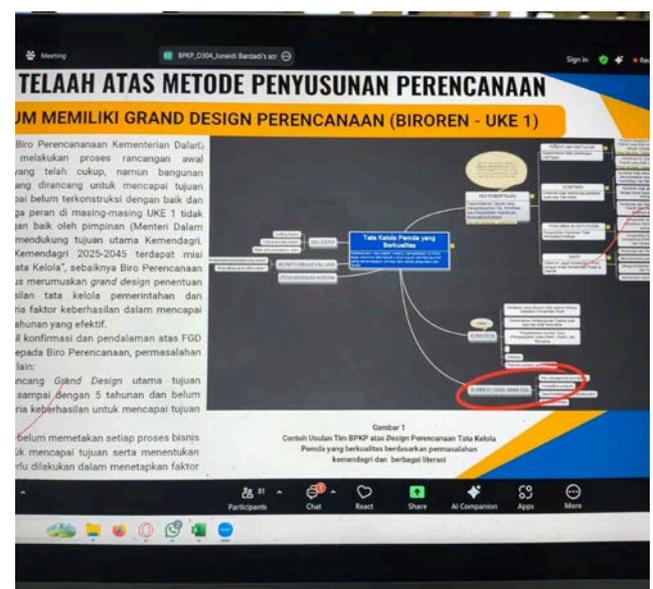
Konsolidasi Hasil Reviu Sementara Tim BPKP atas Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah dilaksanakan rapat pembahasan catatan masukan terhadap Grand Design Dokumen Perencanaan secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat ini dipimpin oleh Biro Perencanaan Kemendagri, dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) di lingkungan Kemendagri.

Dalam rapat tersebut, BPKP menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi teknis terhadap Grand Design Dokumen Perencanaan yang tengah disusun. Salah satu poin utama yang disoroti adalah pentingnya penguatan proses perencanaan yang menyeluruh dan terintegrasi di seluruh unit kerja, agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Menanggapi masukan tersebut, Biro Perencanaan Kemendagri menyatakan komitmennya untuk segera melakukan koordinasi internal lintas UKE I guna menindaklanjuti hasil rapat. Langkah ini akan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui penyesuaian substansi, struktur, serta keselarasan antar program dan kegiatan di setiap unit kerja.

Dengan adanya sinergi antara BPKP dan Kemendagri, proses perencanaan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pengambilan kebijakan publik yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.



Serba Serbi Mei

Rapat Teknis Pembentukan Direktorat Jenderal BUMD

Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Teknis Pembentukan Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (Ditjen BUMD) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi kelembagaan guna memperkuat tata kelola BUMD yang lebih terarah, terukur, dan strategis. Rapat berlangsung pada pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB di Ruang Sidang Utama, Gedung A Kemendagri, dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri.

Rapat ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan lintas unit kerja, antara lain Asisten Deputi dari KemenPAN-RB, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah, serta perwakilan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Keuangan Daerah, Biro Hukum, Biro Kepegawaian, dan Biro Perencanaan.

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pembahasan reposisi kelembagaan BSKDN dalam rangka pembentukan Ditjen BUMD. Dalam reposisi ini, sejumlah fungsi BSKDN akan dialihkan ke Unit Kerja Eselon I (UKE I) lainnya, antara lain:

- Fungsi strategi kebijakan akan dilanjutkan oleh Biro Perencanaan;
- Fungsi inovasi kementerian akan diintegrasikan ke dalam Biro Ortala dan unit sekretariat Ditjen melalui Tim Kerja dan Jabatan Fungsional (JF);
- Fungsi pengembangan dan pembinaan inovasi pemerintahan daerah akan dipindahkan ke Ditjen Otonomi Daerah;
- Fungsi inovasi pemerintahan desa akan dialihkan ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa.



Seiring dengan perubahan kelembagaan tersebut, rapat juga membahas pentingnya melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 yang mengatur organisasi dan tata kerja Kemendagri. Perubahan ini diperlukan karena akan terdapat penghapusan Unit Kerja Eselon I BSKDN dan penambahan struktur Ditjen Bina BUMD. Sebagai langkah awal, Kemendagri akan menyusun naskah urgensi pembentukan Ditjen BUMD sebagai bahan pertimbangan resmi dalam proses harmonisasi di tingkat nasional.

Selain itu, disepakati pula perlunya revisi terhadap Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, guna menyesuaikan struktur dan fungsi baru yang akan dibentuk pasca reposisi kelembagaan.

Dalam rapat juga ditekankan pentingnya memastikan bahwa rancangan kewenangan dan tugas Ditjen BUMD tidak terjadi tumpang tindih (crosscutting) dengan fungsi-fungsi yang telah melekat pada unit lain di Kemendagri maupun Kementerian/Lembaga eksternal. Hal ini menjadi kunci agar Ditjen BUMD nantinya dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan berdaya guna dalam mengembangkan BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah.

Kemendagri menargetkan seluruh proses penataan kelembagaan ini dapat diselesaikan secara bertahap dan selaras dengan timeline yang telah disetujui oleh Bapak Sekjen Kemendagri, yakni penyelesaian pada akhir Juli 2025.



Serba Serbi Mei

Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Kerjasama bersama antara BSKDN dan Yachiyo Engineering

BSKDN terus memperluas kerja sama internasional dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis evidence. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui pembahasan tindak lanjut kerja sama dengan Yachiyo Engineering Co., Ltd., sebuah institusi rekayasa pembangunan dari Jepang.

Rapat pembahasan kerja sama tersebut dilaksanakan pada pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Pusat 2, dan dihadiri oleh perwakilan dari BSKDN, Yachiyo Engineering, dan unit terkait lainnya.

Sebagai hasil pembahasan, disepakati bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah penyusunan draft MoU antara BSKDN dan Yachiyo, yang akan melibatkan Pusat Fasilitas Kerja Sama (Fasker) Kemendagri. Selain itu, BSKDN dan Yachiyo akan menyusun Rencana Program Kerja yang mencakup kegiatan sosialisasi, forum diskusi di lokasi terpilih, peningkatan kapasitas SDM, serta kegiatan monitoring dan evaluasi.

Tak hanya itu, turut dibahas pula penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang nantinya akan diajukan ke pemerintah Jepang melalui mekanisme dukungan anggaran dari Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF). Batas waktu pengajuan proposal ditetapkan sebelum dimulainya tahun anggaran baru pemerintah Jepang, dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti secara cepat dan komprehensif.

Di tengah rencana perubahan kelembagaan BSKDN menjadi Direktorat Jenderal BUMD, BSKDN memastikan bahwa transisi kelembagaan ini tidak akan mengganggu kesinambungan kerja sama yang sedang dijangkau. Sebaliknya, kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan baru, dengan tetap fokus pada keberlanjutan program dan pemanfaatan hasil kerja sama untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. BSKDN juga mendorong Yachiyo untuk menyusun strategi koordinasi lintas kementerian di Jepang guna mendapatkan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pihak pemerintah Jepang secara resmi.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola regulasi dan mendukung upaya reformasi hukum secara nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 pada pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Gedung C, Kemendagri. Rapat ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemendagri yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan evaluasi regulasi.

alam paparannya, disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi IRH tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri memperoleh nilai 87,08 dengan predikat A, yang mencerminkan kinerja positif dalam pelaksanaan reformasi hukum.



Sebagai strategi pencapaian target penilaian IRH tahun ini, Kemendagri mendorong kolaborasi lebih intensif dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selain itu, penguatan sosialisasi kepada unit kerja serta pendampingan teknis dalam proses unggah data dan reviu regulasi akan menjadi prioritas untuk menjamin kesesuaian dengan indikator penilaian nasional.

Rapat ini juga menjadi wadah penting untuk menyatukan pemahaman dan langkah antar unit kerja, sehingga seluruh proses reformasi hukum dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, capaian prestasi Kemendagri dalam IRH dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola hukum yang baik.

Serba Serbi Mei

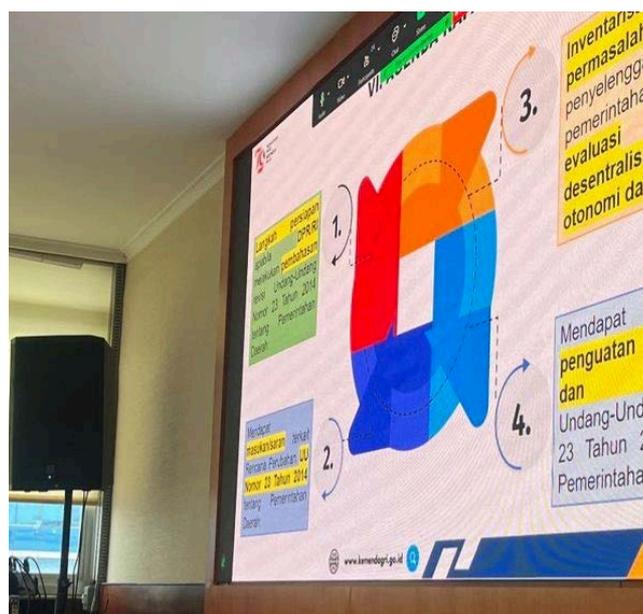
Rapat Penyamaan Persepsi terkait Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan nasional dan dinamika tata kelola pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Rapat Pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Ruang Ditjen Otda Lantai 8, Gedung F, Kemendagri. Rapat dipimpin oleh Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah serta perwakilan dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE-1) di lingkungan Kemendagri.

alam pembahasan rapat, ditegaskan bahwa perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 merupakan hal yang niscaya untuk mengikuti perkembangan kebijakan nasional dan perubahan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis. Reformulasi regulasi ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, memperjelas pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut, masukan dari masing-masing UKE-1 akan dikompilasi dan dikaji lebih lanjut oleh tim perumus. Harapannya, proses revisi UU Pemerintahan Daerah ini dapat diselesaikan secara bertahap dan disinergikan dengan revisi kebijakan nasional lainnya.

Melalui forum ini, Kemendagri berkomitmen untuk mendorong adanya penataan ulang kewenangan dan struktur pemerintahan daerah yang lebih efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh Indonesia.



Rapat Penyerapan Anggaran di Triwulan II serta tertib pengelolaan BMN dan SDMO dilingkungan BSKDN

Mendorong percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi penyerapan anggaran di Triwulan II Tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan rapat koordinasi internal pada Selasa, 17 Juni 2025 bertempat di Ruang Video Conference BSKDN, mulai pukul 09.30 hingga 12.00 WIB. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris BSKDN dan dihadiri oleh seluruh Kepala Pusat dan Kepala Bagian atau yang mewakili di lingkungan BSKDN.

Rapat difokuskan pada percepatan pelaksanaan program/kegiatan, penyerapan anggaran Triwulan II, serta penertiban pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Sumber Daya Manusia Organisasi (SDMO). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa hasil pembahasan penting dalam rapat ini antara lain:

- Proses buka blokir anggaran (002) dan usulan kegiatan yang masih dalam status blokir menjadi perhatian utama untuk segera ditindaklanjuti.
- Pembahasan terkait tunjangan kinerja 100% yang masih terganjal pada aspek blokir anggaran turut menjadi fokus pembahasan strategis.
- Diskusi tentang struktur organisasi baru terkait transformasi BSKDN menjadi Direktorat Jenderal BUMD, termasuk pemetaan ulang fungsi-fungsi kelembagaan.
- Penegasan kembali mengenai wajib apel pagi secara luring setiap hari Senin di minggu pertama setiap bulan, serta pelaksanaan senam pagi bersama setiap hari Jumat sebagai bentuk penguatan disiplin dan kesehatan pegawai.



Serba Serbi Mei

Rapat Progress awal Kajian Kegiatan Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi

Untuk mendorong pengembangan inovasi daerah yang berorientasi pada kebutuhan kawasan metropolitan, Pusat Strategi Kebijakan IV, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada Kamis, 22 Mei 2025 bertempat di Ruang Rapat Video Conference BSKDN. Rapat dipimpin oleh Sekretaris BSKDN mewakili Kepala Pusat IV, dan dihadiri oleh para pejabat fungsional, Kasubag TU, serta staf teknis di lingkungan Pusat IV.

Kajian dilakukan oleh Tenaga Ahli Universitas Indonesia, dengan metode berbasis pendekatan kebutuhan lokal, letak geografis, dan kekuatan aparatur daerah (SDM). Komponen analisis mencakup:

- Analisis geografis dan demografis
- Komparasi kebutuhan dan kondisi antar wilayah
- Penyusunan short list inovasi
- Analisis penerapan inovasi tematik
- Perumusan rencana aksi dan alternatif kebijakan
- Penyusunan draft rekomendasi kebijakan

Dalam kesempatan ini juga dikonfirmasi hal-hal penting seperti:

- Kesepakatan atas metode dan timeline kegiatan
- Sinkronisasi definisi dan nomenklatur data
- Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kontrak kerja antara UI dan Kemendagri

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran kegiatan, Bagian Perencanaan BSKDN turut andil dalam memfasilitasi penyusunan PKS antara BSKDN dan Universitas Indonesia.





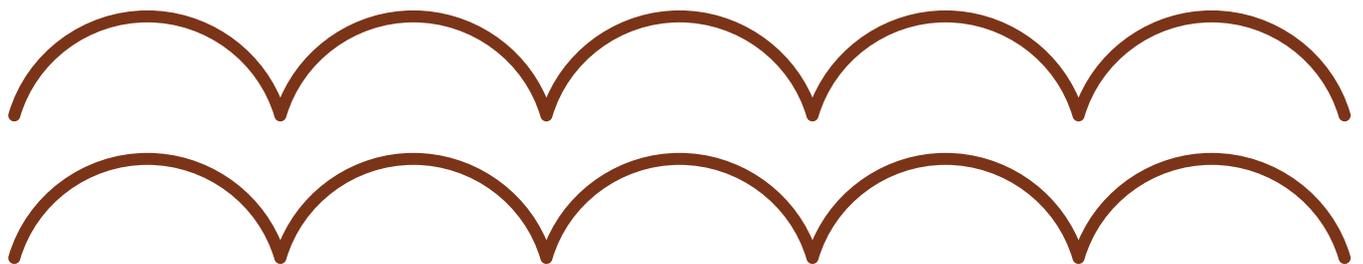
Rapat Konsultasi Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar Rapat Konsultasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 pada hari ini, Selasa, pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta komponen teknis terkait.

Dalam rapat ini ditegaskan bahwa RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Dokumen ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kesinambungan terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti RPD, RPJPD, dan RPJPN.

Disampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan daerah mengalami tren peningkatan, menunjukkan arah kebijakan yang positif. Namun, beberapa program prioritas belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama dampak pandemi COVID-19 serta keterbatasan fiskal yang menghambat pelaksanaan program strategis di masa sebelumnya.

Dalam arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk mengarahkan prioritas pada pembangunan manusia, transformasi ekonomi daerah, dan penguatan infrastruktur. Kebijakan ini diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), agar mampu berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan nasional.



Serba Serbi Mei

Sosialisasi Hak & Jaminan Sosial bagi ASN serta Potensi Usaha Pasca Purna Tugas

Kegiatan ini berlangsung pada pukul 10.00 hingga 12.30 WIB di Aula BSKDN, dan dipimpin oleh Sekretaris BSKDN bersama Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO).

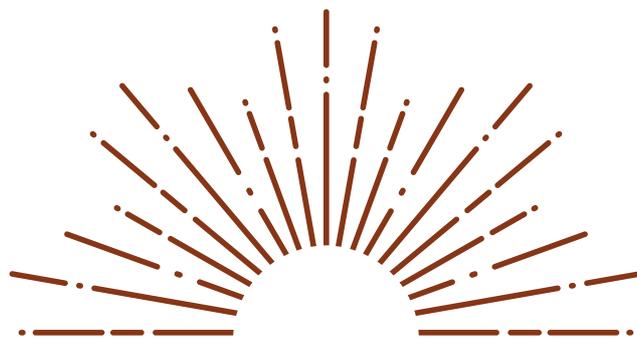
Dalam kegiatan ini dipaparkan Program Unggulan Mantap Indonesia, yang terdiri dari tiga pilar utama:

1. Mantap Sehat: Meliputi kegiatan senam sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, seminar kesehatan, layanan klinik, hingga operasi katarak gratis bagi pensiunan.
2. Mantap Aktif: Menyediakan ruang aktualisasi bagi pensiunan melalui kajian keagamaan, buka puasa bersama, kegiatan sosial, dan komunitas persaudaraan.
3. Mantap Sejahtera: Memberikan pelatihan kewirausahaan, pembentukan cooking club, penguatan komunitas UMKM pensiunan, serta pelaksanaan program “Warung Mantap”, “Agen Kurir Mantap”, dan “Toko Frozen Mantap”.

Dalam sesi berikutnya, narasumber menjelaskan mengenai berbagai jaminan sosial yang melekat bagi ASN:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Memberikan santunan atas kecelakaan kerja, cacat tetap, dan kematian.
- Jaminan Kematian (JKM): Meliputi santunan duka cita, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak.
- Tabungan Hari Tua (THT): Pembayaran manfaat pensiun, kematian, dan ketika ASN berhenti dari jabatannya.

Melalui sosialisasi ini, BSKDN menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesejahteraan ASN, tidak hanya selama masa aktif, tetapi juga saat memasuki masa purna tugas. Sekretaris BSKDN berharap bahwa ASN dapat memanfaatkan berbagai program jaminan sosial dan peluang wirausaha yang tersedia untuk tetap produktif dan sejahtera di masa pensiun.



Rapat Finalisasi SOP penyelenggaraan SDPDN dan pembahasan petunjuk teknis pelaksanaan SDPDN

Rapat Finalisasi SOP Penyelenggaraan SDPDN dan Pembahasan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SDPDN pada hari ini, Selasa (mulai pukul 08.30 hingga 11.30 WIB). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Unit Kerja Eselon I (UKE I) Kemendagri serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam rapat ini, dibahas finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), yang menjadi bagian dari komitmen Kemendagri dalam mendorong tata kelola data yang berkualitas, akurat, dan terpadu di seluruh tingkatan pemerintahan.

Cakupan data dalam SDPDN tidak hanya terbatas pada data internal di lingkungan Kemendagri, tetapi juga mencakup seluruh data dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemahaman dan kesepahaman antar unit kerja terkait substansi dan implementasi petunjuk teknis menjadi aspek krusial dalam penerapan SDPDN.

Rapat juga menyoroti pentingnya pembentukan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, sebagai wadah koordinasi lintas unit dan instansi. Forum ini akan berfungsi menetapkan daftar data prioritas serta menyusun rencana aksi tahunan dalam pengelolaan data yang terpadu dan berkelanjutan.

Finalisasi SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan ini menjadi tonggak penting dalam mendukung program reformasi birokrasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data. Diharapkan, SDPDN dapat menjadi landasan utama dalam mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), yang pada akhirnya mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh lingkup pemerintahan dalam negeri.



Serba Serbi Mei

Rapat Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi Utara TA. 2025-2029

Rapat Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 pada Selasa, pukul 13.30 hingga 17.00 WIB. Rapat ini merupakan bagian dari proses fasilitasi pemerintah pusat dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

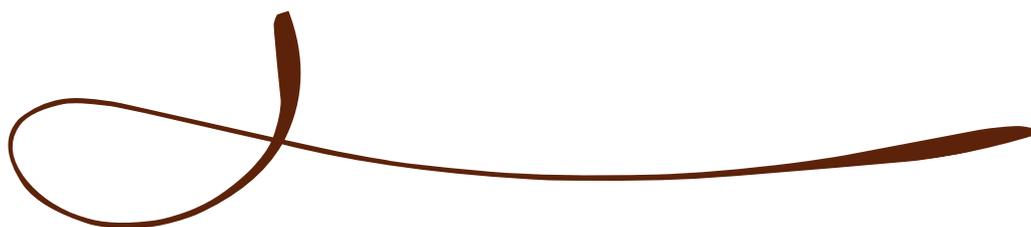
Dalam rapat tersebut, perhatian diarahkan pada strategi pembangunan berbasis klaster wilayah, yakni Minahasa Raya, Bolaang Mongondow Raya, dan Kepulauan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi lokal dan menjawab tantangan pembangunan yang berbeda-beda di tiap kawasan.

Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi Utara juga dikaitkan langsung dengan 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas Nasional, serta dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah daerah didorong menyusun program unggulan yang mampu menangani isu strategis seperti ketimpangan antarwilayah, kemiskinan, daya saing daerah, ketahanan pangan dan air, serta perubahan iklim.

Seluruh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara diminta menjadikan Ranwal RPJMD ini sebagai dasar dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, dengan penyesuaian indikator dan sasaran strategis yang konsisten dan selaras.

Penyusunan RPJMD yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta ketersediaan data yang akurat. Dalam forum ini ditegaskan pula bahwa keberhasilan dokumen RPJMD bukan hanya diukur dari selesainya penyusunan, tetapi juga dari seberapa jauh dokumen tersebut mampu menjadi alat kendali pembangunan yang terukur dan inklusif.

Rapat ini menjadi bagian krusial dalam siklus perencanaan daerah, sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.





Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 pada Selasa, pukul 09.00 hingga 11.30 WIB Rapat ini dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan diikuti oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam paparannya, Kemendagri menyampaikan bahwa penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan terkini. Perubahan ini sekaligus menyesuaikan arah kebijakan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025–2030, mempertimbangkan evaluasi capaian pembangunan Triwulan I, perkembangan sosial ekonomi, serta kondisi kemampuan fiskal daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD hingga Triwulan I menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan masih memiliki tingkat realisasi keuangan dan fisik yang rendah. Hal ini menjadi sorotan utama dalam rapat dan mendorong perlunya akselerasi pelaksanaan program serta peningkatan kualitas pelaporan oleh setiap perangkat daerah.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan bahwa evaluasi triwulan berikutnya akan menjadi indikator utama dalam mengukur efektivitas SKPD dalam mencapai target pembangunan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan untuk segera melakukan penyesuaian program dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Kemendagri juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, akurasi data, serta tata kelola pemerintahan yang responsif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif dan berdaya saing.



Serba Serbi Mei

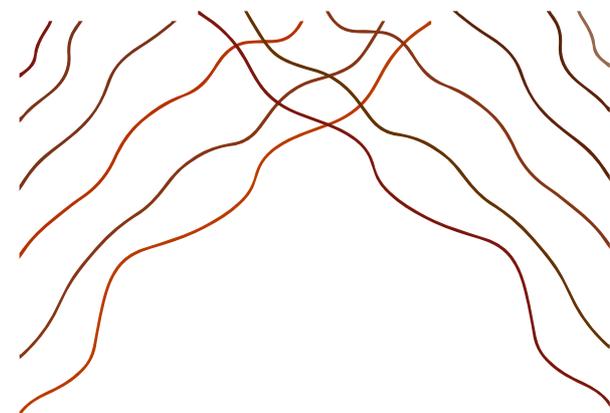
Review APIP Usulan Buka Blokir 002 operasional

BSKDN melaksanakan rapat pembahasan atas hasil review Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan relaksasi pagu blokir Belanja Operasional (002). Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti sejumlah catatan strategis yang diberikan oleh Itjen terkait substansi usulan yang diajukan.

- Itjen meminta agar seluruh detail kegiatan yang masih berbentuk paket agar dirinci lebih lanjut dan dilengkapi dengan data dukung yang memadai, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengajuan anggaran.
- Terdapat permintaan revisi terhadap rencana penggantian suku cadang AC split yang tercantum dalam akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut, BSKDN akan segera melakukan perbaikan sesuai dengan catatan hasil review Itjen dan menyampaikan perbaikan tersebut secara resmi kepada tim review yang bersangkutan. Perbaikan ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses relaksasi blokir anggaran serta menjamin kesesuaian program dengan ketentuan regulasi teknis.

BSKDN berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional di bidang kebijakan dalam negeri.



Rapat Peningkatan SDM Bidang IT di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

SDM yang kompeten memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Kompetensi SDM sangat menentukan dalam melakukan analisis data secara akurat, mengidentifikasi solusi komprehensif, serta mengevaluasi risiko secara tepat, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi organisasi.

Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya keterkaitan antara kebijakan dan pengembangan kapasitas SDM. Kebijakan yang mendukung penguatan SDM akan menciptakan siklus positif: SDM yang berkualitas mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik, dan kebijakan yang tepat akan semakin mempercepat peningkatan kualitas SDM di sektor pemerintahan.

KomDigi turut menggandeng berbagai mitra industri global dalam menyelenggarakan pelatihan teknologi terkini, khususnya kecerdasan artifisial (AI). Mitra tersebut antara lain Microsoft (DTS Elev Alte), Google, AWS, Huawei, Alibaba Cloud, Cisco, dan lainnya. Program ini menargetkan pelatihan bagi 100.000 talenta

Sebagai bagian dari upaya penguatan transformasi digital internal, Bagian Perencanaan BSKDN menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program peningkatan SDM di bidang IT. Langkah ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan untuk meningkatkan daya saing dan efektivitas kinerja organisasi, sejalan dengan kebijakan nasional pengembangan talenta digital.



Serba Serbi Mei

Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Rapat fasilitasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan riil di lapangan.

Perubahan RKPD Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap dinamika kebijakan nasional serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga Triwulan II tahun berjalan. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian asumsi awal, baik dari sisi pendanaan, penetapan prioritas, maupun capaian kinerja. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan daerah, seperti sektor perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan industri pengolahan. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan dasar, reformasi birokrasi, serta penanganan inflasi dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan.

Dalam dokumen perubahan RKPD yang dibahas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, antara lain:

- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan;
- Pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antarwilayah, sebagai fondasi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi;
- Peningkatan daya saing sektor strategis daerah, untuk membuka peluang investasi dan lapangan kerja;
- Penguatan ketahanan pangan dan energi, sebagai upaya memastikan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan.

Dengan komitmen bersama, diharapkan perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempercepat pencapaian target pembangunan jangka menengah, sekaligus menjawab tantangan-tantangan strategis di tingkat daerah dan nasional.



Rapat Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA.2026 dan dalam rangka konsolidasi penetapan Pagu Indikatif Kemendagri

Dalam rapat pembahasan pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026, disampaikan bahwa total Pagu Indikatif Kemendagri TA 2026 sebesar Rp3.244.174.658.000, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.548.153.860.000 dibandingkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025 yang mencapai Rp4.792.328.518.000.

Penurunan ini sebagian besar berasal dari pengurangan pagu Rupiah Murni yang sebelumnya digunakan untuk mendanai sejumlah program prioritas nasional di lingkungan Kemendagri. Meski demikian, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) tetap berkomitmen menyusun usulan pagu anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat disepakati bahwa penyusunan pagu usulan BSKDN akan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada prioritas strategis nasional, efektivitas program, serta keselarasan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun berjalan. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan program dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan, turut disampaikan rencana perubahan struktur organisasi di lingkungan Kemendagri, khususnya terkait unit yang menangani substansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nantinya, pengelolaan substansi BUMD akan dialihkan dari BSKDN ke Direktorat Jenderal BUMD yang sedang dalam proses pembentukan.

Selama masa transisi kelembagaan, BSKDN akan tetap menjalankan fungsi sementara, dengan fokus pada pengumpulan data, penyusunan justifikasi program, dan kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses pengusulan pagu. Koordinasi akan dilakukan secara intensif dengan Sekretariat Jenderal sebagai unit yang akan mengampu substansi tersebut ke depannya.

Dengan pendekatan yang adaptif dan terukur, BSKDN berkomitmen mendukung penuh kebijakan Kemendagri dalam menjawab tantangan efisiensi fiskal sekaligus memastikan terselenggaranya program-program prioritas yang berdampak langsung.

Serba Serbi Mei

Rapat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, dan mengoptimalkan sistem perencanaan dan penganggaran

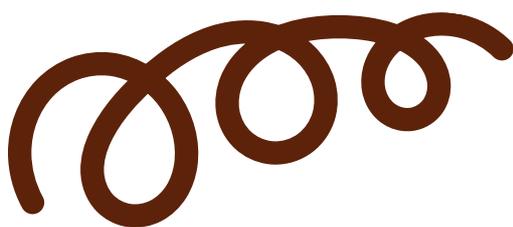
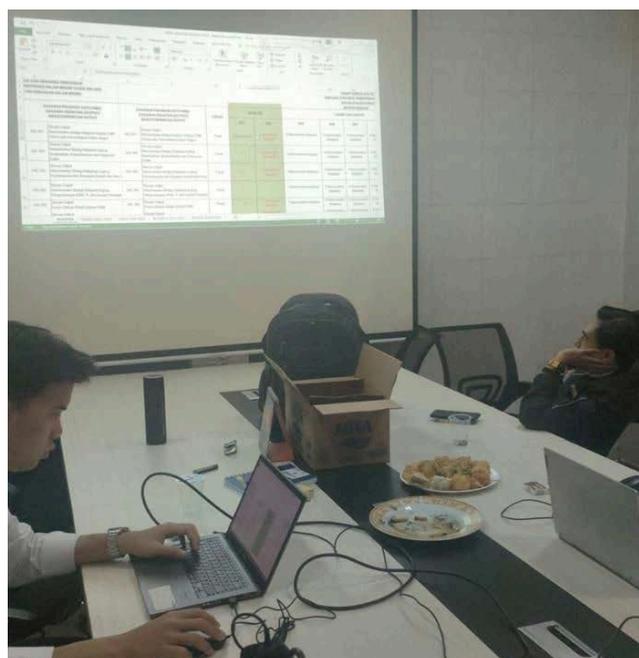
Dalam rangka memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi yang membahas strategi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta upaya optimalisasi sistem yang mendukung proses tersebut agar lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional.

Ditekankan pula pentingnya penguatan koordinasi antar unit kerja, khususnya antara perencanaan dan keuangan, agar seluruh proses berjalan selaras dan menghindari duplikasi serta kesenjangan dalam penetapan program dan alokasi anggaran.

Dalam forum tersebut, Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendagri menyepakati perlunya sinkronisasi terhadap data dan dokumen perencanaan yang diinput melalui berbagai aplikasi pendukung. Langkah ini bertujuan agar data yang digunakan dalam proses evaluasi dan penganggaran memiliki akurasi, kesesuaian, dan keterpaduan.

Menanggapi arah kebijakan tersebut, Bagian Perencanaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan mengikuti perkembangan sistem, sekaligus berpartisipasi aktif dalam proses integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, baik di tingkat internal maupun lintas unit.

Dengan koordinasi yang kuat, penggunaan teknologi yang tepat, serta komitmen seluruh unit kerja, diharapkan sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kemendagri dapat semakin adaptif terhadap perubahan dan akuntabel dalam pelaksanaannya.



Rapat Finalisasi Penyusunan Draft Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti proses penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antar kedua instansi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendukung kebijakan nasional di bidang energi, sumber daya mineral, dan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan dan adaptif.

Pasal-pasal utama yang menjadi pembahasan meliputi tujuan kesepakatan, pelaksanaan kegiatan, pertukaran data dan informasi, serta pembentukan tim koordinasi bersama yang akan bertugas mengawal pelaksanaan MoU secara terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, ketentuan penutup dan pengaturan batas kewenangan antar pihak turut menjadi perhatian untuk memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab.

Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati beberapa perubahan redaksional pada draft MoU, guna mempertegas dan memperjelas batasan kewenangan masing-masing pihak serta mekanisme koordinasi yang akan dijalankan.

Melalui nota kesepahaman ini, diharapkan sinergi antara Kemendagri dan Kementerian ESDM dapat menciptakan kerangka kerja kolaboratif yang mendukung kebijakan energi nasional, memperkuat ketahanan energi daerah, serta mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan energi yang efisien, inklusif, dan berwawasan lingkungan.



Serba Serbi Mei

Rapat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, dan mengoptimalkan sistem perencanaan dan penganggaran

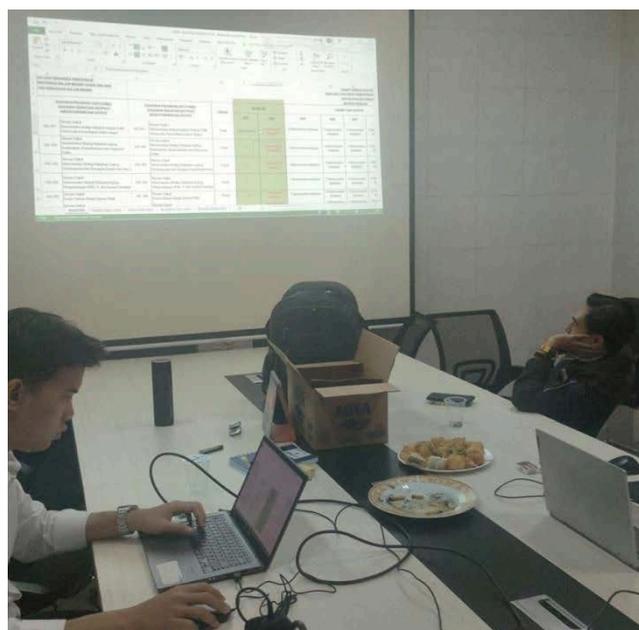
Dalam rangka memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi yang membahas strategi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta upaya optimalisasi sistem yang mendukung proses tersebut agar lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional.

Ditekankan pula pentingnya penguatan koordinasi antar unit kerja, khususnya antara perencanaan dan keuangan, agar seluruh proses berjalan selaras dan menghindari duplikasi serta kesenjangan dalam penetapan program dan alokasi anggaran.

Dalam forum tersebut, Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendagri menyepakati perlunya sinkronisasi terhadap data dan dokumen perencanaan yang diinput melalui berbagai aplikasi pendukung. Langkah ini bertujuan agar data yang digunakan dalam proses evaluasi dan penganggaran memiliki akurasi, kesesuaian, dan keterpaduan.

Menanggapi arah kebijakan tersebut, Bagian Perencanaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan mengikuti perkembangan sistem, sekaligus berpartisipasi aktif dalam proses integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, baik di tingkat internal maupun lintas unit.

Dengan koordinasi yang kuat, penggunaan teknologi yang tepat, serta komitmen seluruh unit kerja, diharapkan sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kemendagri dapat semakin adaptif terhadap perubahan dan akuntabel dalam pelaksanaannya.



Rapat Finalisasi Penyusunan Draft Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti proses penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antar kedua instansi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendukung kebijakan nasional di bidang energi, sumber daya mineral, dan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan dan adaptif.

Pasal-pasal utama yang menjadi pembahasan meliputi tujuan kesepakatan, pelaksanaan kegiatan, pertukaran data dan informasi, serta pembentukan tim koordinasi bersama yang akan bertugas mengawal pelaksanaan MoU secara terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, ketentuan penutup dan pengaturan batas kewenangan antar pihak turut menjadi perhatian untuk memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab.

Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati beberapa perubahan redaksional pada draft MoU, guna mempertegas dan memperjelas batasan kewenangan masing-masing pihak serta mekanisme koordinasi yang akan dijalankan.

Melalui nota kesepahaman ini, diharapkan sinergi antara Kemendagri dan Kementerian ESDM dapat menciptakan kerangka kerja kolaboratif yang mendukung kebijakan energi nasional, memperkuat ketahanan energi daerah, serta mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan energi yang efisien, inklusif, dan berwawasan lingkungan.

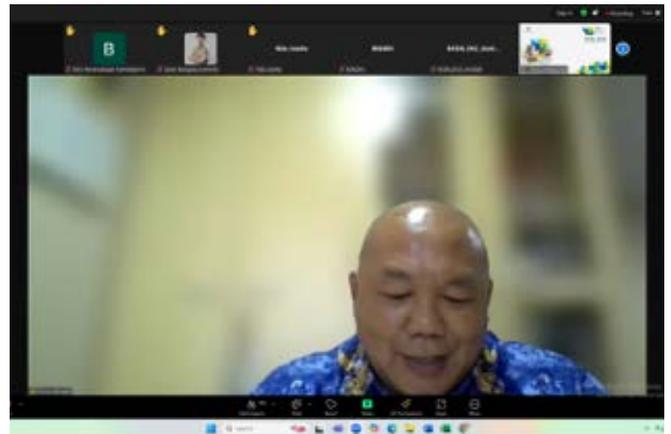


Serba Serbi Juni

Mengawal Masa Depan Sulawesi Tengah: Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025–2029

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sebagai panduan strategis pembangunan lima tahun ke depan. Dalam proses konsultasi terhadap rancangan awal (Ranwal), pemerintah daerah menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal, penguatan wilayah tertinggal, dan perlindungan kelompok rentan. Selain itu, inovasi berbasis teknologi turut didorong sebagai bagian dari transformasi pembangunan menuju efisiensi dan keberlanjutan.

Arah kebijakan pembangunan disusun secara tematik, holistik, integratif, dan spasial guna memastikan bahwa setiap intervensi pemerintah mampu menjangkau berbagai sektor secara sinergis serta merespons kebutuhan spesifik tiap wilayah. Dalam kerangka tersebut, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029 menetapkan sejumlah program prioritas yang diyakini memiliki dampak langsung terhadap pencapaian misi pembangunan daerah.



Program-program tersebut meliputi peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih; penguatan sektor pertanian dan industri pengolahan; pembangunan infrastruktur wilayah; pengurangan risiko bencana; serta reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai isu strategis seperti ketimpangan antarwilayah, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta kerentanan terhadap bencana alam. Untuk itu, RPJMD dirancang agar mampu merespons persoalan-persoalan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan, dengan visi besar menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di masa depan.

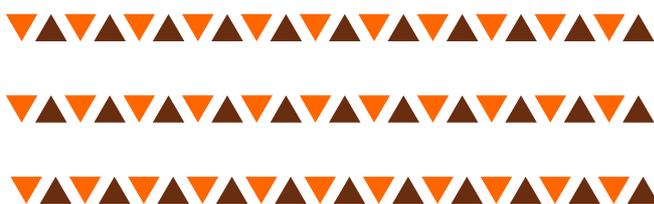
Memastikan Akselerasi Pembangunan Melalui Penyesuaian Rencana Fasilitas Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025

Guna memastikan arah pembangunan tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang berkembang, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan rapat fasilitasi untuk membahas finalisasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional serta tindak lanjut atas capaian dan evaluasi RKPD sebelumnya.

Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif, belum optimalnya sektor pertanian dan perikanan, serta terbatasnya ekspor non-migas. Ketimpangan akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah selatan, juga menjadi perhatian penting. Selain itu, isu strategis seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan wilayah antara Banten Utara dan Selatan, lemahnya daya saing, serta kurang berkembangnya industri kreatif membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi.

perubahan RKPD mencakup penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan evaluasi Renja PD dan capaian kinerja. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur konektivitas, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Penajaman prioritas dilakukan secara tematik, integratif, dan spasial untuk memastikan efektivitas pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Banten.

Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Banten berharap dapat menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan berdampak nyata, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.



Serba Serbi Juni

Menjaga Sinergi dan Efisiensi dalam Perencanaan Anggaran: Kick Off Trilateral Meeting Pagu Indikatif Kemendagri Tahun Anggaran 2026

Dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan teknokratik Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Renstra Kemendagri) 2025–2029 dengan alokasi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026, Kemendagri menggelar Kick Off Trilateral Meeting sebagai langkah awal konsolidasi perencanaan dan penganggaran. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi antarunit kerja, sekaligus merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi kementerian di tengah dinamika nasional.

Per 28 Mei 2025, realisasi anggaran Kemendagri tercatat sebesar 22,29% dari total pagu awal Rp 4,79 triliun, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 25,45%. Namun, jika dihitung dari pagu efektif setelah efisiensi menjadi Rp 2,62 triliun, capaian realisasi mencapai 40,80%, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Beberapa unit kerja strategis seperti Ditjen Bangda, Adwil, dan Dukcapil tetap memerlukan perhatian karena menunjukkan tingkat serapan anggaran yang masih rendah.



Pagu Indikatif Kemendagri Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding alokasi tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi pada belanja non-operasional, khususnya yang bersumber dari Rupiah Murni. Dari total pagu tersebut, Rp 1,403 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, sementara Rp 1,841 triliun untuk belanja non-operasional, termasuk pembiayaan melalui pinjaman dan hibah luar negeri.

Kemendagri mendapat mandat mendukung program prioritas nasional seperti pengendalian inflasi, makan bergizi gratis, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan sinergi pusat-daerah tetap terjaga.

Rapat Keberlanjutan Pelaksanaan Kerja Sama BSKDN dengan SKALA

Dalam rangka memastikan kesinambungan program kolaboratif antara BSKDN dan Program SKALA, telah dilaksanakan rapat keberlanjutan kerja sama yang bertempat di Ruang Command Center dan dipimpin langsung oleh Kepala BSKDN. Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Badan, Tim SKALA, Analis Kebijakan Pusat 4, serta perwakilan dari Bagian SDMO dan Bagian Perencanaan.

Pembahasan berfokus pada evaluasi kegiatan yang telah dijalankan dalam AWP 2024–2025 serta penyusunan rencana aksi untuk AWP 2025–2026. Beberapa capaian utama yang telah direalisasikan mencakup penguatan perencanaan daerah untuk layanan dasar yang inklusif, peningkatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan, revisi Permendagri Nomor 17 tentang pedoman litbang, serta penguatan kapasitas pemimpin daerah dalam penerapan SPM dan efisiensi belanja daerah.

Sehubungan dengan rencana perubahan nomenklatur BSKDN menjadi Direktorat Jenderal BUMD, disampaikan harapan agar kerja sama strategis dengan SKALA tetap-

berlanjut, mengingat fokus pada layanan dasar tetap relevan dengan agenda penguatan BUMD di tingkat daerah. Sebagai bagian dari tindak lanjut, SKALA diharapkan segera menyusun dan mengkonsolidasikan program kerja untuk mendukung lembaga BUMD yang akan dibentuk. Sementara itu, BSKDN menilai bahwa kolaborasi ini telah memberikan kontribusi signifikan dan memiliki nilai strategis untuk diteruskan.

Sebagai komitmen konkret, Bagian Perencanaan menyatakan kesiapan untuk terus mengawal pelaksanaan kerja sama ini agar tetap sejalan dengan tugas dan fungsi kelembagaan yang akan datang.



Serba Serbi Juni

Penguatan Perencanaan Internal: Rapat Coaching Clinic Lingkup BSKDN

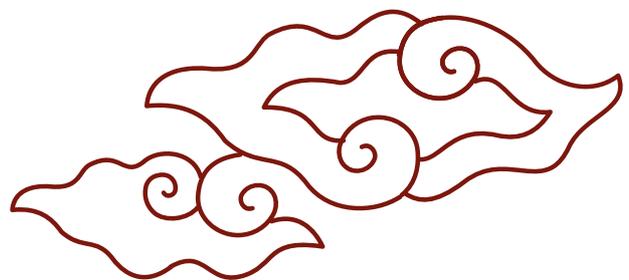
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran internal, BSKDN menyelenggarakan Rapat Coaching Clinic yang difokuskan pada penyesuaian kegiatan di masing-masing pusat (Pusat 1–3). Hasil pembahasan menghasilkan sejumlah revisi terkait anggaran, output, dan nomenklatur kegiatan. Penyesuaian ini bertujuan untuk menelaraskan rencana kerja dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing unit, serta memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Revisi kegiatan tersebut juga diarahkan agar selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru mengenai pagu anggaran, sekaligus mendukung pelaksanaan program-program nasional yang menjadi bagian dari mandat Kementerian Dalam Negeri. Dengan pendekatan ini, diharapkan rencana kerja BSKDN menjadi lebih adaptif, terarah, dan akuntabel.

Sebagai langkah tindak lanjut, seluruh unit diminta segera menyesuaikan dokumen perencanaan masing-masing dan memperkuat koordinasi lintas unit untuk memastikan implementasi kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan.



Di samping itu, pelaksanaan coaching clinic ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat kapasitas perencana di lingkungan BSKDN, sekaligus membangun pemahaman yang seragam dalam menyusun kegiatan yang efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional.



Penajaman Arah Pembangunan Jawa Timur Tahun 2025: Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan upaya strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan dinamika aktual dan hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini disiapkan sebagai tindak lanjut dari perkembangan indikator makro, capaian kinerja Triwulan I, serta penyesuaian terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal tahun berjalan. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), diketahui bahwa capaian masih beragam, dengan sejumlah target yang belum tercapai secara optimal.

Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dilakukan dengan mengacu pada arah RPJMD serta memperhatikan dinamika fiskal daerah, agar program-program yang direncanakan tetap relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses evaluasi antara lain keterbatasan data pembangunan, ketidaksesuaian petunjuk teknis dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa.

Fasilitasi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas dokumen perubahan RKPD sebagai pedoman kredibel dalam penyusunan Perubahan APBD 2025, serta mendorong pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan segera menyesuaikan dokumen perencanaan perangkat daerah agar selaras dengan hasil fasilitasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan di sisa tahun anggaran berjalan.



Serba Serbi Juni

Penajaman Regulasi dalam Rangka Penyusunan Renstra Kemendagri 2025–2029: Pembahasan Kerangka Regulasi Lingkup Unit Kerja Eselon I

Pembahasan kerangka regulasi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029 merupakan salah satu upaya untuk menyelaraskan arah kebijakan kelembagaan dengan landasan hukum yang kuat. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan dipimpin oleh Kepala Bagian Perundang-Undangan. Seluruh perwakilan Unit Kerja Eselon I lingkup Kemendagri turut hadir dalam forum tersebut.

Dalam forum ini, dibahas usulan regulasi yang diajukan untuk diundangkan dalam periode 2025 hingga 2029. Biro Hukum melakukan konfirmasi atas masing-masing usulan untuk memastikan kelayakan keberlanjutan proses penyusunan dan pengundangannya, atau pertimbangan untuk tidak dilanjutkan. Dari pihak BSKDN, terdapat tiga usulan regulasi yang diajukan, yaitu: Perubahan atas PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Perubahan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur BRIDA; serta rancangan Permendagri tentang Pembentukan Badan Strategi Kebijakan Daerah di lingkungan Pemda.

Hasil pencermatan dari Biro Hukum menyatakan bahwa ketiga usulan tersebut perlu ditunda, dan dalam proses selanjutnya berpotensi untuk dieliminasi, mengingat sedang berlangsungnya proses perubahan kelembagaan di Kemendagri, khususnya dalam rangka pembentukan Direktorat Jenderal BUMD.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga kesinambungan regulasi, Bagian Perencanaan BSKDN terus melakukan koordinasi intensif dengan Biro Hukum guna memastikan penyelenggaraan layanan hukum tetap sejalan dengan arah kelembagaan dan penguatan fungsi BSKDN ke depan.



Penyesuaian Perencanaan Program untuk Efisiensi dan Sinkronisasi: Coaching Clinic Lingkup BSKDN

Pelaksanaan Coaching Clinic lingkup BSKDN merupakan bagian dari upaya penyempurnaan perencanaan program agar lebih selaras dengan ketentuan regulasi dan kebutuhan strategis unit kerja. Kegiatan ini menghasilkan sejumlah revisi terkait anggaran, output, dan nomenklatur, yang dibahas bersama Pusat 4 dan Bagian Keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rencana kegiatan yang disusun benar-benar mencerminkan prioritas masing-masing unit serta relevan terhadap dinamika pelaksanaan anggaran.

Penyesuaian ini juga dilakukan agar seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru terkait pagu anggaran, sekaligus mendukung pelaksanaan program nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Dengan perencanaan yang lebih terukur dan sesuai koridor kebijakan fiskal, diharapkan pelaksanaan program-program BSKDN dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Menurut sejumlah pakar kebijakan publik, proses revisi dan harmonisasi perencanaan seperti ini merupakan elemen penting dalam membangun organisasi yang adaptif. Perencanaan yang responsif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan aktual tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, fleksibilitas terukur menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program tanpa mengorbankan kualitas output.

Sebagai tindak lanjut, unit-unit kerja di lingkungan BSKDN diharapkan segera menyesuaikan dokumen perencanaan sesuai hasil coaching clinic, serta memperkuat koordinasi lintas fungsi guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan selaras dan efisien.



Serba Serbi Juni

Penguatan Tata Kelola BUMD Melalui Pembentukan Struktur Baru: Pembahasan Teknis Pembentukan Direktorat Jenderal BUMD

Pembentukan Direktorat Jenderal BUMD merupakan langkah strategis Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah di seluruh Indonesia. Upaya ini dibahas dalam pertemuan teknis yang dilaksanakan di Gedung A Lantai 3 RSU Kemendagri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PAN-RB, Bappenas, Sekretariat Negara, BSKDN, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta Inspektorat Jenderal. Pertemuan ini membahas tindak lanjut pembentukan Ditjen BUMD,

termasuk penyampaian potensi dan peluang strategis atas kehadiran unit kerja baru tersebut. Selain itu, turut dibahas aspek teknis pendukung seperti alokasi dan distribusi kepegawaian, usulan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), serta proyeksi manfaat keberadaan Ditjen BUMD bagi masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Sebagai bagian dari proses administratif, naskah urgensi pembentukan Ditjen BUMD telah disampaikan secara resmi oleh Kemendagri kepada Kementerian PAN-RB sebagai dasar pertimbangan reformulasi kelembagaan yang diusulkan.



Penyelarasan Pembangunan Daerah Melalui Penyesuaian Dokumen Perencanaan: Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan dinamika kebijakan nasional maupun daerah. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang perubahan, yang didasarkan pada kondisi aktual serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Proses ini mencerminkan respons adaptif pemerintah daerah terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan RKPD ini dirancang untuk memperkuat integrasi antara prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, tepat sasaran, serta dapat menjawab tantangan pembangunan secara nyata. Penyesuaian ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memperkuat akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan yang ditetapkan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan infrastruktur antarwilayah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Sasaran-sasaran ini disusun berdasarkan analisis capaian indikator kinerja sebelumnya dan isu-isu strategis yang berkembang, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

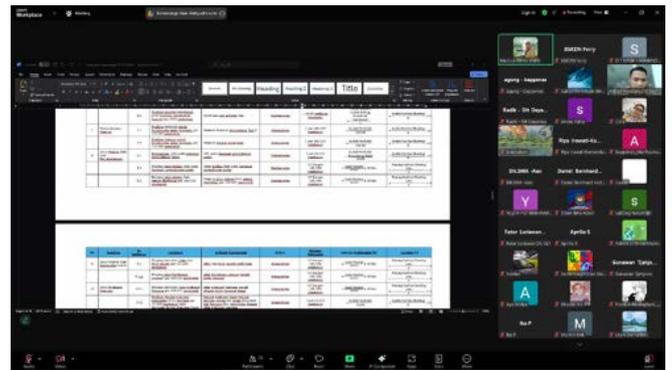


Serba Serbi Juni

Penguatan Layanan Perkotaan Melalui Regulasi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP): Pembahasan Rancangan Permendagri Tentang SPP

Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan wilayah perkotaan yang lebih inklusif, tertata, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada pukul 13.00–15.00 WIB melalui Zoom Meeting, dipimpin oleh Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Antar Negara. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari komponen internal Kemendagri serta lintas kementerian/lembaga, termasuk Bappenas, Kominfo Digitalisasi (Komdigi), dan kementerian teknis lainnya.

SPP ditekankan sebagai instrumen penting untuk menjamin kualitas hidup masyarakat perkotaan melalui peningkatan tata kelola layanan dasar. Keberadaan regulasi ini diperlukan sebagai acuan teknis bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyelenggarakan pelayanan yang efektif, terstandar, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar pelayanan yang dibahas mencakup sektor-sektor utama seperti air minum, sanitasi, transportasi, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pemukiman, serta layanan darurat.



Lebih lanjut, muncul sejumlah usulan agar aspek inklusivitas bagi kelompok rentan, mitigasi bencana, dan digitalisasi layanan dimasukkan ke dalam substansi regulasi. Seluruh peserta sepakat akan pentingnya kejelasan peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan standar tersebut.

Rancangan Permendagri ini juga dipastikan akan diselaraskan dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden tentang RPJMN, serta berbagai kebijakan sektoral terkait, agar memiliki kekuatan implementasi yang kuat dan lintas sektor.

Penyelarasan Pembangunan Daerah Melalui Penyesuaian Dokumen Perencanaan: Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan dinamika kebijakan nasional maupun daerah. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang perubahan, yang didasarkan pada kondisi aktual serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Proses ini mencerminkan respons adaptif pemerintah daerah terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan RKPD ini dirancang untuk memperkuat integrasi antara prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, tepat sasaran, serta dapat menjawab tantangan pembangunan secara nyata. Penyesuaian ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memperkuat akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan yang ditetapkan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan infrastruktur antarwilayah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Sasaran-sasaran ini disusun berdasarkan analisis capaian indikator kinerja sebelumnya dan isu-isu strategis yang berkembang, baik pada tingkat nasional maupun daerah.



Serba Serbi Juni

Menuju Tata Kelola Perencanaan yang Terukur: Finalisasi Indikator IPPD

Pembahasan Manual Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) diselenggarakan pada pukul 09.00–13.00 WIB di Hotel Swiss-Bel Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), serta Biro Perencanaan. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan Indeks Kinerja Utama (IKU) Menteri Dalam Negeri melalui platform ITKPDN, di mana Ditjen Bina Bangda ditugaskan untuk menyusun IPPD sebagai instrumen penilaian kualitas perencanaan daerah.

Hingga saat ini, rancang bangun IPPD masih dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, rapat difokuskan pada pembahasan struktur data dan indikator yang relevan, termasuk penggunaan data SUPD sebagai referensi awal dalam perancangan ukuran. Koordinasi dilakukan untuk menyinergikan IPPD dengan indeks yang telah disusun oleh BSKDN dan Biro Perencanaan, guna menghindari ketidaksesuaian data maupun metodologi.

Selain itu, disampaikan pula bahwa proses penyusunan Renstra Kemendagri telah dia-



jukan ke Biro Hukum pada akhir Mei dan masih dalam pencermatan staf khusus. Diharapkan finalisasi IPPD dapat disampaikan ke Biro Perencanaan paling lambat tanggal 11 untuk selanjutnya ditelaah secara internal. Hal ini berkaitan dengan tenggat penginputan terakhir Renstra ke dalam sistem KRISNA yang jatuh pada 20 Juni.

Menanggapi usulan dari Bappenas, Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) saat ini telah dinaikkan statusnya dari IKP menjadi IKU. Dengan demikian, terdapat dua indeks utama Kemendagri yang akan menjadi bagian dari IKU, yakni ITKPDN dan Indeks SPM. Meskipun begitu, data IPM tetap diperlukan dalam pengisian indikator ITKPDN, menjadikan Indeks SPM tidak hanya sebagai IKU, tetapi juga sebagai komponen penyusun indeks yang lebih luas.

Penguatan Disiplin Anggaran Melalui Monitoring Kinerja Triwulan II: Entry Meeting Monitoring Disiplin Belanja Lingkup Kemendagri

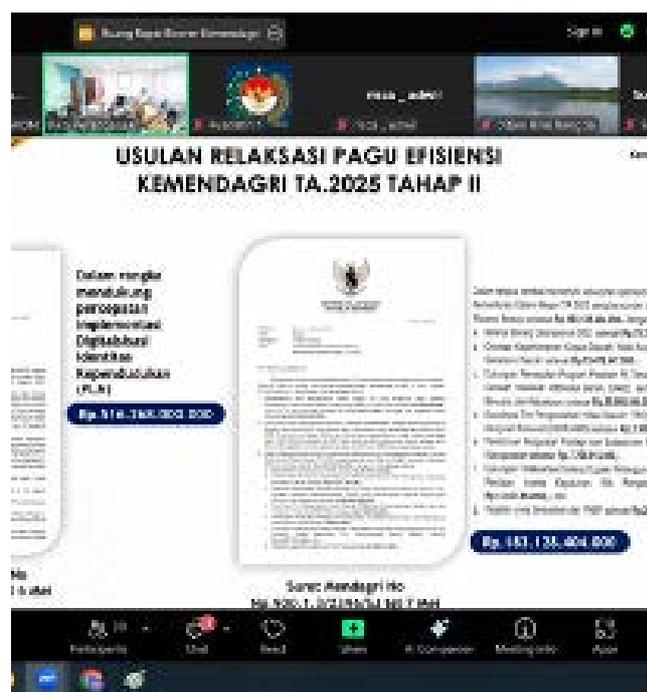
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola belanja negara dan pelaksanaan APBN yang efisien, Kementerian Dalam Negeri mengadakan Entry Meeting Monitoring Disiplin Belanja Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri, dan dipimpin oleh Kepala Bagian Monitoring Kinerja. Pertemuan turut dihadiri oleh BPKP serta perwakilan seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kemendagri, baik secara daring maupun luring.

Entry meeting ini menjadi forum penting untuk menyamakan pemahaman atas arah kebijakan efisiensi belanja nasional, menyusul diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam surat tersebut, Kemendagri ditargetkan melakukan efisiensi sebesar Rp2,75 triliun, yang menuntut konsolidasi data belanja secara lebih disiplin dan akurat antarunit kerja.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data tersebut, BPKP meminta sejumlah dokumen pendukung sesuai ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, termasuk data anggaran awal saat pengajuan relaksasi, besaran relaksasi yang disetujui dan realisasi anggaran hingga tanggal 31 Mei 2025.

Selain itu, untuk Inpres Nomor 2 hingga 9 Tahun 2025, diperlukan data menyangkut target kinerja, alokasi anggaran dalam DIPA/RKA K/L, dan perkembangan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Data ini wajib disiapkan oleh unit terkait seperti Ditjen Bina Bangda, Ditjen Pemdes, IPDN, dan Ditjen Dukcapil.

Sebagai langkah awal, tautan pengisian data telah disiapkan oleh Biro Perencanaan dan akan ditindaklanjuti melalui surat resmi untuk mendukung kelancaran proses monitoring sesuai ketentuan.



Serba Serbi Juni

Fasilitasi Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Sebagai daerah yang tengah berada dalam masa transisi kepemimpinan, Provinsi Gorontalo menyusun dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berperan penting sebagai pedoman transisi yang menjamin keberlanjutan arah pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepala daerah.

Evaluasi capaian pembangunan menjadi bagian krusial dalam proses penyempurnaan RKPD. Hasil evaluasi indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas program,

sekaligus sebagai bahan perumusan arah kebijakan dan prioritas tahunan. Target pembangunan yang dirumuskan tetap merujuk pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2026.

Melalui evaluasi menyeluruh, dokumen perubahan RKPD 2025 diarahkan menjadi lebih responsif terhadap perkembangan kebijakan fiskal dan kebutuhan riil masyarakat. Perubahan ini menekankan optimalisasi program prioritas, penyesuaian anggaran berbasis kinerja, dan penyelarasan kegiatan lintas SKPD. RKPD Perubahan juga menjadi dokumen penghubung antara RPJPD 2007–2025 dan RPJPD 2025–2045, sekaligus menjamin kesinambungan program strategis daerah.



Penyelarasan Perencanaan Daerah Menuju Capaian Misi Pembangunan: Fasilitas Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan program pembangunan di tahun berjalan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025. Proses ini didasarkan pada hasil evaluasi Triwulan I, yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap kondisi aktual serta ketentuan yang memungkinkan revisi apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan arah kebijakan atau perkembangan keadaan.

Dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah, indikator tujuan dan sasaran dalam RKPD 2025 tetap merujuk pada RPJMD 2021–2026. Seluruh indikator ini telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah, sehingga pencapaiannya mencerminkan progres terhadap visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh,

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dirumuskan sebagai tindak lanjut terhadap implementasi misi dalam RPJMD. Penyusunan arah kebijakan dilakukan secara tematik dan strategis, dengan mengacu pada hasil pemetaan isu-isu daerah, formulasi strategi pembangunan, serta penyelarasan terhadap arah kebijakan nasional. Kebijakan ini mulai diimplementasikan dalam perubahan RKPD tahun ini untuk memastikan pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan berdaya ungkit tinggi.

Sebagai upaya memperkuat kualitas dokumen perencanaan, proses fasilitasi ini juga mendorong konsolidasi lintas perangkat daerah agar sinkronisasi program dan kegiatan berjalan optimal. Kolaborasi antara Bappeda, OPD teknis, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan bahwa perubahan RKPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara nyata dan terukur di Kalimantan Utara.



Serba Serbi Juni

Penyelarasan Kebijakan Daerah dan Nasional: Finalisasi Perubahan RKPD Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Sebagai respons terhadap dinamika pembangunan dan perubahan arah kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar fasilitasi pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan strategi nasional, terutama dalam menyongsong implementasi visi-misi kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Pembahasan difokuskan pada latar belakang perubahan RKPD yang dipicu oleh ketidaksesuaian asumsi dasar pembangunan dengan realisasi pelaksanaan program pada Triwulan I tahun berjalan. Selain itu, perubahan ini juga menjadi sarana strategis untuk mengintegrasikan program prioritas kepala daerah terpilih ke dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian mencakup kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan, serta penyusunan dokumen kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS. Evaluasi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang dilakukan hingga Maret 2025 menunjukkan masih adanya



indikator yang belum mencapai target. Kondisi ini menuntut perbaikan dari sisi perencanaan maupun penganggaran guna memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah.

Dengan disusunnya dokumen perubahan RKPD yang lebih responsif, terukur, dan terintegrasi, diharapkan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 dapat berjalan lebih adaptif serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.



Tindak Lanjut Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri: Penguatan Strategi Kebijakan Berbasis Data

Jakarta, 11 Juni 2025 - Dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Menteri Dalam Negeri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan rapat koordinatif yang bertempat di Ruang Video Conference BSKDN. Rapat dipimpin oleh Kepala BSKDN dan dihadiri oleh Sekretaris BSKDN, Kepala Pusat II, serta perwakilan dari seluruh pusat dan bagian lingkup BSKDN.

Pada rapat tersebut dibahas langkah percepatan dukungan terhadap strategi kebijakan atas 9 Program Prioritas Presiden serta 6 isu strategis nasional sebagaimana telah diarahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Sebagai langkah awal, telah dilakukan pembagian tematik kepada masing-masing Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Selanjutnya, disepakati bahwa dalam waktu dua hari ke depan akan disusun instrumen survei sebagai alat penjangkauan data terhadap 15 isu strategis yang akan dikirimkan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Hasil survei nantinya akan dihimpun melalui Aplikasi Survei BSKDN dan digunakan sebagai bahan penyusunan strategi kebijakan berbasis data. Inisiatif ini diharapkan memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan dan memastikan keterhubungan antara isu daerah dengan kebijakan nasional.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas pelaksanaan survei, Bagian Perencanaan BSKDN juga tengah menjajaki kerja sama dengan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Kerja sama ini akan difokuskan pada pelatihan teknis pelaksanaan survei serta pemanfaatan hasil survei untuk analisis dan formulasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.



Serba Serbi Juni

Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Indikator ITKPDN

Dalam rangka memperkuat validitas dan cakupan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar rapat tindak lanjut penyusunan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu indikator utama ITKPDN.

Saat ini, pengembangan ITKPDN masih terbatas pada indeks-indeks yang berada dalam lingkup internal Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini menyebabkan nomenklatur ITKPDN menjadi sempit dan kurang mencerminkan kinerja tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh, khususnya dalam konteks lintas sektor yang lebih luas.

Menindaklanjuti arahan pimpinan, pengembangan ITKPDN diarahkan untuk mencapai rata-rata nasional sebagai target kinerja utama. Arahan ini menjadi pijakan strategis dalam merumuskan langkah kebijakan dan teknis pelaksanaan agar mampu mendorong peningkatan tata kelola serta penggunaan produk dalam negeri yang konsisten di seluruh daerah. Namun demikian, angka target spesifik masih dalam tahap penyempurnaan seiring berjalannya proses pengujian terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Dalam perancangannya, seluruh indikator ITKPDN disusun berdasarkan dimensi tata kelola yang telah disepakati bersama dan mengacu pada indeks-indeks yang dikelola oleh Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup Kemendagri. Penyusunan ini dilakukan secara partisipatif guna memastikan keterwakilan indikator yang komprehensif serta relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah ke depan.

Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan instrumen evaluasi yang lebih kuat dan aplikatif, sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis yang berbasis data dan berdampak nyata terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah.



Penguatan Sistem Kinerja Kemendagri: Dorong Transformasi Perencanaan dan Konseling Berbasis Bukti

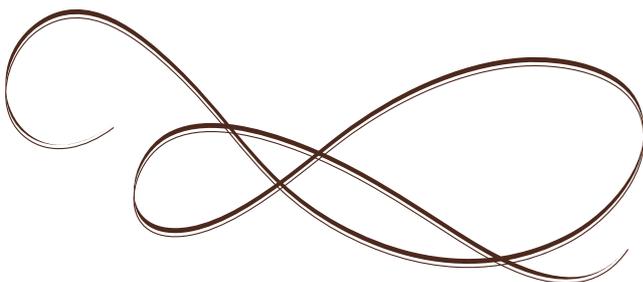
Kementerian Dalam Negeri terus mendorong perbaikan sistem pengelolaan kinerja organisasi dan individu melalui penyelenggaraan rapat pembahasan tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kinerja Individu serta Bimbingan Kinerja melalui Konseling Kerja. Rapat ini difokuskan pada penguatan pengawasan terhadap perencanaan kinerja, serta pemberian pemahaman strategis tentang pentingnya pendekatan yang preskriptif, berbasis bukti, dan mempertimbangkan risiko.

Dalam arahannya, pimpinan menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh sekadar bersifat retrospektif (*hindsight*), namun juga harus menggali akar masalah (*insight*) dan mampu memberikan proyeksi strategis ke depan (*foresight*). Pendekatan ini akan menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi penyempurnaan kinerja kelembagaan.

Metodologi pengawasan dirancang secara menyeluruh, mencakup tahapan identifikasi isu aktual, analisis regulasi, pemetaan proses bisnis, hingga pengujian hipotesis. Salah satu isu strategis

yang mengemuka adalah lemahnya keterkaitan antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional, tidak akuratnya basis data, dan minimnya rancangan besar (*grand design*) dalam proses perencanaan.

Sorotan juga diarahkan pada proses bisnis strategis seperti penyusunan rancangan teknokratik awal, input data strategis dalam sistem KRISNA, forum penyesuaian, dan penetapan dokumen. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa forum penelaahan dan penyesuaian antarunit masih belum optimal, indikator kinerja masih bersifat administratif, serta metode pengukuran belum terdefinisi secara tepat. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemenuhan kaidah-kaidah perencanaan berbasis bukti, potensi, dan masalah; berorientasi hasil; serta selaras dengan dokumen nasional.



Serba Serbi Juni

Finalisasi Dokumen Perubahan RKPD Jawa Tengah 2025: Penguatan Arah Pembangunan Terintegrasi

Sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fasilitasi pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta program prioritas nasional seperti Asta Cita Presiden dan kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman utama dalam perencanaan lanjutan, termasuk penyusunan Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), dan PPAS Perubahan. Seluruh penyesuaian dilakukan dengan memastikan konsistensi terhadap dokumen perencanaan strategis lainnya seperti RTRW, SDGs, strategi percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, serta dokumen reformasi birokrasi.

Secara struktur, dokumen perubahan RKPD terbagi menjadi dua bagian utama. Buku I menyajikan narasi strategis dalam tujuh bab, mencakup pendahuluan hingga penutup, yang mencerminkan kerangka ekonomi, evaluasi kinerja pembangunan triwulan I, serta sasaran dan prioritas pembangunan. Buku II berisi perubahan program, kegiatan, dan pendanaan dari masing-masing perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk konkret penyesuaian terhadap arah pembangunan yang telah diperbarui.

Dengan finalisasi dokumen ini, diharapkan arah pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 menjadi lebih terukur, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat secara nyata.



No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Target P-2025
1	PDRI per Kapita	47,97	49,30 - 49,73	49,30 - 51,13
2	Angka Kemiskinan	9,38	9,06 - 9,00	9,06 - 9,00
3	Penyakit Tidak Menular	0,36	0,360 - 0,360	0,360 - 0,360
4	Perencanaan Elementar	4,95	4,90 - 5,00	4,90 - 5,00
5	Indeks	1,53 (Muti)	1,50 - 1,50	1,50 - 1,50
6	Target Pengembangan Tertentu	4,53 (Muti)	4,61 - 4,62	4,61 - 4,62
7	Nilai Tahun Depan	105,78	107,50	107,50
8	Indeks Pembangunan Manusia	72,87	73,99	73,99
9	Indeks Pembangunan Kesejahteraan	60,89	62,04 - 62,33	62,33
10	Indeks Pembangunan Gender	93,80	93,12	93,12
11	Indeks Pembangunan Kelangkaan	63,07	64,07	64,07
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,06	73,68	73,68
13	Persentase pertumbuhan Indeks Keterbacaan	99,61	9,00	9,00
14	Indeks Reformasi Birokrasi	83,13	83,50	83,50



Penyelarasan Arah Pembangunan: Finalisasi Perubahan RKPDP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Sebagai langkah untuk menjaga konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPDP Tahun 2025. Forum ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti dinamika pembangunan daerah serta memperhatikan arahan kebijakan nasional yang perlu diakomodasi ke dalam agenda pembangunan daerah.

Perubahan RKPDP tahun 2025 ini difokuskan pada penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah agar selaras dengan arah pembangunan nasional. Langkah ini dipandang strategis untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun perubahan tersebut mengacu pada dokumen perencanaan utama, yakni Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA). Dengan penyesuaian yang dilakukan secara tematik dan terintegrasi, diharapkan pelaksanaan pem-

-bangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 akan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai catatan penting, dokumen perubahan RKPDP ini juga berfungsi sebagai instrumen penguatan koordinasi lintas sektor serta acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan daerah serta selaras dengan capaian nasional yang ditargetkan.

Menurut sejumlah pakar perencanaan pembangunan daerah, perubahan RKPDP yang dilakukan secara adaptif dan berbasis evaluasi kinerja triwulan sangat penting untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang dinamis dan akuntabel. Penyesuaian semacam ini dinilai mampu meningkatkan relevansi kebijakan.

P-RKPD 2025		RANWAL RPJMD 2025-2029	
Kategori	2025	Tahun	Rinc
1. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
2. Bidang Pembangunan Daerah	1.100	1.100	1.100
3. Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
4. Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.100	1.100	1.100
5. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
6. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
7. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
8. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
9. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
10. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
11. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
12. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100
13. Bidang Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
14. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.100	1.100	1.100
15. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
16. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
17. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
18. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
19. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
20. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
21. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
22. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
23. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100
24. Bidang Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
25. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.100	1.100	1.100
26. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
27. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
28. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
29. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
30. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
31. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
32. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
33. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
34. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100
35. Bidang Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
36. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.100	1.100	1.100
37. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
38. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
39. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
40. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
41. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
42. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
43. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
44. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
45. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100
46. Bidang Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
47. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.100	1.100	1.100
48. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
49. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
50. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
51. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
52. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
53. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
54. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
55. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
56. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100
57. Bidang Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
58. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.100	1.100	1.100
59. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
60. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
61. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
62. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
63. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
64. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
65. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
66. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
67. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100
68. Bidang Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
69. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.100	1.100	1.100
70. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
71. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
72. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
73. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
74. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
75. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
76. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
77. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
78. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100
79. Bidang Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
80. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.100	1.100	1.100
81. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
82. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
83. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
84. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
85. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
86. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
87. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
88. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
89. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100
90. Bidang Hukum dan Politik	1.100	1.100	1.100
91. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.100	1.100	1.100
92. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1.100	1.100	1.100
93. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1.100	1.100	1.100
94. Bidang Transportasi, Komunikasi dan Mass Media	1.100	1.100	1.100
95. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.100	1.100	1.100
96. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan	1.100	1.100	1.100
97. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.100	1.100	1.100
98. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.100	1.100	1.100
99. Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.100	1.100	1.100
100. Bidang Organisasi dan Tata Kelola	1.100	1.100	1.100

Serba Serbi Juni

Penguatan SPIP Terintegrasi sebagai Pilar Tata Kelola: Entry Meeting Penilaian Maturitas Lingkup Kemendagri

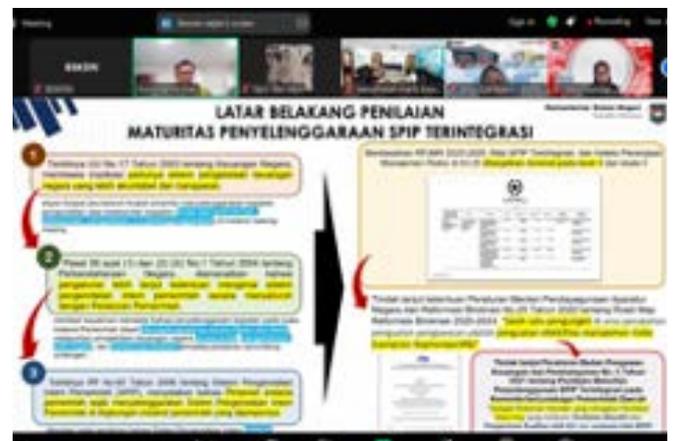
Upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian intern terus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pelaksanaan Entry Meeting Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi tonggak awal dalam menyiapkan proses evaluasi terhadap sistem pengendalian yang telah diterapkan di seluruh unit kerja.

Penilaian maturitas SPIP tahun ini menekankan pentingnya evaluasi berkala atas kebijakan dan mekanisme pengendalian yang dibangun berdasarkan informasi manajemen risiko. Langkah ini bertujuan agar efektivitas sistem dapat diukur secara obyektif dan dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan.

Ruang lingkup evaluasi juga mencakup assessment terhadap pengendalian risiko fraud, termasuk efektivitas kebijakan pencegahan, deteksi, serta respons terhadap praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan penguatan budaya integritas dan tata kelola bersih di lingkungan kementerian.

Entry meeting turut menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri maupun Laporan Hasil Evaluasi BPKP. Proses ini dimaksudkan agar perbaikan yang diusulkan benar-benar terimplementasi dan berdampak nyata dalam penguatan sistem pengawasan.

Optimalisasi dokumen manajemen risiko juga menjadi salah satu sorotan, di mana kualitasnya harus ditingkatkan agar mampu mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan berbasis risiko, serta pengawasan yang adaptif terhadap dinamika lapangan. Pakar tata kelola publik menilai bahwa keberhasilan SPIP tidak hanya diukur dari keberadaan dokumen, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut terinternalisasi dalam proses kerja organisasi. Oleh karena itu, penilaian maturitas SPIP menjadi instrumen penting.



Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Dalam rangka menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan dinamika kebijakan nasional, pemerintah daerah menggelar rapat pembahasan terkait Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rapat ini menjadi langkah strategis dalam merespons perkembangan terbaru dalam pembangunan nasional serta penyesuaian sasaran prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rapat yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan daerah ini bertujuan untuk menindaklanjuti dinamika pembangunan yang terjadi, baik secara lokal maupun nasional. Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa perlunya penyesuaian arah kebijakan nasional terhadap kebijakan pembangunan daerah agar tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 ini dilakukan dengan menyesuaikan kembali sasaran dan prioritas pembangunan, sehingga pelaksanaan program pembangunan daerah dapat sejalan dengan rencana strategis pemerintah pusat.

Selain itu, proses perubahan RKPD juga mengacu pada sejumlah dokumen perencanaan penting, antara lain Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA). Sinkronisasi antara dokumen-dokumen ini menjadi dasar penting dalam memastikan efektivitas penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat segera melakukan penyesuaian dokumen perencanaan dan anggaran sesuai hasil pembahasan, sehingga pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dapat berjalan secara optimal dan terarah.

P-RKPD 2025

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	2024	Target 2025
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Layanan Kerja		11,04	11,04 - 11,04
1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,94	2,20-2,94
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan		8,10	8,10
1. Persentase Pemeluk Misionaris	%	8,81	8,10
2. Persentase Pemeluk Misionaris Persebaran	%	13,33	12,87
Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja		90,80	90,80
1. Rasio Penduduk Bekerja	%	90,80	90,80
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,8	0,814
1. Rasio Kesehatan Sempul	Rasio	0,8	0,814
2. Rasio Kesehatan Sempul	Rasio	0,8	0,814
Meningkatkan Jumlah Penduduk Usia Produktif		99,27	99,74
1. Rasio Usia Produktif	Rasio	99,27	99,74

RANWAL RPJMD 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	2024	Target 2025
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Layanan Kerja		11,04	11,04 - 11,04
1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,94	2,20-2,94
Meningkatkan kesejahteraan sosial yang setara		0,90	0,81
1. Indeks Kesejahteraan Sosial	%	0,90	0,81
Meningkatkan Angka Partisipasi Kerja		90,80	90,80
1. Rasio Penduduk Bekerja	%	90,80	90,80
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		0,8	0,8
1. Rasio Kesehatan Sempul	Rasio	0,8	0,8
2. Rasio Kesehatan Sempul	Rasio	0,8	0,8
Meningkatkan Jumlah Penduduk Usia Produktif		99,27	99,74
1. Rasio Usia Produktif	Rasio	99,27	99,74

1. Terdapat redundansi kinerja yang diukur yaitu terkait kemiskinan
2. Rumusan sasaran strategis beserta indikator pada P-RKPD belum sepenuhnya mengakomodir atau berbeda dengan Rencana RPJMD 2025-2029



Serba Serbi Juni

Rapat Entry Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Lingkup Kemendagri

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025. Sejumlah langkah strategis telah dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern di seluruh satuan kerja pemerintah daerah dan pusat.

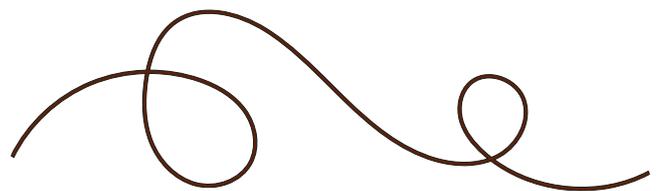
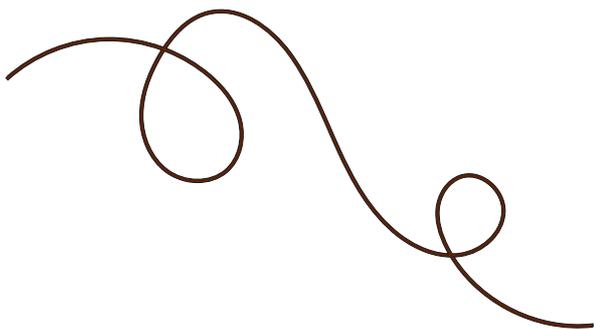
Salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPIP tahun ini adalah pelaksanaan evaluasi berkala atas kebijakan atau pengendalian yang telah dibangun. Evaluasi ini dilakukan dengan berbasis pada informasi yang dihasilkan dari proses manajemen risiko, guna mengukur tingkat efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong assessment atas kecukupan pengendalian terhadap risiko fraud, khususnya terkait potensi tindak korupsi.

Lebih lanjut, pelaksanaan SPIP 2025 juga menekankan pentingnya menindaklanjuti dan memonitor secara aktif hasil rekomendasi perbaikan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri serta Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini dinilai penting dalam menjaga kesinambungan perbaikan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas tata kelola risiko, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas dokumen manajemen risiko. Dokumen tersebut menjadi referensi penting bagi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan perencanaan berbasis risiko, serta pelaksanaan pengawasan yang lebih terarah dan efektif.

Melalui pelaksanaan SPIP yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap tantangan zaman, pemerintah berharap tercipta sistem birokrasi yang semakin akuntabel, responsif, serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.





Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Dalam forum tersebut, seluruh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara didorong agar segera melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam Renja masing-masing. Penyesuaian ini penting agar selaras dengan kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang telah diperbarui, sekaligus menjamin sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen Perubahan RKPD ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kedua dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam proses penyusunan dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025. Untuk itu, penting ditegaskan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan syarat utama dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Dalam forum tersebut, seluruh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara didorong agar segera melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam Renja masing-masing. Penyesuaian ini penting agar selaras dengan kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang telah diperbarui, sekaligus menjamin sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Bagian Perencanaan BSKDN turut memberikan atensi khusus terhadap pentingnya sinergi antara kebijakan perencanaan daerah dan arah kebijakan strategis nasional. Fokus perhatian ini juga mencakup integrasi aspek reformasi birokrasi tematik, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan. Dengan pelaksanaan perubahan RKPD yang terarah, kolaboratif, dan berpedoman pada regulasi nasional, diharapkan proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel menuju pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan.



Serba Serbi Juni

Rapat pelaksanaan perdana telesurvey Command Center BSKDN

BSKDN menggelar pelaksanaan perdana telesurvey pada hari Senin, 16 Juni 2025, bertempat di ruang Command Center BSKDN. Kegiatan dimulai pukul 13.30 WIB dan dihadiri oleh Sekretaris Badan, para Analis Kebijakan, Statistisi dari masing-masing pusat, serta CPNS baru di lingkungan BSKDN.

Telesurvey ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara via telepon, dengan tujuan menghimpun informasi dan persepsi masyarakat sesuai tema yang telah ditetapkan oleh masing-masing pusat di BSKDN. Dalam kegiatan ini, telah dilakukan pembagian akun dan daftar responden kepada setiap pusat sebagai dasar pelaksanaan telesurvey. Setiap tim bertugas untuk menghubungi responden sesuai target dan arahan substansi yang telah ditentukan sebelumnya.



Meski kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Di antaranya, sejumlah responden meminta Surat Tugas resmi, terdapat gangguan atau bug pada aplikasi, serta beberapa nomor telepon yang tidak mendapatkan respon dari target sasaran. Kendala-kendala ini menjadi catatan penting untuk evaluasi teknis dan operasional dalam pelaksanaan survei selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, pelaksanaan telesurvey akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, 17 Juni 2025 pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang Command Center. Diharapkan, sesi lanjutan ini dapat berlangsung lebih optimal dengan perbaikan dan penyesuaian teknis yang dibutuhkan.

Melalui pelaksanaan telesurvey ini, BSKDN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan data yang valid, akurat, dan berbasis pada persepsi masyarakat, guna mendukung proses perumusan kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat Penelaahan Usulan Relaksasi Efisiensi Belanja Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan dan Biro Perencanaan Kemendagri dalam rangka membahas usulan relaksasi terhadap efisiensi belanja operasional, khususnya terkait kode akun 002 yang selama ini diblokir sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa usulan awal dari Kemendagri menghendaki agar relaksasi pemblokiran dilakukan secara spesifik per Unit Kerja Eselon I (UKE I). Namun demikian, Kementerian Keuangan menyampaikan pandangan berbeda terkait mekanisme relaksasi yang diusulkan.

Dalam arahannya, perwakilan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa relaksasi blokir belanja operasional 002 tidak akan dilakukan berdasarkan masing-masing unit kerja, melainkan akan diakomodasi secara menyeluruh di tingkat kementerian. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dan sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut, usulan belanja operasional yang akan direlaksasi akan dikelompokkan atau diklasterkan berdasarkan urusan kegiatan. Proses klasterisasi ini akan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemendagri, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengajuan relaksasi sesuai dengan program prioritas dan kebutuhan riil unit kerja.

Setelah proses klasterisasi rampung, masing-masing UKE I akan dimintai konfirmasi terhadap item-item kegiatan yang diusulkan masuk dalam relaksasi. Konfirmasi ini menjadi langkah penting guna memastikan kesesuaian dan kesepakatan internal sebelum usulan disampaikan secara formal kepada Kementerian Keuangan.



Serba Serbi Juni

Rapat Fasilitasi rancangan perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 Sulawesi Barat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disusun sebagai kelanjutan dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Dokumen RKPD ini awalnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024.

Dalam fasilitasi tersebut dibahas ruang lingkup Perubahan RKPD 2025, yang mencakup: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, perubahan program dan kegiatan perangkat daerah, hingga target penyelenggaraan pemerintahan.

Diketahui bahwa terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp62 miliar, belanja daerah turun Rp21 miliar, belanja operasional menurun Rp1,6 miliar, dan defisit daerah juga turun signifikan sebesar Rp41 miliar. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Keuda memberikan perhatian khusus terhadap rencana pemberian subsidi untuk transportasi udara. Usulan tersebut akan ditinjau lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi serta efektivitas pemanfaatannya.

Penyusunan RKPD 2025 Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik. Salah satunya adalah kegiatan Ekspose Rancangan Awal RKPD yang dilaksanakan pada 5 Februari 2024 di Graha Sandeq, serta Forum Konsultasi Publik pada 7 Maret 2025 yang dihadiri oleh Forkopimda, Kepala OPD, dan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat. Dalam forum ini dibahas lima misi pembangunan daerah yang terangkum dalam konsep "Panca Daya", sebagai dasar membangun Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.

Bagian Perencanaan BSKDN juga memberikan perhatian terhadap pentingnya sinergi antara kebijakan perencanaan daerah dengan arah kebijakan strategis nasional, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi tematik yang menjadi agenda prioritas pemerintah pusat.



Rapat Evaluasi rancangan akhir RPJMD tahun 2025-2029 provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama DPRD terus mematangkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 melalui rapat evaluasi yang digelar sebagai bagian dari tahapan finalisasi dokumen perencanaan strategis lima tahunan tersebut.

Dalam rancangan akhir RPJMD ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan tiga program strategis utama, yaitu:

1. Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut di Batulicin, Tanah Bumbu, yang dirancang untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
2. Pembangunan Stadion Internasional, sebagai sarana pengembangan olahraga dan penyelenggaraan event nasional maupun internasional, sekaligus mendongkrak citra dan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pembangunan Jalan Poros Tengah, yang menjadi fokus pengembangan infrastruktur jalan strategi.

Rapat evaluasi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, dalam proses penyusunan dokumen ini, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Bappeda bersama Pansus III DPRD Kalsel telah menggelar berbagai forum diskusi, termasuk Focus Group Discussion (FGD) bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri.

Dalam forum ini, Bagian Perencanaan BSKDN Kementerian Dalam Negeri juga memberikan perhatian terhadap pentingnya sinergi antara kebijakan perencanaan daerah dengan arah kebijakan strategis nasional, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi tematik. Hal ini diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan partisipatif.

Dengan evaluasi yang komprehensif dan kolaboratif ini, diharapkan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi perencanaan administratif.

Serba Serbi Juni

Rapat Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran yang lebih efektif dan efisien untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Perencanaan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan TA 2026. Rapat ini difokuskan pada penyesuaian teknis, penguatan regulasi, serta optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian output strategis.

Kepala Biro Perencanaan memberikan arahan khusus mengenai penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan, terutama untuk kegiatan fullboard dan fullday yang kini mengalami perubahan mekanisme pelaksanaan guna menunjang kelancaran proses kerja di seluruh unit kerja.

Dalam arahannya, Kepala Biro juga menekankan pentingnya prioritas pada kegiatan strategis, sekaligus memberikan perhatian terhadap pembatasan anggaran perjalanan dinas (perdin). Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan alokasi anggaran agar tepat sasaran dan mendorong efisiensi operasional.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah penyesuaian Standar Biaya Keluaran (SBK) terhadap kegiatan yang menghasilkan naskah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2024, nilai SBK untuk kegiatan semacam ini ditetapkan sebesar Rp 50.000.000. Nilai ini menjadi rujukan dalam penyusunan anggaran kegiatan kebijakan di tahun mendatang.

Terkait usulan kegiatan baru, rapat menggarisbawahi pentingnya telaah mendalam terhadap regulasi dan aspek teknis, termasuk identifikasi risiko atas pelaksanaan kegiatan tanpa mitigasi yang memadai. Pendekatan ini dianggap krusial untuk menjamin kelayakan, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.



Rapat Fasilitasi Rancangan peraturan gubernur tentang Perubahan RKPD provinsi Lampung tahun 2025

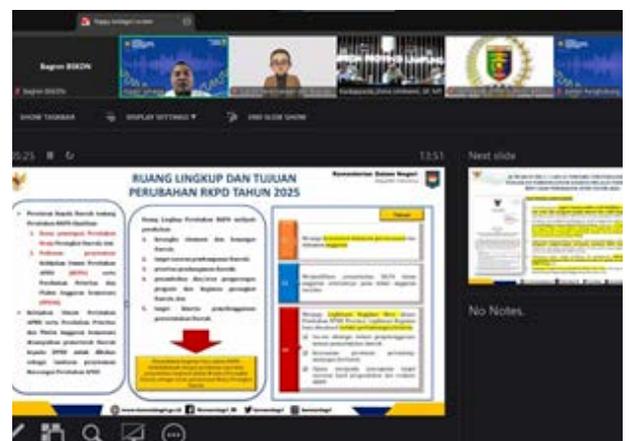
Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai dasar hukum penyusunan perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 pada 27 Juni 2023. Seluruh informasi dan ringkasan dokumen tersebut juga telah tersedia secara publik melalui situs resmi Pemprov Lampung di lampungprov.go.id.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dan 2026, Pemerintah Provinsi Lampung telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik dan Desk Musrenbang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD dengan menampung aspirasi serta usulan program/kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota se-Lampung.

Rapat juga menyoroti capaian indikator makro Triwulan I Tahun 2025, yang menunjukkan kinerja positif, di antaranya:

- Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung mencapai 5,47%, tertinggi dalam lima tahun terakhir dan terbaik di kawasan Sumatera;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,07%;
- Tingkat Inflasi tercatat 1,58%, masih dalam batas target namun tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap daya beli masyarakat;
- Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 133,17, mencerminkan perbaikan daya beli petani.
- Namun demikian, terdapat 7 dari 11 indikator makro yang datanya belum tersedia hingga Triwulan I, menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.



Serba Serbi Juni

Rapat Fasilitasi Penyusunan RKPD DKI Jakarta 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang menjadi langkah strategis dalam mengakomodasi dinamika kebijakan serta penyesuaian terhadap visi dan misi kepala daerah yang baru dilantik.

Rapat yang dihadiri oleh perangkat daerah, pejabat teknis, dan perwakilan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini menyoroti bahwa penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan sebagai respons atas dinamika global, nasional, dan regional yang memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, adanya pergantian kepemimpinan daerah menuntut penyesuaian terhadap arah pembangunan, sehingga dokumen RKPD menjadi instrumen utama dalam mengintegrasikan visi dan misi kepala daerah baru ke dalam rencana tahunan.

Dalam sesi evaluasi, disampaikan bahwa penilaian kinerja dilakukan melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi (monev), yang diisi secara berkala oleh perangkat daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar indikator kinerja mengalami capaian yang baik, terdapat ketidaksesuaian antara target perjanjian kinerja dan target dalam dokumen perencanaan, yang perlu segera diselaraskan agar tidak menghambat proses akuntabilitas dan pelaksanaan program.

Selanjutnya, disampaikan bahwa rancangan akhir Perubahan RKPD 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, yaitu:

- Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025

Rapat Fasilitasi Penyusunan RKPD Kalimantan Barat 2025

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, sebagai bentuk penyesuaian strategis terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah hingga Triwulan I Tahun 2025.

Dalam rapat juga dipaparkan evaluasi capaian pembangunan daerah Triwulan I Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa tiga tujuan utama pembangunan belum sepenuhnya mencapai target maksimal:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat pada angka 71,19, tergolong tinggi namun masih di bawah target RKPD sebesar 71,61.
- Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalbar sebesar 5,00%, belum memenuhi target proyeksi di kisaran 5,30–5,65%.
- Indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai kategori A, sementara target capaian adalah kategori BB.

Capaian ini menjadi perhatian khusus dalam proses revisi dokumen perencanaan, yang bertujuan mempercepat pemulihan dan peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor.

Lebih lanjut, rapat juga menyepakati perlunya penguatan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program. Ditekankan bahwa tanpa monitoring yang kuat, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran akan sulit tercapai. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan, masih menunjukkan kinerja yang sangat rendah, baik dari aspek keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.



Serba Serbi Juni

Rapat Sosialisasi Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2025

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 sebagai upaya mendorong peningkatan inovasi pelayanan publik di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada perwakilan provinsi dan kabupaten/kota terkait mekanisme penilaian, pengukuran, dan kategori inovatif dalam rangka penyusunan Indeks Inovasi Daerah, serta mempersiapkan proses pemberian penghargaan IGA 2025.

Dalam sambutannya, Sekretaris BSKDN menegaskan bahwa penyelenggaraan IGA bukan hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki misi strategis yaitu untuk memotivasi pemerintah daerah agar terus melakukan terobosan dalam pelayanan publik, baik yang tergolong sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, maupun belum dapat dinilai. Pengukuran IID menjadi tolok ukur objektif atas capaian reformasi birokrasi daerah berbasis inovasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan penilaian yang transparan dan akuntabel, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretaris BSKDN, Kepala Pusat Strategi Kebijakan IV, Kepala Pusat I, serta Perwakilan Analisis Kebijakan dari Pusat IV. Penandatanganan tersebut memperkuat integritas dalam proses penjangkaran data dan penilaian IID.

Acara dilanjutkan dengan pembukaan simbolis penjangkaran data Indeks Inovasi Daerah melalui aplikasi, yang dilakukan oleh Sekretaris BSKDN. Aplikasi ini menjadi kanal utama bagi pemerintah daerah dalam menginput inovasi-inovasi unggulan mereka yang akan dinilai oleh tim penilai independen.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pembacaan panduan pembagian breakout room per kelompok provinsi turut dilakukan untuk melanjutkan sosialisasi secara teknis dan mendalam di masing-masing wilayah. Peserta mendapatkan pemaparan terkait teknis input data, klasifikasi jenis inovasi, indikator penilaian, serta tata cara verifikasi dokumen dukung.



Rapat Fasilitasi Penyusunan RKPD Kalimantan Timur tahun 2025

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan dinamika kebijakan nasional.

Penyusunan dokumen ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan perubahan dokumen perencanaan daerah.

Dengan dokumen perubahan yang disusun secara akurat dan responsif, efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan di Kalimantan Timur diharapkan dapat ditingkatkan, baik dari sisi capaian fisik maupun pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien.

Dalam rapat, dijelaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk mengantisipasi dinamika pembangunan agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Proses perubahan ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah dengan kondisi faktual di lapangan.

Tujuan utama dari penyusunan Perubahan RKPD adalah sebagai pedoman teknis dan strategis dalam:

- Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- Menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses perencanaan yang adaptif, terukur, dan berbasis hasil evaluasi yang nyata.

Serba Serbi Juni

Rapat Fasilitasi Penyusunan RKPD Gorontalo tahun 2025

Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan sinkronisasi arah pembangunan daerah secara terukur, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah.

Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen strategis yang menjabarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah. RKPD juga menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk perencanaan tahun 2026, RKPD Provinsi Gorontalo mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026, yang saat ini berfungsi sebagai dokumen transisi perencanaan jangka menengah seiring dengan belum tersusunnya RPJMD.

Rapat juga menekankan pentingnya landasan hukum dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD);
- Peraturan Pemerintah terkait perencanaan pembangunan;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara teknis proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Melalui fasilitasi ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menyusun RKPD Tahun 2025 yang responsif terhadap tantangan pembangunan, sejalan dengan kebijakan nasional, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.





Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Kalimantan Timur tahun 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sebagai bagian dari proses penajaman perencanaan pembangunan tahunan di tengah transisi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 merujuk pada sejumlah regulasi penting, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang secara teknis mengatur penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, ditegaskan bahwa RKPD menjadi pedoman utama bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, integrasi yang kuat antara dokumen RKPD dengan instrumen penganggaran menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.

Rapat juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah serta kelengkapan data dukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) agar program prioritas nasional dapat diakomodasi secara optimal di tingkat provinsi. Data dukung ini akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun 2026 yang berbasis kebutuhan nyata, hasil evaluasi, dan arahan strategis nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menyusun RKPD Tahun 2026 secara adaptif, terukur, dan akuntabel, demi memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.



DRAFT

Serba Serbi Juni

Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Sulawesi Barat tahun 2026

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Dalam posisinya yang krusial, RKPD ini menjadi penghubung antara arah pembangunan jangka menengah dan eksekusi program tahunan, sekaligus memastikan kesinambungan kebijakan dan capaian sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD 2026 juga dirancang untuk merespons tantangan nyata yang dihadapi daerah, seperti:

- Ketimpangan wilayah antar kabupaten;
- Tingginya angka stunting dan permasalahan kesehatan masyarakat;
- Rendahnya produktivitas sektor unggulan, khususnya pertanian dan perikanan;
- Tantangan nasional seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan dampak pasca Pemilu 2024.

Dalam forum fasilitasi, disampaikan bahwa RKPD 2026 disusun secara terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, antara lain:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045;
- RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029;
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026.

Dokumen ini juga mengakomodasi visi, misi, dan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sehingga menjadi instrumen kunci dalam menjembatani visi pembangunan jangka panjang dan pelaksanaan tahunan lintas sektor.

Rapat menekankan pentingnya sinkronisasi data dukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) serta penguatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan, guna memastikan efektivitas dan konsistensi perencanaan serta penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.

Rapat Koordinasi Data Dukung Terkait Pelaksanaan Inpres Nomor 1-9 Tahun 2025

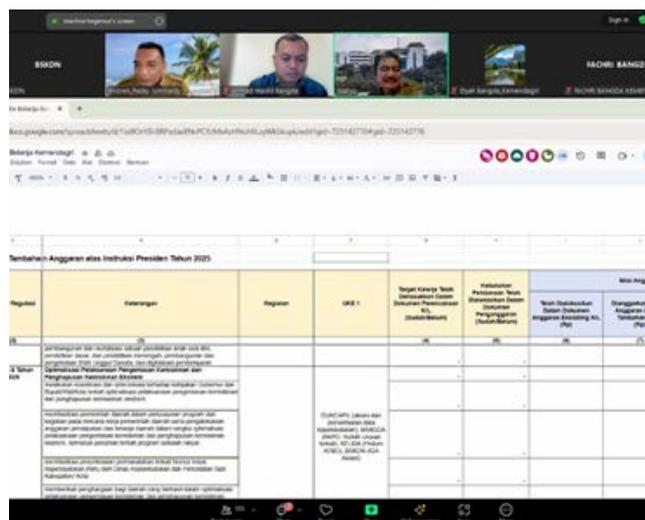
Rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi bersama dalam pengumpulan, validasi, dan pelaporan data dukung pelaksanaan Inpres, yang menjadi instrumen penting dalam menilai capaian program prioritas nasional, efektivitas realisasi kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan.

Disampaikan dalam rapat bahwa ketersediaan data dukung yang akurat dan tepat waktu menjadi kunci keberhasilan monitoring pelaksanaan Inpres, termasuk dalam menginformasikan perkembangan kepada pimpinan nasional secara berkala.

Secara khusus, BSKDN tercantum dalam pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yang berkaitan dengan penguatan inovasi pelayanan publik di daerah. Dalam konteks ini, Pusat Strategi Kebijakan IV BSKDN mendapat mandat untuk menindaklanjuti pelaksanaan Innovation Government Award (IGA) 2025, sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja inovasi pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Rapat juga menekankan pentingnya integrasi antar pusat di lingkungan BSKDN, serta sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, guna memastikan proses pelaporan data dukung Inpres berjalan sistematis, terukur, dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui rapat ini, BSKDN memperkuat komitmennya dalam mendukung implementasi Inpres secara akuntabel dan evidence-based, serta memastikan bahwa kebijakan strategis nasional dapat terlaksana dengan baik hingga ke tingkat daerah.



Serba Serbi Juni

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Usulan Relaksasi Belanja Kemendagri TA 2025

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Usulan Relaksasi Belanja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada pukul 15.30 WIB. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri dan dihadiri oleh seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup Kemendagri.

Dalam forum tersebut, Biro Perencanaan menyampaikan hasil final usulan relaksasi anggaran Tahap II TA 2025 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Proses relaksasi anggaran ini merupakan bagian dari strategi penyesuaian belanja operasional untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran secara nasional.

BSKDN melaporkan bahwa pada tahap ini, telah diajukan usulan relaksasi Belanja Operasional dengan kode akun 002 senilai Rp2.620.329.000, dan seluruhnya telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Capaian ini menjadi langkah strategis dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan program kerja BSKDN Tahun Anggaran 2025, terutama dalam mendanai kegiatan operasional yang bersifat mendesak dan berorientasi pada hasil kebijakan.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Bagian Perencanaan BSKDN akan segera berkoordinasi dan memenuhi arahan teknis dari Biro Perencanaan Kemendagri, termasuk proses pelengkapan dokumen administratif yang menjadi syarat dalam pelaksanaan mekanisme buka blokir anggaran Belanja Operasional (002).

Melalui relaksasi anggaran ini, BSKDN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan strategi kebijakan nasional, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	UNIT PERENCANAAN	RELAKSASI Tahap II		
		JUMLAH	PAYMENT	SALDO
10	UNIT PERENCANAAN	3.963.381	3.963.381	
A	Belanja Berang Operasional (002)	3.963.381	3.963.381	
11	BSKDN	3.638.538	3.638.538	
A	Belanja Berang Operasional (002)	3.638.538	3.638.538	
14	BSKDN	30.841.462	30.841.462	
A	Belanja Berang Operasional (002)	30.841.462	30.841.462	
B	Unit Kerja Eselon I (UKE I)	13.476.467	13.476.467	
B1	Unit Kerja Eselon I (UKE I)	4.000.701	4.000.701	
B1.1	Unit Kerja Eselon I (UKE I)	4.000.701	4.000.701	
B1.1.1	Unit Kerja Eselon I (UKE I)	3.575.964	3.575.964	
B1.1.2	Unit Kerja Eselon I (UKE I)	424.737	424.737	
C	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	24.782.348	24.782.348	
C1	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	24.782.348	24.782.348	
C1.1	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	9.448.732	9.448.732	
C1.1.1	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	9.448.732	9.448.732	
C1.1.2	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.2	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	15.333.616	15.333.616	
C1.2.1	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	15.333.616	15.333.616	
C1.2.2	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.1	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.2	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.3	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.4	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.5	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.6	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.7	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.8	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.9	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.10	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.11	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.12	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.13	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.14	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.15	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.16	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.17	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.18	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.19	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	
C1.3.20	Anggaran yang bersumber dari PMP/ Anggaran Dasar dan Anggaran	0	0	

Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Jawa Barat tahun 2026

Dalam rapat yang digelar secara hybrid tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat memaparkan substansi utama dokumen RKPD Tahun 2026, yang mengusung visi pembangunan “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.” Penyusunan dokumen menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif (bottom-up), dan top-down, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional seperti RKP dan RPJMN.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD 2025–2029, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mengawal arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025–2045. Visi gubernur yang dijabarkan ke dalam empat misi pembangunan strategis menjadi pijakan dalam penetapan prioritas dan arah kebijakan pembangunan.

Tim fasilitasi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memberikan sejumlah catatan penyempurnaan redaksional dan teknis, meskipun secara substansi.

Menanggapi hal tersebut, Bagian Perencanaan Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti hasil fasilitasi, dengan melakukan perbaikan dokumen sebagaimana yang disarankan, dan menyampaikan hasil revisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.

Rapat ini menjadi langkah penting dalam menjamin sinkronisasi dan konsistensi perencanaan antara daerah dan pusat, serta memperkuat kualitas dokumen RKPD sebagai landasan utama penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahun 2026 di Provinsi Jawa Barat.



Serba Serbi Juni

Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Kalimantan Tengah tahun 2026

RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Tengah disusun secara terintegrasi dengan RPJMD 2025–2029 dan telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumen ini memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja tahunan, program strategis nasional, serta hasil Rakortekbang 2025.

Dalam rapat fasilitasi, Bappeda Kalimantan Tengah juga menyampaikan Program Prioritas Huma Betang 2025–2030 sebagai pilar utama arah pembangunan provinsi. Program ini terdiri dari enam pilar strategis:

1. Kalteng Bermartabat
2. Betang Maju
3. Betang Makmur
4. Betang Cerdas
5. Betang Sehat
6. Betang Harmoni

Pilar-pilar tersebut mencakup berbagai sektor prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan internet di wilayah pedalaman, serta pengembangan Delta Kalteng sebagai kawasan ekonomi eksklusif.

Adapun dalam rancangan akhir (ranhir) RKPD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp7,07 triliun, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,19 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,33 triliun, turun dari Rp10,21 triliun. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp265,13 miliar.

Penurunan ini menjadi perhatian utama dalam rapat, di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi anggaran, serta memastikan alokasi anggaran yang tetap mendukung pelaksanaan program prioritas Huma Betang.

Hasil fasilitasi akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan teknis dan administratif dokumen RKPD, guna menjamin konsistensi arah pembangunan daerah yang adaptif dan inklusif.



Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPDP Sumatera Selatan tahun 2026

RKPDP 2026 merupakan tahun terakhir dalam siklus RPD tersebut dan berisi arah kebijakan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disusun dengan mengacu pada RKP dan Program Strategis Nasional. Penyusunan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, lapangan kerja, pelayanan publik, serta daya saing daerah

RKPDP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. RKPDP ini tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam penyusunannya, RKPDP mempedomani RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024–2026, RPJPD 2025–2045

RKPDP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. RKPDP ini tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam penyusunannya, RKPDP mempedomani RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024–2026, RPJPD 2025–2045

Dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan RKP Tahun 2026. RKPDP juga menjadi jembatan penting antara perencanaan tahunan dengan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) serta RKPDP kabupaten/kota yang berkontribusi terhadap capaian pembangunan provinsi secara keseluruhan



Serba Serbi Juni

Rapat Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang RKPD Jawa Timur tahun 2026

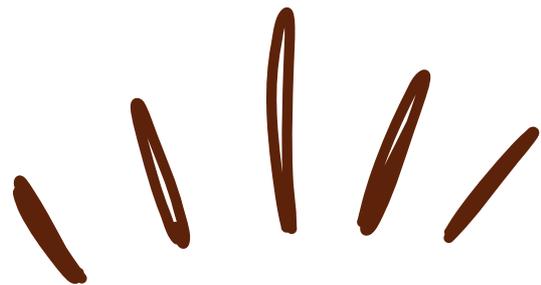
Penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan dalam masa transisi pemerintahan baru, pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025–2030. Oleh karena itu, dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD 2025–2029, serta diselaraskan dengan agenda prioritas nasional dan program strategis pemerintah pusat.

Pendekatan kolaboratif pentahelix menjadi metode utama dalam penyusunan RKPD ini, melibatkan partisipasi aktif dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, dan media massa. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat validitas data, memperluas jangkauan partisipasi publik, serta meningkatkan integrasi data perencanaan antar level pemerintahan melalui sinkronisasi aplikasi sistem informasi perencanaan pusat dan daerah.

Secara regulatif, RKPD 2026 berpedoman pada sejumlah payung hukum, seperti:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

RKPD menjadi dokumen yang menjembatani antara RPJMD dan Renja Perangkat Daerah, serta menjadi instrumen kunci dalam integrasi kebijakan tahunan di tingkat provinsi. Dokumen ini juga dirancang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta mengakomodasi berbagai dokumen spasial, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Peraturan Zonasi, guna memastikan keterpaduan pengelolaan ruang dan pembangunan berkelanjutan.





Rapat Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang RKPD Jawa Timur tahun 2025

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025, sebagai upaya merespons berbagai dinamika pembangunan yang berkembang di tengah pelaksanaan tahun berjalan.

Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti adanya perubahan asumsi-asumsi makro, penyesuaian kebijakan nasional, serta hasil evaluasi atas capaian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan triwulan pertama. Dokumen RKPD memiliki posisi strategis dalam siklus pembangunan daerah karena menjadi acuan utama seluruh perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program serta kegiatan prioritas, serta menjadi dasar penyusunan perubahan APBD dan alat evaluasi kinerja tahunan.

Penyusunan perubahan RKPD ini mengacu pada sejumlah regulasi penting, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang relevan, serta ketentuan teknis lainnya yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Lebih lanjut, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga tidak terlepas dari keterkaitannya dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, yakni RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Tahap I) dan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, termasuk arahan pembangunan spasial yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2023–2043.



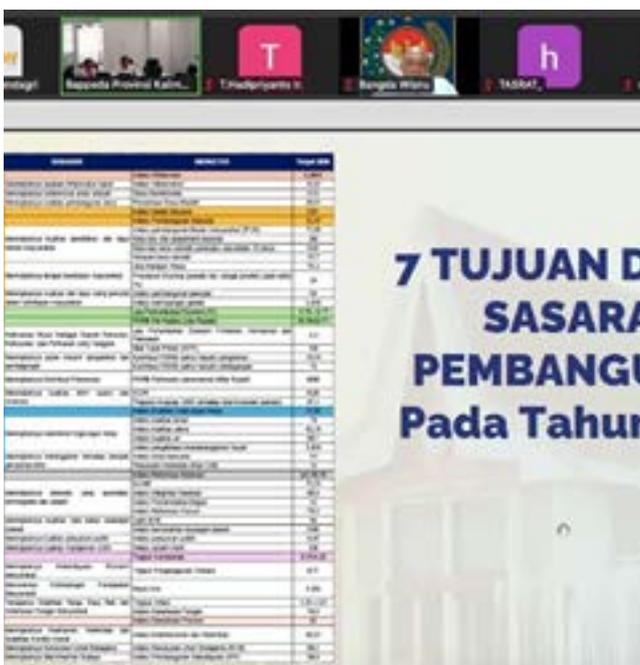
Serba Serbi Juni

Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Kalimantan Barat tahun 2026

RKPD merupakan penjabaran operasional dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan tahunan yang disusun berdasarkan RKP dan program strategis nasional. RKPD ditetapkan melalui Perkada, dan menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS. Apabila tidak ditetapkan, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa penahanan hak keuangan selama 3 bulan. Selain itu, jika program strategis nasional tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi teguran hingga pemberhentian sementara sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Terdapat 7 tujuan dan 22 sasaran pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026, yang diukur dengan indikator terukur seperti Indeks Pembangunan Manusia (75,17), Tingkat Kemiskinan (5,74%), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (47,4). Fokus utama diarahkan pada peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi berbasis potensi daerah, kualitas lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Target indikator utama pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 mencakup peningkatan usia harapan hidup menjadi 74,3 tahun, penurunan prevalensi stunting ke 20%, cakupan JKN 98,7%, dan rata-rata lama sekolah 8,04 tahun. Di bidang ekonomi, kemiskinan ditargetkan turun ke 5,75–6,25%, indeks ekonomi hijau 56,95%, dan inflasi dijaga pada 1,5–3,5%. Seluruh target ini mencerminkan fokus pada kualitas hidup, ketahanan sosial, dan tata kelola berkelanjutan.



Lokakarya Penyusunan AWP Program Skala

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) bersama Program Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation – SKALA menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Program SKALA Tahun 2025–2026, yang juga menjadi forum refleksi atas pelaksanaan kerja sama pada siklus AWP 2024–2025.

Dalam lokakarya ini, dibahas berbagai pencapaian hasil kolaborasi antara BSKDN dan SKALA yang telah dilaksanakan, khususnya pada area fokus strategis, yakni:

- Dukungan penguatan perencanaan daerah untuk pemenuhan layanan dasar yang inklusif,
- Penguatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan,
- Revisi Permendagri Nomor 17 tentang pedoman penelitian dan pengembangan (litbang),
- Penguatan kapasitas pemimpin daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- Upaya peningkatan kualitas belanja daerah.

Diskusi juga menyoroti pentingnya kesinambungan kemitraan antara BSKDN dan SKALA, terutama di tengah wacana perubahan nomenklatur BSKDN menjadi Direktorat Jenderal BUMD. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa fokus SKALA terhadap layanan dasar tetap memiliki keterkaitan erat dengan penguatan fungsi dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga kerja sama dapat terus berjalan dengan penyesuaian bentuk dukungan.

BSKDN menyampaikan bahwa Program SKALA memiliki potensi strategis dan terbukti berkontribusi dalam penguatan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah. Oleh karena itu, kesinambungan dukungan dan konsolidasi program ke depan sangat diharapkan.



Serba Serbi Juni

Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Jawa Barat tahun 2026

Rapat penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2025–2029, dengan visi “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata

Penyusunan dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media. Rencana kerja ini juga disusun dengan mengintegrasikan pendekatan spasial dan a-spasial melalui enam wilayah pengembangan, serta memanfaatkan digitalisasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis e-planning melalui SIPD.

Proses penyusunan diawali dengan Kick Off Meeting pada Desember 2024, dilanjutkan Rakortekrenbang 2025, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten/Kota, Pra-Musrenbang Provinsi, hingga Musrenbang Provinsi. Seluruh tahapan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak dan menyelaraskan program, kegiatan, serta sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, hingga skema alternatif lainnya seperti KPBU dan CSR.



CATATAN PENUTUP

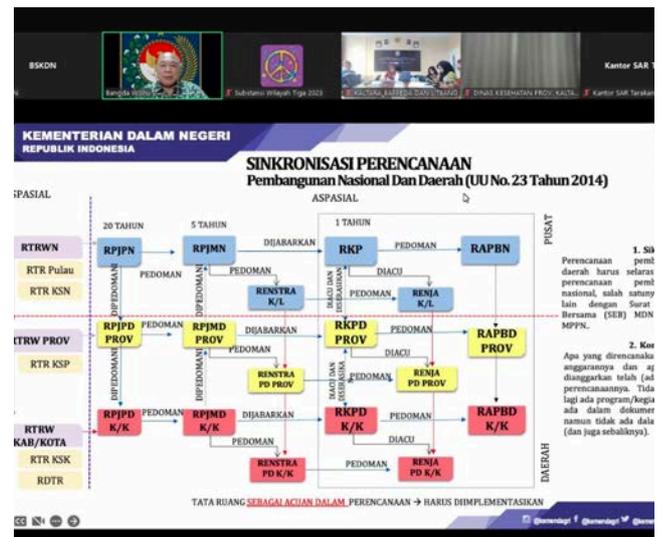
- Pada RKPD, perlu mengakomodasi program Direksi Presiden**, termasuk pengelolaan sampah, digitalisasi pendidikan, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Rancangan RKP 2026.
- Arah kebijakan kewilayahan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan perlu selaras dengan Arah Kebijakan Kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Rancangan RKP 2026**, mencakup:
 - Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin** di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, dan Kab. Tanah Laut;
 - Kawasan Pertumbuhan Industri Baru** di Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru;
 - Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu** di Kab. Barito Kuala, Kab. Banjar, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, dan Kab. Tabalong;
 - Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP) Agropolitan** di Kab. Tanah Bumbu, **KPP Agrowisata Hortikultura** di Kab. Tabalong, **KPP Agrominapolitan** di Kab. Banjar;
 - Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru** di Kab. Barito Kuala;
 - Kawasan Pegunungan Meratus** di Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Tabalong, Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Kotabaru, dan Kab. Tapin.
- Perlu adanya penyalarsan indikator makro pada RKPD dengan Rancangan RKP 2026** sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Kalimantan Utara tahun 2026

Rapat pembahasan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan tahunan pembangunan daerah yang strategis, karena menjadi implementasi tahun pertama RPJMD 2025–2029. Penyusunan RKPD ini dilakukan dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah dengan tetap mengacu pada visi, misi, dan program prioritas gubernur terpilih.

Proses penyusunan dilaksanakan secara partisipatif dan integratif melalui pendekatan teknokratis, politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta mempertimbangkan pendekatan holistik-tematik, spasial, dan kewilayahan. Selain mengacu pada RKP dan program strategis nasional, dokumen ini juga didasarkan pada evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan berbagai isu aktual.

RKPD 2026 diarahkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan dokumen penganggaran, serta menjadi acuan pembangunan di kabupaten/kota. Melalui dokumen ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan di Kalimantan Utara lebih terintegrasi dan selaras dengan target pembangunan nasional.



Serba Serbi Juni

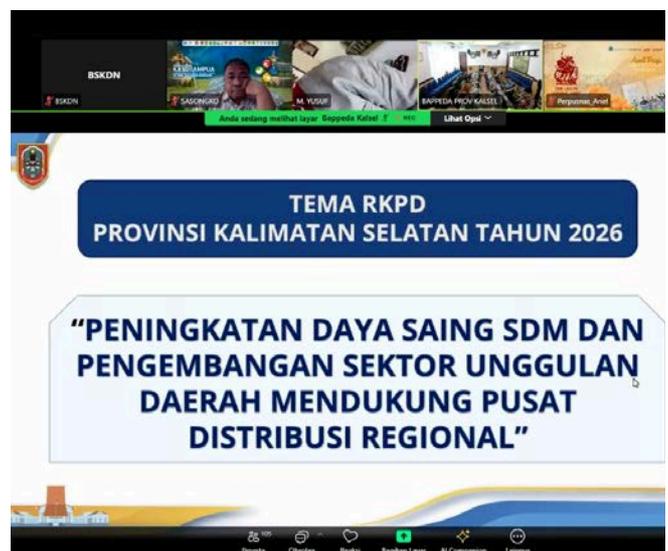
Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Kalimantan Selatan tahun 2026

Rapat pembahasan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyusunan dokumen tahunan pembangunan daerah yang menjadi penjabaran awal dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi antara top-down dan bottom-up.

Substansi dokumen dirancang secara holistik-tematik, integratif, dan spasial dengan memperhatikan keselarasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, program strategis nasional, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam proses penyusunannya, dilakukan berbagai forum partisipatif, termasuk forum konsultasi publik dan Musrenbang, untuk mengidentifikasi isu strategis, prioritas pembangunan, dan rencana pendanaan. Tema pembangunan 2026 difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan berdaya saing.

Rapat fasilitasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 tersusun secara komprehensif dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.





Lokakarya Penyusunan AWP Program Skala

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Program SKALA Tahun Anggaran 2025–2026 yang diselenggarakan di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta, pada pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim SKALA, Bapak Petra, dan dihadiri oleh perwakilan teknis dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Lokakarya ini bertujuan untuk memperkuat arah dan sinergi program kerja SKALA bersama Kemendagri dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah-wilayah prioritas. BSKDN dalam forum ini menyepakati sejumlah fokus dukungan yang akan dilaksanakan bersama SKALA untuk tahun anggaran mendatang, yaitu:

- Fasilitasi teknis penguatan kapasitas jabatan fungsional analis kebijakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang inklusif dan berbasis data;
- Fasilitasi teknis penguatan kapasitas pimpinan daerah.

- Fasilitasi pertukaran dan pemanfaatan pengetahuan dan inovasi daerah, khususnya terkait praktik baik layanan dasar di daerah.

Dalam rapat, turut dibahas rencana perubahan kelembagaan di Kemendagri, yang memungkinkan terjadinya pergeseran koordinasi program. Beberapa output kerja sama yang semula direncanakan untuk BSKDN, ke depan akan diarahkan kepada Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusfasker) sebagai koordinator kerja sama antar-lembaga, apabila perubahan nomenklatur resmi diberlakukan.

Bagian Perencanaan BSKDN menegaskan kesiapannya untuk terus mengawal pelaksanaan kerja sama dan menjaga keberlanjutan program walaupun terdapat dinamika perubahan kelembagaan. Komitmen ini menjadi bagian dari kontribusi strategis BSKDN dalam mendukung tata kelola kebijakan daerah yang lebih inklusif, adaptif, dan berdampak nyata.

Serba Serbi Juni

Seminar Analisis Sinergitas Digital Dalam Mendukung Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha

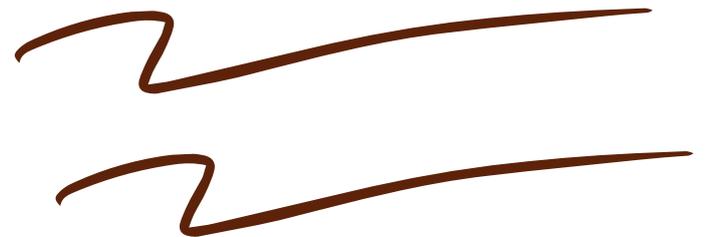
Dalam rangka memperkuat sinergitas kebijakan tata ruang dan pelayanan perizinan berusaha, telah diselenggarakan Seminar Analisis Sinergitas Digital Dalam Mendukung Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha, dengan fokus pada Integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital untuk Daya Saing Investasi Daerah.

Seminar ini mengungkap bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki RDTR yang terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam kelancaran proses perizinan berusaha di daerah, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya daya tarik investasi dan efektivitas pelayanan perizinan.



Penyusunan dan integrasi RDTR secara digital disebut sangat bergantung pada komitmen kepala daerah, yang kemudian ditentukan pula oleh kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di daerah dalam memahami dan menyampaikan urgensi tata ruang sebagai bagian penting dari perizinan usaha. Peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penyusunan RDTR.

Dalam diskusi juga ditekankan bahwa birokrasi perizinan di Indonesia masih mengalami hambatan berupa tumpang tindih regulasi, ketidakpastian lokasi usaha, serta keterbatasan akses terhadap informasi tata ruang. RDTR Digital diharapkan menjadi solusi strategis yang mampu menyederhanakan proses birokrasi, memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, serta menjembatani antara dokumen perencanaan tata ruang dan implementasi kegiatan usaha di lapangan.



Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Bangka Belitung tahun 2025

Dokumen RKPD ini merupakan turunan langsung dari RPJMD 2025–2029 yang bertajuk Babel Berdaya 2029, yang menargetkan pembangunan mandiri dan berkelanjutan melalui ekonomi biru, pariwisata berkualitas, serta penguatan tata kelola daerah.

Pemerintah daerah juga melakukan revisi untuk menyesuaikan visi-misi kepala daerah serta prioritas nasional seperti pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM. Revisi ini dibahas dalam forum Perubahan RKPD pada Mei 2025 dan disertai perubahan APBD TA 2025.

RKPD Bangka Belitung 2025 menjadi landasan strategis untuk memperkuat pilar ekonomi inklusif, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat sumber daya manusia, sekaligus mencerminkan sinergi antara program daerah dan prioritas nasional.



PENDAHULUAN

VISI RPJMD
BABEL BERDAYA 2029
MEWUJUDKAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG YANG BERDAYA SAING, BERBUDAYA, MANDIRI DAN SEJAHTERA

MISI :

- Masyarakat Berdaya dan Berbudaya**
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, serta Kesehatan (PN4) serta Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial Budaya (PN1, PN3, PN6 dan PNB)
- Pemerintah Berdaya dan Terpercaya**
Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya (PN 7)
- Babel Berdaya Ekonomi dan Berdaya Saing**
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian (PN 2, PN3, PN5 dan PN6) dan Mengelola Sumber Daya secara Bijak dan Berkelanjutan (PN 2, PN3)

VISI RPJMN:
BERSAMA INDONESIA MAJU
MENUJU INDONESIA EMAS 2045
8 MISI/ASTA CITA = PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang

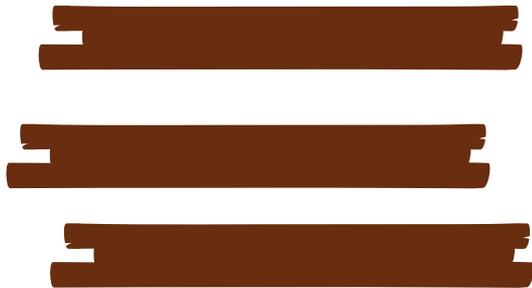
Serba Serbi Juni

Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Sulawesi Tenggara tahun 2026

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dengan basis Renja Perangkat Daerah yang sebelumnya dibahas secara intensif dalam forum Musrenbang tingkat provinsi serta Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029, yang berlangsung di Kota Baubau. Gubernur Sultra memimpin penyusunan ini sebagai momen strategis untuk menyelaraskan visi daerah dan pusat demi pencapaian pembangunan yang konkret, dengan penekanan pada solusi berbasis data, output terukur, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer

Forum lintas perangkat daerah ini juga menegaskan pentingnya sinergi antarsekto terutama dalam pelayanan publik, penanganan bencana, dan koordinasi regulasi sebagai fondasi RKPD 2026 serta basis dalam penyusunan APBD tahun berjalan

RKPD 2026 menjadi pijakan utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperluas basis PAD, yang kemudian akan dikawal ketat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran yang terukur dalam APBD.



Rapat fasilitasi rancangan peraturan gubernur tentang RKPD Bali tahun 2026

edoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 didasarkan pada regulasi-regulasi utama seperti Permendagri 10/2025, Permendagri 86/2017, Permendagri 90/2019 (dan Kepmendagri Pemutakhiran Nomenklatur), Permendagri 70/2019, Permen Bappenas 3/2025, serta memperhatikan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah (RTRW, RPJPD, RPJMD), serta kondisi dan aspirasi masyarakat tahun 2025 untuk menentukan prioritas pembangunan daerah.

Realisasi Makro Pembangunan Provinsi Bali 2018–2024 menunjukkan pemulihan signifikan pasca-pandemi, dengan pertumbuhan ekonomi 5,71% pada 2023 dan target 2026 sebesar 6,00–6,50%; penurunan persentase penduduk miskin menjadi 3,80% di 2024 (target 3,00–3,50%); peningkatan IPM mencapai 78,63 (target 78,94); penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 1,79% (target 1,80–2,30%); serta perbaikan gini rasio ke angka 0,348 (target 0,340–0,345), mencerminkan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali diarahkan pada transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi melalui 6 strategi utama: Bali Sehat dan Pintar, Bali Produktif, Bali Smart Island, Bali Hijau, Bali Terintegrasi, dan Bali Kondusif dan Berintegritas—dengan fokus pada penguatan SDM, digitalisasi, inovasi, konektivitas, ekonomi hijau, serta reformasi tata kelola pembangunan.



Literasi Perencanaan



Perencanaan adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa depan, serta menetapkan berbagai langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Perencanaan menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan, baik dalam lingkup individu, organisasi, bisnis, maupun pemerintahan.

Perencanaan dalam pemerintahan dalam negeri adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan ini mencakup penentuan visi, misi, sasaran, serta alokasi sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Bagian Perencanaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri umumnya berfungsi untuk merumuskan, merencanakan, dan mengoordinasikan kebijakan - kebijakan strategis yang berkaitan dengan urusan dalam negeri. TUSI Bagren di atur dalam Permendagri 137 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri

Hal tersebut diatur dalam Pasal 701 Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penataan sistem dan prosedur, sistem pengendalian intern pemerintah serta penyusunan laporan kinerja evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama, dan penyiapan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 702 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- penyiapan bahan dan pengelolaan data dan informasi, monitoring program dan anggaran, evaluasi kinerja serta sistem pengendalian intern pemerintah;
- penataan sistem dan prosedur, serta penyusunan laporan kinerja; dan
- penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama, serta fasilitasi penyusunan peraturan perundang - undangan dan produk hukum.



Menjaga Fungsi Strategic Policy Making di Kementerian Dalam Negeri: Urgensi Pasca Reposisi BSKDN Menjadi Ditjen BUMD

Tomy Veryanto Bawulang & Tito Dwian Maulana

Transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berlangsung sebagai respons terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan strategis nasional. Salah satu perubahan signifikan adalah rencana reposisi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menjadi Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (Ditjen BUMD). BSKDN sendiri merupakan kelanjutan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang mengalami transformasi setelah pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mengonsolidasikan seluruh fungsi penelitian dan sumber daya peneliti dari kementerian/lembaga. Dalam konteks itu, BSKDN didirikan untuk mengisi celah kebijakan pasca pengalihan fungsi riset ke BRIN, dengan memperkuat fungsi strategic policy analysis yang berbasis pada evidence, rekomendasi, dan pengembangan kelembagaan.

Berbeda dengan BPP yang berfokus pada kegiatan penelitian, BSKDN mengedepankan pendekatan policy advisory yang bersifat teknokratis dan strategis. Fungsi ini penting karena membantu pimpinan Kemendagri dalam merumuskan kebijakan berbasis analisis

data, tren regional, dan proyeksi kebutuhan masa depan. Sejalan dengan pandangan OECD (2010), lembaga pemerintah memerlukan unit strategic policy making internal agar dapat merespons isu kompleks secara adaptif dan lintas sektor. Dalam laporan Bank Dunia (2017), disebutkan bahwa kelembagaan semacam ini diperlukan untuk meningkatkan kohesi kebijakan, menghindari silo antar unit, dan memperkuat kapasitas perencanaan jangka menengah. BSKDN memainkan peran tersebut dalam konteks tata kelola internal Kemendagri dan pembinaan daerah.

Reposisi BSKDN menjadi Ditjen BUMD memang menjawab kebutuhan mendesak Kemendagri untuk memiliki unit eselon I yang fokus pada pembinaan dan pengawasan BUMD, terutama dalam mendorong BUMD sebagai motor ekonomi daerah. Namun, langkah ini juga berpotensi menghilangkan satu-satunya unit kerja yang secara fungsional berperan sebagai organizational development dan penghasil masukan kebijakan strategis di tubuh Kemendagri. Jika tidak ada pengganti fungsi tersebut, Kemendagri berisiko kehilangan kapasitas internal dalam menyusun dan mengawal kebijakan strategis lintas direk-

-torat dan bidang. Padahal, dalam ekosistem birokrasi modern, fungsi think tank atau policy strategy unit sangat krusial dalam mendukung efektivitas organisasi, seperti ditunjukkan oleh Centre for Strategic Futures (CSF) di Singapura maupun Policy Lab di Inggris.

Di tengah meningkatnya kompleksitas tata kelola pemerintahan dan tuntutan akuntabilitas publik, keberadaan unit yang berfungsi sebagai strategic policy unit menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Tanpa lembaga seperti BSKDN atau penggantinya, Kemendagri akan kekurangan sumber internal untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap isu saat ini, tetapi juga visioner dalam menjawab tantangan masa depan. Seiring dengan reformasi birokrasi tematik yang dicanangkan oleh Kemenpan-RB dan Bappenas, penguatan fungsi kelembagaan berbasis strategi kebijakan menjadi agenda prioritas untuk memastikan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya desain kelembagaan baru yang mampu melanjutkan dan memperkuat fungsi strategic policy making di lingkungan Kemendagri pasca reposisi BSKDN.

Urgensi Menjaga Fungsi Strategic Policy Making di Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat yang sangat luas dan kompleks, mulai dari pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan kependudukan, hingga fasilitasi hubungan pusat dan daerah. Dalam konteks tersebut, keberadaan fungsi strategic policy making menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat responsif, tetapi

juga antisipatif dan berbasis data. Fungsi ini hanya dapat dijalankan secara optimal apabila ada unit yang memiliki kapasitas khusus dalam melakukan kajian lintas sektor, menganalisis dampak kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang relevan kepada pimpinan. Kehilangan fungsi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi arah kebijakan antar unit eselon I, serta mengurangi efektivitas koordinasi dan konsistensi kebijakan Kemendagri dengan pemerintah daerah.

Fungsi perumusan kebijakan strategis bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan elemen kunci dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy making). Studi dari World Bank (2017) menegaskan bahwa lembaga pembuat kebijakan yang efektif harus memiliki policy unit internal yang mampu menerjemahkan visi politik menjadi kerangka kebijakan yang implementatif dan terukur. Tanpa fungsi ini, kementerian cenderung hanya mengelola program yang bersifat jangka pendek tanpa analisis mendalam atas dampaknya. Dalam konteks Kemendagri, keberadaan unit strategis seperti BSKDN memungkinkan kementerian menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam isu-isu lintas sektoral seperti penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, penguatan otonomi daerah, hingga tata kelola digital pemerintahan.

Lebih jauh, fungsi strategic policy making juga berperan sebagai katalis bagi inovasi birokrasi. Kementerian yang memiliki think-tank internal lebih mampu mengidentifikasi area reformasi, mengusulkan desain kelembagaan yang adaptif, serta mengembangkan model-model tata kelola baru berbasis praktik baik. Di sejumlah negara, seperti Australia dan Korea S-

-elatan policy strategy unit tidak hanya berfungsi sebagai penyusun analisis kebijakan, tetapi juga sebagai pusat inovasi kelembagaan (organizational innovation hub). Dengan semakin kompleksnya permasalahan lintas daerah seperti migrasi penduduk, ketimpangan fiskal, hingga krisis iklim, peran unit seperti ini menjadi tak tergantikan dalam mengintegrasikan berbagai perspektif kebijakan yang terfragmentasi.

Akhirnya, dalam kerangka reformasi birokrasi nasional yang mengarah pada tata kelola yang agile, digital, dan berbasis kinerja, Kemendagri membutuhkan mekanisme internal untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan jangka menengah dan panjang. Tanpa entitas seperti BSKDN atau bentuk barunya, Kemendagri akan kekurangan pusat pemikiran strategis yang dapat menjadi jembatan antara pengetahuan teknis, agenda pembangunan nasional, dan kebutuhan lokal. Keberadaan fungsi ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga kualitas kebijakan, tetapi juga untuk memastikan ketahanan kelembagaan Kemendagri di tengah dinamika yang terus berubah.

Analisis Masalah dan Tantangan yang Dihadapi

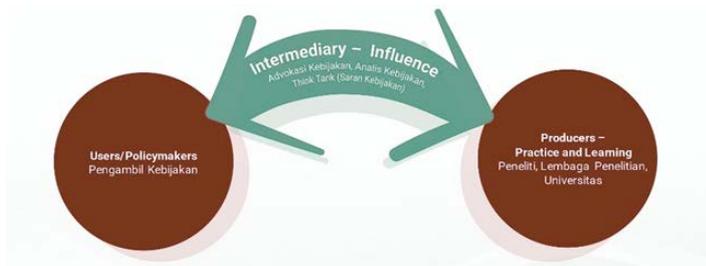
Reposisi BSKDN menjadi Ditjen BUMD menciptakan kekosongan struktural terhadap fungsi perumusan kebijakan strategis dan pengembangan organisasi di lingkungan Kemendagri. Ditjen BUMD sebagai unit baru akan memiliki fokus utama pada pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, yang secara alami lebih bersifat teknis dan sektoral. Hal ini berbeda secara karakteristik dengan peran BSKDN yang selama ini mengintegrasikan is-

-u-isu lintas sektor dan menghasilkan rekomendasi berbasis kajian kebijakan menyeluruh. Ketidakhadiran unit khusus yang menjalankan fungsi strategic policy making secara langsung menimbulkan risiko kelembagaan, yaitu menurunnya kapasitas Kemendagri untuk memproduksi rekomendasi kebijakan lintas bidang yang holistik dan adaptif.

Tantangan lain yang muncul adalah potensi melemahnya koordinasi lintas direktorat jenderal dan unit kerja di Kemendagri dalam menghasilkan kebijakan yang terintegrasi. Tanpa adanya satu unit penggerak dan penghubung kebijakan lintas sektor seperti BSKDN, maka masing-masing direktorat cenderung bekerja dalam silo, dengan agenda sektoral yang belum tentu selaras dengan tujuan strategis kementerian secara keseluruhan. Hal ini berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi tematik yang mendorong pendekatan terpadu, kolaboratif, dan berbasis hasil. Selain itu, kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengoreksi arah kebijakan berbasis data juga menjadi terbatas, karena tidak ada entitas yang bertugas melakukan policy feedback loop secara sistematis.

Selain tantangan struktural, terdapat pula tantangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dengan berubahnya fungsi dan nomenklatur BSKDN, SDM yang memiliki kapasitas dalam bidang analisis kebijakan, perumusan rekomendasi strategis, serta pengembangan kelembagaan dapat tersebar ke unit-unit teknis yang tidak lagi memiliki mandat pengembangan kebijakan lintas sektor. Padahal, berdasarkan pengalaman di banyak negara, keberhasilan unit policy advisory sang-

-at tergantung pada keberlanjutan kompetensi dan budaya berpikir strategis dalam institusi tersebut (OECD, 2015). Jika tidak ada kebijakan transisi kelembagaan yang tepat, maka pengetahuan institusional (institutional memory) dan jaringan kerja sama strategis yang telah dibangun oleh BSKDN berpotensi hilang atau tidak termanfaatkan secara optimal.



Terakhir, tantangan politik dan birokratis juga perlu dicermati. Pembentukan lembaga baru atau pelestarian fungsi strategis seringkali menghadapi resistensi karena dianggap menambah struktur atau tumpang tindih kewenangan. Padahal, dalam kerangka adaptive governance, justru dibutuhkan entitas yang mampu menjadi policy broker dan strategic integrator di dalam birokrasi. Tanpa adanya argumentasi dan desain kelembagaan yang meyakinkan, upaya mempertahankan fungsi think tank internal berisiko tidak mendapatkan dukungan yang memadai secara politik maupun administratif. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan langkah ke depan yang bersifat adaptif, efisien secara struktur, namun tetap menjamin keberlangsungan fungsi strategis ini di tubuh Kemendagri.

Pembelajaran dan Praktik Baik (Best Practices)

Pengalaman dari kementerian dan lembaga di dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa fungsi strategic policy making yang diletakkan secara khusus dalam satu unit atau

lembaga internal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kualitas kebijakan publik. Di Indonesia, beberapa kementerian tetap mempertahankan fungsi perumusan kebijakan strategis pasca pengalihan fungsi penelitian ke BRIN, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Kebijakan Kesehatan. Unit ini tidak lagi menjalankan penelitian mendalam seperti sebelumnya, tetapi bertransformasi menjadi lembaga penyusun kebijakan yang mengintegrasikan hasil kajian, data sektoral, dan masukan pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan kebijakan Kemenkes tetap berbasis evidence dan relevan terhadap tantangan kontemporer, termasuk dalam penanganan pandemi dan transformasi sistem kesehatan nasional.

Contoh lain dapat ditemukan pada Kementerian Hukum dan HAM yang mempertahankan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM sebagai pusat kebijakan sektoral yang menyokong proses legislasi dan penyusunan regulasi. Dengan dukungan kapasitas analisis yang kuat dan pelibatan akademisi, unit ini memainkan peran strategis dalam merancang intervensi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Praktik serupa juga dapat dilihat di Kementerian Keuangan melalui Pusat Kebijakan APBN yang terus berperan sebagai pusat desain kebijakan fiskal, meskipun tidak menjalankan riset dalam pengertian akademik konvensional.

Di tingkat internasional, Singapura memiliki Centre for Strategic Futures (CSF) yang berfungsi sebagai unit internal untuk mengembangkan pemikiran jangka panjang, mengantisipasi perubahan lingkungan strategis

dan menyampaikan masukan kebijakan kepada pimpinan pemerintah. CSF bukan hanya melakukan analisis tren dan disrupsi global, tetapi juga berperan sebagai penghubung lintas kementerian dalam isu-isu kebijakan yang kompleks. Sementara itu, Policy Lab di Inggris berada di bawah Cabinet Office dan berperan menyatukan design thinking, behavioural insight, dan analisis kebijakan untuk menghasilkan solusi lintas sektor secara inovatif. Model-model seperti ini menunjukkan bahwa keberadaan unit strategi kebijakan yang gesit dan terintegrasi justru memperkuat ketahanan kelembagaan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian.

Pelajaran penting dari berbagai contoh di atas adalah bahwa fungsi strategic policy making tidak selalu harus berada dalam bentuk badan penelitian atau lembaga besar, melainkan dapat ditempatkan dalam struktur yang ramping namun memiliki mandat yang jelas, otoritas yang memadai, dan akses langsung kepada pimpinan. Kunci utamanya adalah menjaga kesinambungan analisis kebijakan berbasis data dan membangun mekanisme internal untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan lintas sektor. Kemendagri dapat mengadopsi prinsip serupa dalam merancang struktur baru pasca reposisi BSKDN, agar tetap memiliki satuan kerja yang berperan sebagai penjaga arah strategis dan integrator kebijakan di lingkungan kementerian.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjamin keberlangsungan fungsi strategic policy making di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca reposisi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menjadi Dirjen BUMD,

diperlukan langkah-langkah strategis dan kelembagaan yang terencana. Tanpa langkah ini, Kemendagri berisiko kehilangan salah satu elemen penting dalam proses penyusunan kebijakan yang holistik dan lintas sektor. Berikut ini adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

Pembentukan Unit Pengembang Strategi Kebijakan di Setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I)

Setiap UKE I di lingkungan Kemendagri, baik yang bersifat teknis maupun pembinaan, perlu memiliki unit internal yang secara khusus bertugas menyusun rekomendasi strategis berbasis data dan masukan teknis untuk memperkuat kebijakan sektoral masing-masing direktorat jenderal. Unit ini dapat berbentuk subbagian, subkoordinator, atau kelompok kerja yang berfungsi sebagai strategic policy advisor bagi pimpinan direktorat jenderal atau badan. Dengan model ini, fungsi pengembangan kebijakan tidak semata menjadi tugas perorangan atau ad hoc, tetapi melembaga dalam struktur organisasi yang mampu mengakomodasi dinamika isu sektoral. Keberadaan unit semacam ini juga akan mendorong budaya kerja yang lebih reflektif, terukur, dan berbasis evaluasi kebijakan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi berbasis hasil (result-oriented bureaucracy).

Pembentukan Unit Koordinatif di Bawah Sekretariat Jenderal Kemendagri

Mengingat perlunya orkestrasi dan konsistensi kebijakan di seluruh komponen Kemendagri, disarankan untuk membentuk satu unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal yang berfungsi sebagai koordinator, pengendali mutu, dan

policy integrator. Unit ini dapat diberi mandat untuk memfasilitasi forum kebijakan strategis lintas UKE I, menyusun pedoman perumusan kebijakan internal, serta mengonsolidasikan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pimpinan kementerian. Keberadaan unit ini juga penting sebagai policy memory institusional dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan lintas periode dan sektor.

Membangun Mekanisme Konsultasi dan Evaluasi Kebijakan Secara Berkala

Untuk menjaga relevansi kebijakan dengan dinamika nasional dan lokal, Kemendagri perlu membangun sistem konsultasi kebijakan yang melibatkan para ahli, akademisi, dan pemerintah daerah secara berkala. Unit-unit pengembang strategi kebijakan di setiap UKE I dapat berkolaborasi dalam forum analisis kebijakan internal yang dimotori oleh unit koordinator di bawah Setjen. Praktik ini akan memperkuat integrasi kebijakan sekaligus mendorong budaya evidence-based policy making di seluruh lini kementerian.

Menjamin Keberlanjutan Kapasitas SDM Analis Kebijakan dan Strategis

Untuk mendukung efektivitas rekomendasi di atas, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan analisis kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan tata kelola pemerintahan. Rekrutmen dan pengembangan karier jabatan fungsional analis kebijakan juga harus diprioritaskan agar setiap unit memiliki kapasitas teknokratik yang memadai untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan secara sistematis.

Mengintegrasikan Sistem Informasi Pendukung Kebijakan

Diperlukan infrastruktur digital yang mendukung kerja-kerja perumusan kebijakan strategis, seperti dashboard kebijakan tematik, sistem pemantauan isu strategis daerah, serta basis data rekomendasi kebijakan sektoral. Sistem ini menjadi alat bantu bagi setiap unit kerja dalam mengambil keputusan yang berbasis data dan mencegah tumpang tindih kebijakan antar direktorat.

Kesimpulan

Reposisi BSKDN menjadi Ditjen BUMD adalah langkah strategis untuk memperkuat pembinaan BUMD, namun berisiko menghilangkan fungsi strategic policy maker yang krusial bagi Kemendagri. Tanpa fungsi ini, Kemendagri akan kekurangan kapasitas menyusun kebijakan lintas sektor secara terintegrasi dan berbasis data. Karena itu, perlu dibentuk unit pengembang strategi di setiap UKE I serta satu unit koordinator di bawah Sekjen sebagai integrator kebijakan. Dengan begitu, perubahan struktur tetap menjamin Kemendagri memiliki kekuatan kelembagaan untuk merumuskan kebijakan yang strategis, adaptif, dan visioner dalam jangka panjang.

Tomy Veryanto Bawulang merupakan Dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta serta Direktur Eksekutif The Center for Strategic Leadership and Innovative Governance.

Tito Dwian Maulana merupakan Statistisi pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mencari Titik Equilibrium Demokrasi Indonesia

Tomy Veryanto Bawulang

Belum lama ini, Presiden Prabowo menggulirkan satu isu yang cukup menarik perhatian publik yakni pemilihan Kepala Daerah dikembalikan seperti pada Jaman Orde Baru: Dipilih DPRD!

Argumen utama yang disampaikan Presiden Prabowo dan juga sebagian besar koalisinya adalah karena mahalnya biaya kontestasi Pilkada sehingga demi efisiensi anggaran, Pilkada 'disederhanakan' melalui mekanisme dipilih DPRD. Tapi publik dengan pengalaman masa lalu dan memori kolektifnya tentang sistem pemilihan yang pernah dilakukan di Indonesia kemudian bertanya, Benarkah Pilkada melalui DPRD akan lebih murah ? atau hanya memindahkan lokus transaksi dari transaksi yang tersebar luas ke publik menjadi transaksi politik elitis? Butuh pembuktian empiris untuk bisa menjawab ini dan tentu saja ini tidak mudah. Mengapa? Karena transaksi 'vote buying' pada tataran elit akan sangat sulit dibuktikan. Sama seperti sulitnya membuktikan kasus kasus penyuapan. Semua orang tahu ada yang sedang terjadi namun sulit untuk mendapatkan buktinya.



Ibarat menangkap pelaku kentut yang tak berbunyi. Semua orang tahu ada yang kentut tapi pembuktian 'menangkap kentut' sebagai alat bukti tentu saja mustahil. Kecuali pelakunya mengaku! Dalam konteks politik uang, tentu saja berharap para pelakunya mengaku adalah hal yang sama mustahilnya. Lantas, bagaimana sebaiknya model Pemilihan Kepala Daerah kita? Saya berpandangan bahwa sebagai sebuah bangsa yang masih tergolong 'belia' dalam berdemokrasi terutama jika dibandingkan dengan negara negara seperti Yunani (sejak kira kira tahun 507 sebelum masehi), Amerika (sejak tahun 1776), atau Perancis (sejak tahun 1789), Demokrasi Indonesia terutama sistem dan rezim Pemilukada nya butuh proses maturasi untuk benar benar menemukan jatidiri demokrasinya.



Sejatinya, demokrasi substansial adalah tentang demokrasi yang berakar pada konteks dan jatidiri bangsa kita sendiri bukan sebagai jiplakan konsep impor yang harus kita aplikasikan tanpa adaptasi. Proses maturasi ini butuh waktu dan tidak mudah. Dalam proses itu, kita butuh menemukan sebuah titik keseimbangan: Equilibrium!



Mencari Titik Equilibrium

Beberapa waktu yang lalu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan berap seri diskusi bersama beberapa organisasi pemerhati Pemilu dan Sistem Politik seperti Perludem, JPPR, beberapa lembaga survey serta para akademisi, Kami mencoba duduk bersama untuk mencari formulasi yang tepat untuk sistem Pemilu /Pemilukada di Indonesia yang ujung nya nanti adalah revisi UU Pemilu. Tidak mudah memang, karena setiap lembaga dan kelompok memiliki perspektif yang berbeda. Jika dikelompokkan dalam satu deretan kontinum maka ada tiga kelompok besar dalam perdebatan dan diskursus tentang demokrasi dan sistem pemilihan di Indonesia. Mari kita kenali tiga kelompok tersebut.

Kelompok pertama adalah kelompok yang saya sebut 'puritan demokrasi' yang menganut asas bahwa demokrasi tidak sekadar sebuah sistem pemerintahan, melainkan sebuah cara hidup yang bertumpu pada kebajikan moral dan keterlibatan warga negara yang aktif. Kelompok dalam tradisi ini percaya bahwa demokrasi yang sejati hanya bisa tercapai jika masyarakat memiliki nilai-nilai bersama dan tujuan kolektif yang jelas.



Filsuf dan tokoh utama yang menjadi inspirasi kelompok ini barangkali adalah Jean-Jacques Rousseau yang dikenal dengan gagasan tentang *volonté générale*, yaitu bahwa demokrasi harus mencerminkan kepentingan kolektif, bukan sekadar penjumlahan kepentingan individual. Dalam pandangannya, partisipasi politik bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral yang harus dijalankan setiap warga negara demi mencapai tatanan sosial yang adil.

Negara harus berperan dalam membentuk karakter warganya agar sesuai dengan nilai-nilai yang mendukung kehidupan demokratis. Tidak heran, kelompok puritanisme ini cenderung mencurigai individualisme yang berlebihan dan melihat demokrasi sebagai sebuah pendidikan politik yang berkelanjutan.

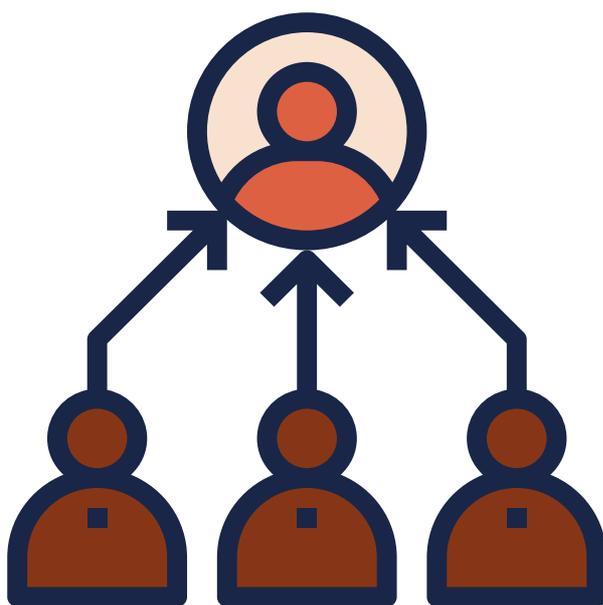
Dalam model demokrasi puritan, pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga dianggap sebagai sarana untuk mencapai kehendak umum dan membentuk warga negara yang berbudi luhur. Oleh karena itu, sistem pemilu dalam model ini mendorong partai politik berbasis ideologi yang kuat, bukan sekadar kompetisi kandidat individu. Model ini sering menggunakan sistem pemilu mayoritarian atau sistem campuran untuk memastikan stabilitas dan kepemimpinan yang kuat.

Swiss adalah salah satu negara yang mengadopsi prinsip puritanisme ini. Swiss mengadopsi demokrasi langsung, di mana warga sering kali diminta untuk ikut serta dalam referendum untuk memutuskan berbagai kebijakan penting, bukan hanya memilih wakil rakyat.



Contoh yang agak ekstrim tentang keseragaman nilai moral dalam demokrasi puritanisme Praktekkan oleh Iran. Meskipun memiliki elemen demokrasi dalam pemilu legislatif dan eksekutif, Iran juga menekankan nilai-nilai moral tertentu dalam proses pemilunya. Hanya kandidat yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang diizinkan bertarung dalam pemilu, mencerminkan unsur demokrasi puritan yang membatasi pluralisme demi kesatuan moral.

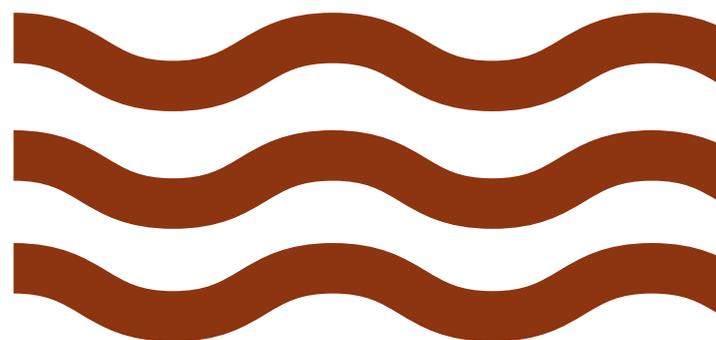
Apakah model ini relevan dengan Indonesia? Tentu saja tidak karena model ini bisa menjadi kurang fleksibel karena cenderung membatasi pilihan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dominan. Meski dari sisi tingkat partisipasi mungkin bisa tinggi karena partisipasi bisa 'dipaksakan', namun model ini cenderung membatasi keberagaman pandangan. Jika demokrasi terlalu menekankan keseragaman moral, bagaimana nasib mereka yang memiliki pandangan berbeda? Ini adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh demokrasi puritan.



Kelompok kedua adalah kelompok yang saya sebut “Demokrasi Prosedural”

Berbeda dengan demokrasi puritan yang menekankan nilai-nilai moral dan kebajikan warga, model demokrasi prosedural lebih fokus pada aturan-aturan yang memastikan keadilan dan kestabilan politik. Demokrasi dalam pandangan ini bukanlah tentang mencapai kesepakatan moral, melainkan tentang menciptakan mekanisme yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan tanpa perlu memiliki nilai yang seragam.

Keriuhan penyelenggaraan kontestasi politik baik Pilpres maupun Pilkada yang barusan selesai di selenggarakan sepertinya membuat sebagian besar orang hari ini merasa perlu untuk berfokus pada ‘prosedur’ pelaksanaan kontestasi pemilunya. Ini terbukti dalam series diskusi yang saya ikuti, sebagian besar topik diskusi akhirnya terjebak dan berfokus pada ‘demokrasi prosedural’ meskipun secara sadar, konsensus para peserta diawal sepakat untuk berfokus pada ‘demokrasi substansial’; pada kenyataanya, diskusi diskusi tentang demokrasi dan sistem politik dan rezim Pemilu hari ini tidak bisa menghindari dari demokrasi prosedural. Dengan kata lain, demokrasi adalah kontestasi politik.



Pandangan demokrasi prosedural ini barangkali diadopsi dari pemikiran Joseph Schumpeter, seorang ekonom dan filsuf politik abad ke-20 yang berpendapat bahwa demokrasi seharusnya dipahami sebagai kompetisi di antara para elit politik untuk mendapatkan suara rakyat. Dalam pandangannya, demokrasi bukanlah soal keterlibatan aktif semua warga dalam politik sehari-hari, melainkan soal memastikan adanya proses yang adil dan transparan dalam pemilihan pemimpin. Model ini cocok dengan prinsip liberalisme yang menekankan perlindungan hak-hak individu dari potensi tirani mayoritas. Namun, kelemahannya adalah bahwa demokrasi prosedural sering kali mengurangi makna demokrasi menjadi sekadar prosedur teknis, tanpa memperhatikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi.

Di dalam model demokrasi prosedural, pemilu adalah mekanisme utama untuk memilih pemimpin, tetapi demokrasi tidak bergantung pada keterlibatan aktif semua warga. Yang terpenting adalah adanya aturan yang adil, transparan, dan kompetitif yang memungkinkan setiap warga negara memilih pemimpin secara bebas. Ciri utama sistem pemilu dalam model ini adalah: Menekankan kompetisi antar kandidat dan partai dalam sistem yang terstruktur dengan baik; Menggunakan sistem pemilu proporsional atau distrik untuk memastikan representasi yang adil; Menjaga netralitas negara dalam politik, tanpa menuntut keterlibatan -

moral atau ideologis tertentu; Fokus pada mekanisme pemerintahan yang stabil dan dapat diprediksi.

Contoh Negara yang menerapkan model ini adalah Amerika Serikat dan Jerman. Amerika Serikat memiliki sistem pemilu yang kompetitif dan berbasis aturan, tetapi tidak menuntut partisipasi aktif semua warga (misalnya, pemungutan suara tidak wajib). Sistem Electoral College dalam pemilu presiden mencerminkan kepentingan menjaga stabilitas politik dan keterwakilan negara bagian.



Jerman menggunakan sistem campuran antara distrik dan proporsional, yang memungkinkan keseimbangan antara keterwakilan suara dan stabilitas politik. Sistem ini menekankan fair play dalam demokrasi, tetapi tidak mewajibkan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik sehari-hari.

Meskipun dalam pelaksanaannya model ini diklaim oleh Amerika adalah model demokrasi yang ideal, namun model ini sering kali dianggap terlalu teknokratis dan kurang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan penting. Faktanya adalah dengan sistem electoral college, kandidat dengan suara terbanyak yang memenangkan popular vote, tidak menjadi jaminan akan

jadi presiden seperti yang terjadi di tahun 2016 ketika Hillary Clinton yang adalah pemenang popular vote dengan selisih suara 2,9 juta harus menerima kekalahan dari Donald Trump yang memenangkan electoral college. Apakah model ini cocok untuk Indonesia hari ini?, Well, to some extent prinsip pembenahan prosedur sistem pemilihan kita sepertinya Yes! Layak dipertimbangkan. Namun, mengadopsi sistem representasi electoral college yang mungkin sedikit banyak akan diadopsi dalam Ide Pilkada melalui DPRD seperti yang disampaikan Presiden Prabowo sepertinya butuh banyak kajian komprehensif dan tidak harus terburu buru.

Kelompok Ketiga dalam Kontinum diskursus Demokrasi dan Pemilu adalah kelompok yang saya sebut “Demokrasi Radikal”.Kelompok ini melihat demokrasi sebagai proses yang terus-menerus berkembang, penuh konflik, dan harus selalu dikritisi. Dalam pandangan ini, demokrasi bukan hanya tentang prosedur atau nilai moral tertentu, melainkan tentang mempertanyakan siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana struktur sosial dapat diubah untuk menciptakan kesetaraan yang lebih besar.

Tokoh pemikir kelompok ini adalah Jürgen Habermas, seorang filsuf Jerman yang menggagas demokrasi deliberatif, di mana keputusan politik yang sah harus dihasilkan melalui diskusi yang rasional dan inklusif. Baginya, demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga soal bagaimana masyarakat bisa berdialog secara terbuka tanpa dominasi pihak yang lebih kuat.

Pandangan Habermas ini ditentang oleh Chantal Mouffe, seorang filsuf politik kontemporer yang berpendapat bahwa demokrasi sejati justru bukan tentang mencari konsensus, melainkan tentang mengakui bahwa konflik selalu ada dalam masyarakat. Mouffe lantas memperkenalkan konsep demokrasi agonistik, di mana demokrasi harus menjadi ruang perdebatan terus-menerus antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Pandangan demokrasi radikal ini sering kali bersinggungan dengan gerakan sosial dan kritik terhadap kapitalisme. Para pendukungnya percaya bahwa demokrasi tidak bisa hanya berhenti pada aturan-aturan prosedural, tetapi harus selalu mendorong transformasi sosial dan politik.

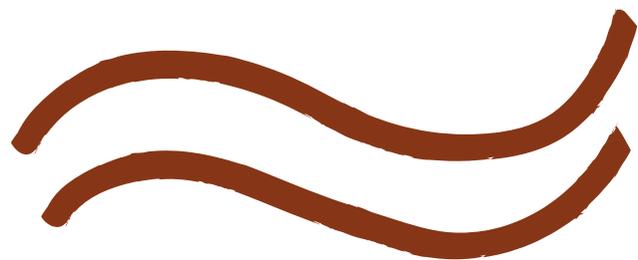
Dalam demokrasi radikal, pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang menantang sistem yang ada dan menciptakan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan. Model ini cenderung mendorong perubahan sistem politik melalui Mekanisme pemilu yang lebih fleksibel dan inklusif, seperti kuota gender atau keterwakilan kelompok minoritas; Dukungan terhadap demokrasi partisipatif, di mana gerakan sosial dan kelompok sipil memiliki peran besar dalam proses politik; Penolakan terhadap sistem pemilu yang dianggap terlalu elitis atau hanya menguntungkan kelompok tertentu; Penggunaan pemilu sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, bukan sekadar memilih wakil rakyat.



Negara yang menerapkan model ini adalah Venezuela dan Bolivia. Venezuela di bawah Hugo Chávez menerapkan demokrasi partisipatif, di mana pemilu sering kali disertai dengan mekanisme referendum dan konsultasi rakyat untuk memberikan suara dalam berbagai kebijakan ekonomi dan sosial. Meskipun sistem ini bertujuan untuk memberdayakan rakyat, ada kritik bahwa pemilu juga dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan elit tertentu.

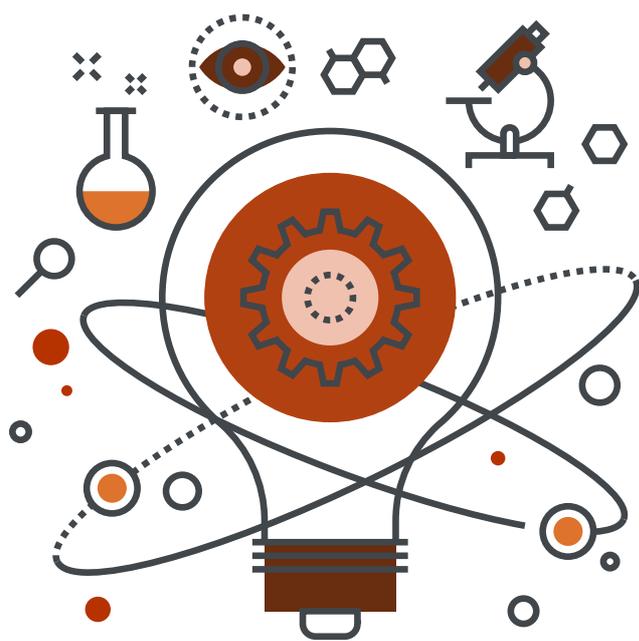
Bolivia, di bawah pemerintahan Evo Morales, menekankan keterlibatan masyarakat adat dalam pemilu dan pemerintahan. Pemilu tidak hanya dipandang sebagai cara memilih pemimpin, tetapi juga sebagai alat untuk merekognisi hak-hak kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Jika pembaca mengikuti dinamika politik tanah air dua tahun belakangan ini, maka kita akan melihat bahwa (setuju atau tidak) esensi dari konsep demokrasi radikal sebagai instrumen perubahan dan transformasi ini diperankan oleh banyak kelompok masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah teman teman tokoh dibalik film “Dirty Votes” yang sempat menghebohkan tanah air.



Meski dianggap bisa menjadi pendorong transformasi, namun tantangan dari model ini adalah bahwa demokrasi radikal bisa menciptakan ketidakstabilan jika terlalu menekankan konflik tanpa menawarkan jalan keluar yang jelas. Apakah demokrasi bisa bertahan jika terus berada dalam ketegangan dan perdebatan tanpa akhir? Ini adalah pertanyaan mendasar bagi para pendukung demokrasi radikal.

Ketiga model ini tidak harus dipahami sebagai kategori yang saling eksklusif, melainkan sebagai spektrum pemikiran yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Demokrasi puritan menekankan kebijakan bersama, tetapi berisiko menekan keberagaman. Demokrasi prosedural menjamin keadilan formal, tetapi sering kali mengabaikan ketimpangan struktural. Sementara itu, demokrasi radikal menawarkan kemungkinan transformasi sosial, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menciptakan stabilitas politik. Lantas dimana kita menemukan titik equilibrium demokrasi kita ?



Model Demokrasi Equilibrium

Saya membayangkan sebuah model demokrasi yang tidak hanya menekankan prosedur formal seperti pemilu, tetapi juga memastikan bahwa rakyat benar-benar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di satu sisi, model ini menuntut tanggung jawab moral warga negara, seperti yang ditekankan dalam demokrasi puritan. Namun, ia juga menghargai keteraturan dan stabilitas yang dihadirkan oleh demokrasi prosedural, sambil tetap membuka ruang bagi transformasi sosial dan keterlibatan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, sebagaimana ditekankan dalam demokrasi radikal.

Model ini bisa disebut sebagai Model Demokrasi Equilibrium —sebuah titik temu antara partisipasi langsung, ketertiban institusional, dan semangat inklusivitas. Dalam model ini, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang hidup bersama yang terus berkembang.

Dalam model ini, warga negara lebih dari sekadar pemilih yang datang ke TPS setiap lima tahun sekali. Mereka dilibatkan dalam berbagai forum deliberatif yang memungkinkan diskusi mendalam tentang kebijakan publik. Namun, tidak seperti demokrasi radikal yang sering kali terlalu terbuka terhadap dinamika politik yang tidak stabil, Model Demokrasi Equilibrium tetap mengandalkan sistem kelembagaan yang kokoh untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan.

Sementara itu, aspek inklusivitas dari demokrasi radikal tetap dijaga. Kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan suara kelompok-kelompok minoritas yang sering kali terpinggirkan dalam sistem demokrasi konvensional. Tidak hanya itu, mekanisme keterlibatan publik, seperti referendum yang terkontrol dan perwakilan proporsional, diterapkan untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak sekadar simbolik, tetapi benar-benar memiliki dampak nyata terhadap kebijakan negara.

Bagaimana Model Equilibrium diterapkan dalam Sistem Pemilu?

Dalam sistem pemilu, Model Demokrasi Equilibrium menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pendekatan demokrasi. Misalnya, sistem yang digunakan dapat berupa kombinasi antara sistem perwakilan proporsional dan sistem mayoritarian, seperti yang diterapkan di Jerman. Ini memungkinkan partai-partai kecil tetap memiliki suara di parlemen, tetapi pada saat yang sama menjaga stabilitas pemerintahan dengan memastikan adanya mayoritas yang kuat dalam pembentukan pemerintahan.

Selain itu, keterlibatan publik tidak berhenti di pemilu. Model ini mengadopsi mekanisme deliberatif, seperti forum warga dan referendum terbatas, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapatnya terhadap isu-isu penting tanpa mengorbankan stabilitas politik.

Hal ini bisa dilihat dalam model demokrasi Swiss, di mana rakyat dapat langsung mempengaruhi kebijakan melalui referendum, tetapi dalam batasan yang sudah ditentukan untuk mencegah populisme yang berlebihan.

Tentu saja model Equilibrium ini lahir dalam ruang gagasan yang tidak dibelenggu oleh aturan konvensional yang hari ini berubah ubah secara unpredictable tergantung selera pemegang kekuasaan atau pengendali parlemen. Pada akhirnya, apapun rumusan dan model demokrasi serta pemilihan yang akan kita hasilkan dari entah berapa ratus kali lagi kita akan diskusi, pemahaman kita tentang demokrasi akan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, sejarah, dan tantangan zaman. Apakah kita lebih percaya bahwa demokrasi adalah tentang membentuk warga negara yang berbudi luhur, menjaga aturan yang adil, atau menciptakan ruang untuk perlawanan dan perubahan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita memandang dan membangun demokrasi Indonesia di masa depan.

Penulis adalah **Kepala Bagian Perencanaan pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)** dan juga sebagai Executive Director The Center for Strategic Leadership and Innovative Governance - Universitas Proklamasi 45.





Peran Strategis Survei Opini Publik (Melalui Telesurvei) Dalam Memperkuat Evidence-Based Policy

Dalam era tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan partisipatif, keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah tidak menjadi satu-satunya aktor dalam merancang kebijakan publik, melainkan perlu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang merasakan langsung dampak dari kebijakan yang dibuat. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam siklus pemerintahan, termasuk dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan.

Salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan partisipasi tersebut adalah survei opini publik. Melalui survei, pemerintah dapat menangkap aspirasi, harapan, dan persepsi masyarakat secara lebih representatif dan sistematis. Survei opini publik menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*), karena menyuplai data konkret mengenai sejauh mana suatu kebijakan dipahami, diterima, atau bahkan ditolak publik. Prinsip *evidence-based policy* menekankan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya dirumuskan berdasarkan data yang valid, analisis yang objektif, dan masukan yang relevan dari masyarakat yang terdampak.

Pendekatan ini menempatkan bukti sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab permasalahan secara substansial. Kebijakan yang tidak dilandasi oleh bukti atau data cenderung bersifat spekulatif, berisiko tidak efektif dalam implementasinya, dan bahkan dapat menimbulkan penolakan dari publik karena tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sebaliknya, kebijakan yang dibangun berdasarkan bukti dapat memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil kebijakan yang dibuat.

Dalam konteks ini, pembangunan sistem survei yang kredibel, terencana, dan berkelanjutan menjadi sangat penting. Survei yang dirancang dengan baik dapat menyediakan informasi yang komprehensif mengenai pandangan, harapan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan. Metode ini juga memungkinkan pengumpulan data secara cepat, efisien, serta menjangkau wilayah yang sulit diakses secara fisik. Di tengah keterbatasan sumber daya dan kebutuhan akan data real-time, telesurvei menjadi solusi yang tepat untuk mendukung kebijakan berbasis bukti, terutama di konteks pemerintahan daerah.

kebutuhan terhadap data yang cepat dan akurat sangat penting untuk mendukung pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Menjawab tantangan ini, BSKDN memperkenalkan telesurvey sebagai pendekatan baru dalam menghimpun data kebijakan. Fasilitas Command Center BSKDN dimanfaatkan sebagai pusat pelaksanaan telesurvey, didukung oleh pejabat fungsional seperti Statistisi dan Analis Kebijakan, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung pelaksanaannya.

Tujuan dari pemanfaatan telesurvey di BSKDN antara lain untuk mempercepat proses pengumpulan data, meningkatkan akurasi informasi dari masyarakat maupun aparatur daerah, mendukung proses perumusan kebijakan berbasis data, serta memfasilitasi monitoring dan evaluasi kebijakan. Telesurvei juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan masyarakat, sejalan dengan prinsip *open government* dan transparansi publik.

Pada Juni 2025, BSKDN melaksanakan telesurvey perdana dengan empat tema utama, yaitu Kebijakan Makan Bergizi Gratis, Pengendalian Inflasi, Identifikasi Sekolah Unggulan Garuda, serta Model Pilkada yang Efektif dan Demokratis. Survei ini melibatkan 4.735 responden dari masyarakat umum dan aparatur pemerintah daerah, dengan pengambilan sampel acak dan target 40 responden per tema. Pelaksanaan survei menjunjung tinggi prinsip etika, perlindungan data pribadi, dan transparansi. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat respons, keterbatasan infrastruktur, serta gangguan teknis pada aplikasi survei, hal ini merupakan dinamika wajar pada tahap awal implementasi.

Kendati demikian, telesurvey terbukti efektif sebagai instrumen penjangkaran opini publik dan masukan dari akar rumput secara cepat dan efisien. Penggunaannya mencerminkan langkah nyata BSKDN dalam membangun proses kebijakan yang tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up, serta mendorong transformasi digital birokrasi. Ke depan, sistem telesurvey perlu dikembangkan dan diintegrasikan dengan Big Data Nasional dan dashboard kebijakan sektoral agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara real-time. Langkah ini diharapkan memperkuat akuntabilitas birokrasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.



Renstra BSKDN: Kerangka Strategis Perencanaan Pembangunan Dalam Negeri

Rencana Strategis atau Renstra Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan selama periode lima tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran, program, kegiatan, hingga indikator kinerja yang akan dicapai. Penyusunan Renstra bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja BSKDN sejalan dengan arah pembangunan nasional. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, BSKDN memiliki posisi penting dalam menjembatani arah kebijakan pemerintah pusat dengan implementasinya di daerah, sehingga keberadaan Renstra menjadi vital untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis yang mendukung efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh.

Renstra BSKDN disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, termasuk badan strategis seperti BSKDN, harus menyusun rencana strategis berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Selain itu, penyusunan Renstra juga mengacu pada Peraturan Presiden tentang RPJMN serta kebijakan Kementerian Dalam Negeri. BSKDN sebagai unit yang memiliki fungsi perumusan, pengkajian, dan penyusunan strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, dituntut untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Dalam konteks ini, Renstra menjadi panduan utama yang merangkum seluruh arah kebijakan yang akan dijalankan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berada dalam satu kerangka strategi besar yang mendukung pencapaian tujuan nasional.

Latar belakang penyusunan Renstra BSKDN tidak lepas dari dinamika lingkungan strategis, skala nasional maupun global, yang terus berubah.



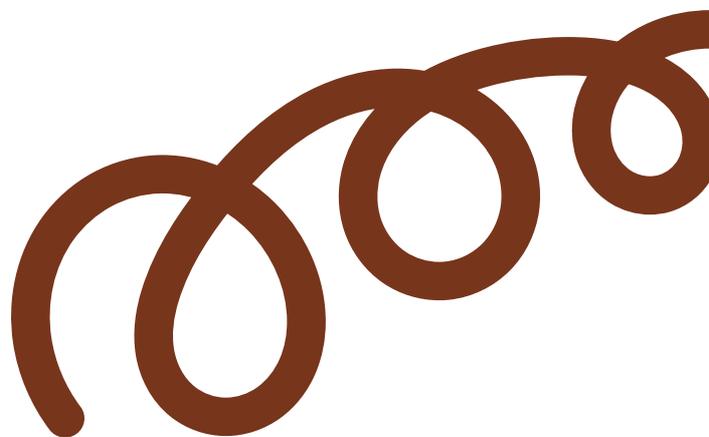
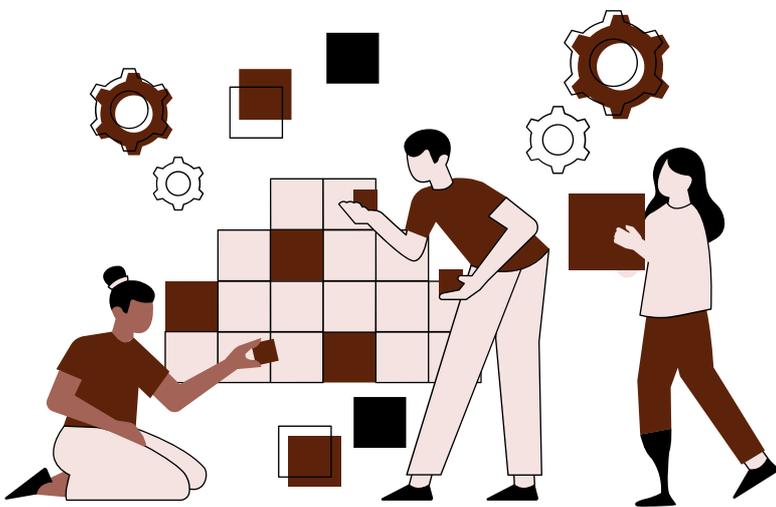
Ketidakpastian global, tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih baik, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta kompleksitas permasalahan di daerah menjadi faktor pendorong penting. Dalam menghadapi tantangan tersebut, BSKDN perlu memiliki perencanaan yang matang dan terstruktur agar mampu merespons dinamika dengan cepat dan tepat. Renstra disusun sebagai pedoman yang dapat memastikan setiap kebijakan dan intervensi yang dilakukan memiliki dasar perencanaan yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan latar belakang yang demikian, BSKDN berupaya menjadikan Renstra sebagai wujud kesiapan dan keseriusan dalam menghadirkan pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah pusat menetapkan program prioritas seperti transformasi digital, pembangunan SDM, penguatan otonomi daerah, dan pemerataan wilayah. BSKDN bertugas memastikan kebijakan daerah sejalan dan mendukung program tersebut. Melalui Renstra, BSKDN merancang strategi yang menjembatani kepentingan pusat dan daerah, termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas ASN, dan kebijakan berbasis data.

Renstra BSKDN berfungsi sebagai pedoman strategis kelembagaan, memastikan koordinasi, arah, dan evaluasi kinerja yang terukur. Dokumen ini juga menjadi dasar pelaksanaan anggaran dan alat kontrol manajemen organisasi agar efisien dan akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah, BSKDN berperan penting menyelaraskan kebijakan pusat-daerah tanpa mengurangi semangat desentralisasi. Renstra memungkinkan harmonisasi antarlevel pemerintahan agar pembangunan daerah tetap mendukung tujuan nasional.

Penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif melibatkan berbagai pihak, guna menjamin dokumen yang responsif, kredibel, dan inklusif. Ini memperkuat rasa kepemilikan dan legitimasi terhadap arah kebijakan BSKDN. Renstra juga mencerminkan komitmen terhadap reformasi birokrasi melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, transformasi kelembagaan, digitalisasi, serta penguatan nilai integritas dan pelayanan publik.

Dengan Renstra yang komprehensif, BSKDN diharapkan dapat menjalankan program secara tepat sasaran dan inovatif, serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera, melalui percepatan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah.



Pentingnya BSKDN Menjalinkan Kerja Sama Strategis untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) adalah ujung tombak dalam perumusan kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam menjalankan perannya yang krusial ini, BSKDN tidak bisa bekerja sendiri. Menjalinkan kerja sama strategis menjadi sebuah keniscayaan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, inovatif, dan berdaya guna bagi tata kelola pemerintahan yang unggul di Indonesia.

Mengapa Kerja Sama Strategis Penting bagi BSKDN?

Ada beberapa alasan mendasar mengapa kerja sama strategis menjadi sangat vital bagi BSKDN:

- **Memperkaya Perspektif dan Data:** Perumusan kebijakan yang komprehensif membutuhkan input dari berbagai pihak. Kerja sama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta dapat memperkaya BSKDN dengan data, analisis, dan perspektif yang lebih luas. Ini membantu BSKDN memahami isu-isu secara multidimensional dan merumuskan solusi yang lebih holistik.
- **Meningkatkan Legitimasi dan Keberterimaan Kebijakan:** Kebijakan yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan cenderung lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Dengan menjalinkan kerja sama sejak tahap perumusan, BSKDN dapat membangun konsensus dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- **Mendorong Inovasi dan Adaptasi:** Dunia terus berubah, dan tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Melalui kerja sama strategis, BSKDN dapat mengakses pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dari berbagai mitra. Ini akan mendorong inovasi dalam perumusan kebijakan dan memungkinkan BSKDN untuk lebih adaptif terhadap dinamika perubahan.
- **Optimalisasi Sumber Daya:** Kerja sama memungkinkan BSKDN untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, baik dari segi anggaran, tenaga ahli, maupun infrastruktur. Dengan berbagi beban dan keahlian, tujuan bersama dapat dicapai secara lebih efisien. Misalnya, kolaborasi riset dapat mengurangi duplikasi upaya dan meningkatkan kualitas hasil penelitian.



- **Memperkuat Kapasitas Kelembagaan:** Keterlibatan dalam jejaring kerja sama strategis secara otomatis akan memperkuat kapasitas internal BSKDN. Interaksi dengan berbagai pakar dan organisasi akan meningkatkan kompetensi staf, memperluas wawasan, dan mendorong pembelajaran berkelanjutan di lingkungan BSKDN.
- **Membangun Ekosistem Kebijakan yang Kuat:** Kerja sama strategis bukan hanya tentang proyek individual, tetapi juga tentang membangun ekosistem kebijakan yang kuat. Dengan menciptakan jejaring yang solid antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat, BSKDN dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kebijakan yang berkualitas.

- **Penyusunan Pedoman atau Standar Bersama:** Berkolaborasi dalam menyusun pedoman atau standar yang akan menjadi acuan bagi implementasi kebijakan di daerah.
- **Pemanfaatan Teknologi Bersama:** Mengembangkan dan memanfaatkan platform teknologi bersama untuk pengumpulan data, analisis kebijakan, atau diseminasi informasi.

Dengan menyadari urgensi dan manfaat kerja sama strategis, BSKDN memiliki peluang besar untuk mengukuhkan posisinya sebagai lembaga perumus kebijakan yang proaktif dan responsif. Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, BSKDN tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tetapi juga turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Bentuk Kerja Sama Strategis yang Dapat Dijalin

BSKDN dapat menjalin kerja sama strategis dalam berbagai bentuk, antara lain:

- **Kolaborasi Riset dan Kajian:** Melakukan penelitian bersama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk menghasilkan basis data dan analisis yang kuat dalam perumusan kebijakan.
- **Pertukaran Pengetahuan dan Ahli:** Mengadakan lokakarya, seminar, atau program pertukaran staf dengan lembaga lain untuk berbagi praktik terbaik dan meningkatkan kompetensi.



Membangun Tata Kelola Data yang Terintegrasi di BSKDN: Fondasi Penguatan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri

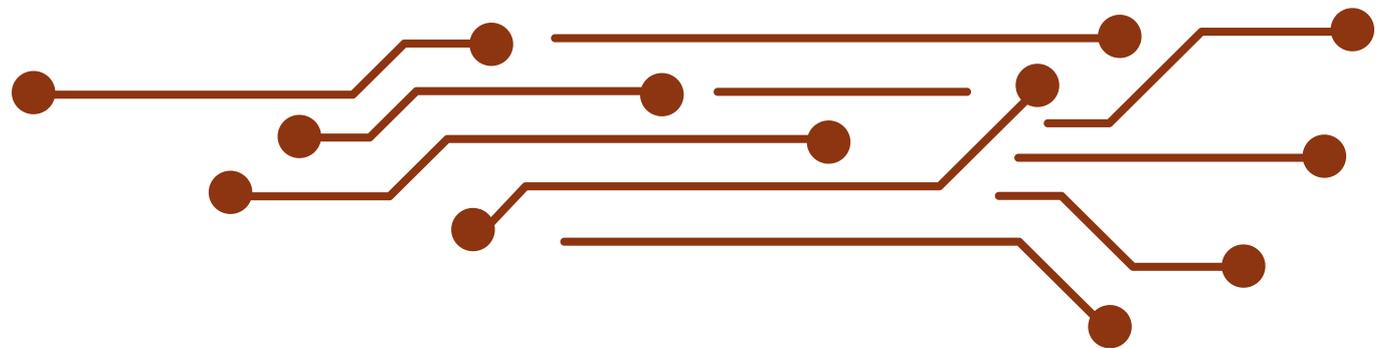
Data sebagai Jantung Pengambilan Keputusan

Di tengah transformasi digital yang terus bergulir, peran data semakin menempati posisi strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, data bukan sekadar kumpulan angka atau catatan administratif. Lebih dari itu, data merupakan denyut nadi yang menghidupkan seluruh proses kajian dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dalam khazanah ilmiah, kata data berasal dari bahasa Latin datum, yang berarti "sesuatu yang diberikan". Data menjadi pondasi utama yang menopang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sebuah pendekatan yang semakin diutamakan dalam praktik pemerintahan modern. Tanpa data yang akurat dan terpercaya, keputusan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran, bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Sejak transformasi kelembagaan dari-Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) menjadi BSKDN, peran dan fungsi lembaga ini mengalami pergeseran signifikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, BSKDN tidak lagi berfokus pada penelitian dan pengembangan seperti BPP, melainkan mengemban amanah baru untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri.

Namun dalam praktiknya, BSKDN masih secara konsisten melaksanakan kegiatan kajian sebagai salah satu instrumen penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan. Kegiatan ini menuntut dukungan data yang kuat, lengkap, dan terus diperbarui agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya tepat, tetapi juga relevan dengan dinamika yang terjadi di lapangan.





Tantangan Pengelolaan Data di BSKDN

Dibalik pentingnya peran data BSKDN menghadapi tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi. Salah satunya adalah belum tersedianya sistem pengelolaan data yang terpusat dan terintegrasi. Data yang dikumpulkan dari berbagai kajian maupun sumber internal organisasi masih terfragmentasi dan tersebar di masing-masing unit atau bahkan individu. Sebagian besar data disimpan secara manual, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun file digital yang tidak terhubung dalam satu sistem bersama.

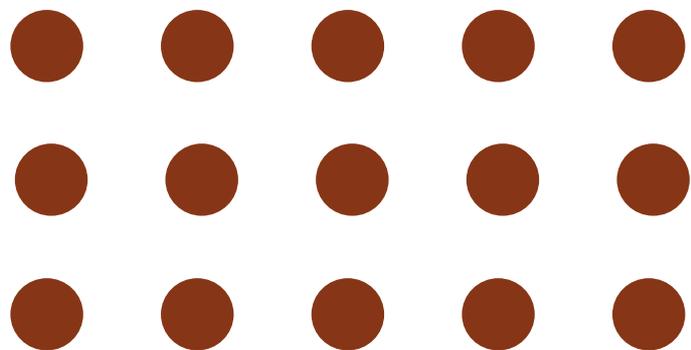
Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi serius. Pertama, aksesibilitas data menjadi rendah, sehingga mempersulit tim kajian untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara cepat. Kedua, risiko kehilangan data, inkonsistensi informasi, serta duplikasi pengumpulan data yang sama di berbagai unit menjadi semakin-

semakin tinggi. Tak jarang, waktu yang seharusnya dialokasikan untuk menganalisis data justru terbuang untuk mencari data yang tercecer atau tersebar.

Inefisiensi semacam ini pada akhirnya dapat menghambat BSKDN dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu dan berbasis data yang kuat. Lebih jauh, kelemahan dalam pengelolaan data dapat merusak kredibilitas organisasi sebagai lembaga penghasil strategi kebijakan yang seharusnya menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah.

Pentingnya Kesadaran dan Penguatan Sistem

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan data sebenarnya telah mulai tumbuh di lingkungan BSKDN. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh langkah nyata untuk membangun sistem yang mampu memastikan keutuhan, validitas, dan pembaruan data secara berkelanjutan. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, atau observasi lapangan seringkali tidak terdokumentasi dengan baik untuk digunakan kembali dalam kajian berikutnya. Demikian pula dengan data sekunder yang diperoleh dari kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah.

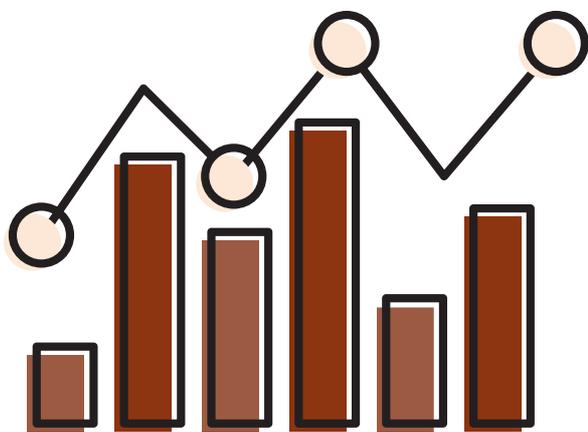


Selain belum adanya sistem, BSKDN juga belum memiliki unit atau individu yang secara spesifik bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemutakhiran data secara menyeluruh. Saat ini, peran tersebut secara struktural melekat pada Bagian Perencanaan Sekretariat BSKDN, namun fungsi tersebut masih berjalan secara parsial dan belum optimal sebagai pusat kendali data institusi.

Hal ini menunjukkan bahwa selain kebutuhan teknis, BSKDN memerlukan penguatan budaya organisasi yang menempatkan data sebagai aset strategis yang harus dikelola dengan serius, konsisten, dan terkoordinasi.

Arah Penguatan Pengelolaan Data BSKDN

Untuk mewujudkan tata kelola data yang ideal, BSKDN perlu membangun sistem data repository yang terintegrasi. Sistem ini harus mampu menjadi pusat penyimpanan seluruh data hasil kajian, data internal organisasi, serta data pendukung lainnya yang dapat diakses secara terkontrol oleh seluruh unit kerja. Sistem yang terintegrasi akan mempermudah pencarian, pemanfaatan ulang, serta pembaruan data sesuai kebutuhan kajian dan perumusan kebijakan.



Langkah penting lainnya adalah pembentukan tim pengelola data yang berada di bawah koordinasi Bagian Perencanaan. Tim ini tidak hanya bertugas menghimpun dan memelihara data, tetapi juga bertanggung jawab atas verifikasi, standarisasi, dan distribusi data ke seluruh unit kerja secara berkala. Dengan keberadaan tim khusus ini, proses pengelolaan data akan berjalan lebih sistematis dan profesional.

Sejalan dengan era digitalisasi, BSKDN juga perlu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pengelolaan data. Penggunaan AI dapat membantu mengotomatiskan pengolahan data, mempercepat proses analisis, serta meminimalisasi risiko kesalahan manusia. Dengan AI, data yang kompleks dapat dianalisis secara real-time untuk menghasilkan informasi yang lebih tajam, relevan, dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.

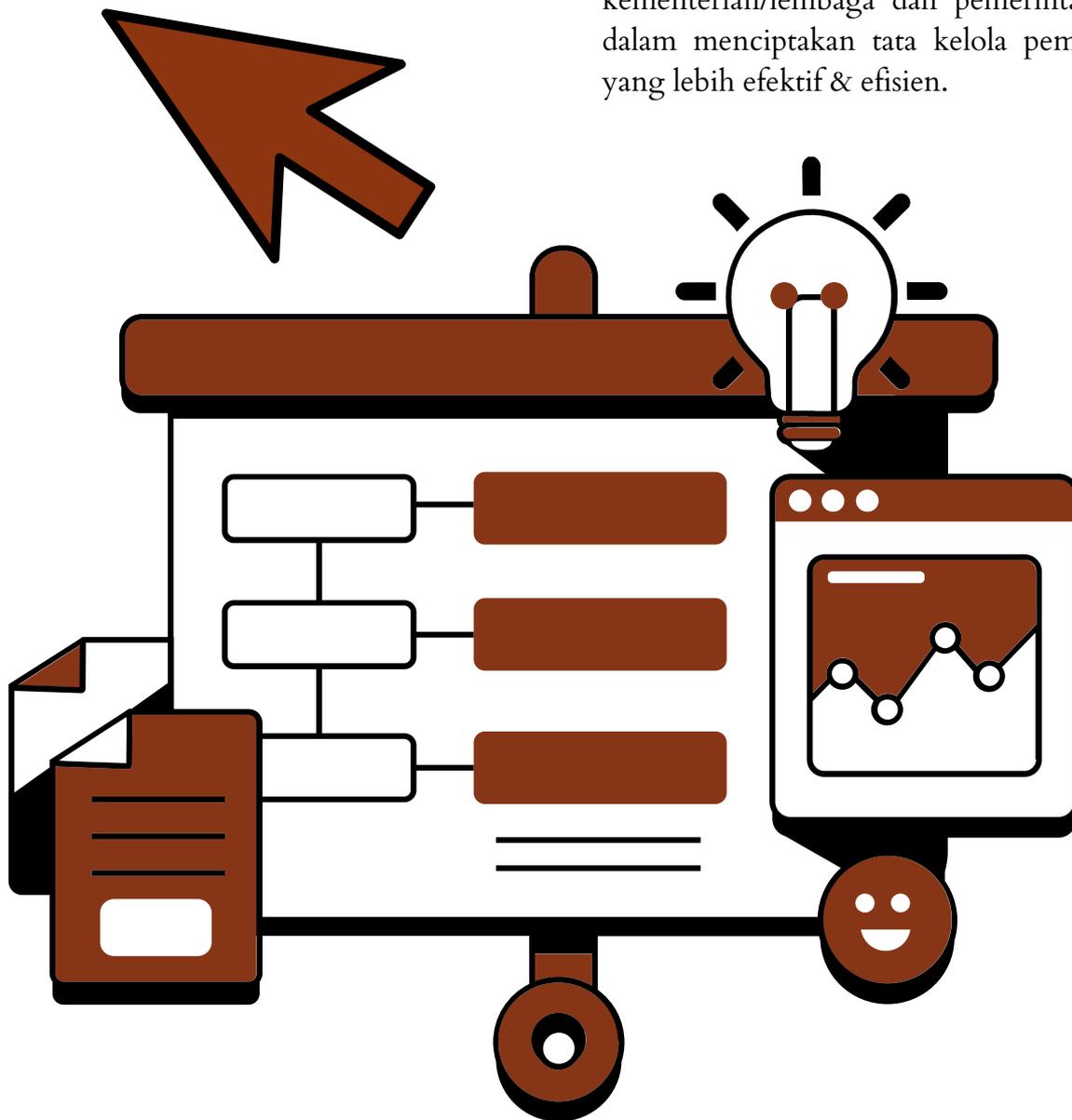
Tak kalah penting, BSKDN perlu membangun kemitraan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkaya sumber data statistik daerah yang akurat dan terpercaya. Kerja sama ini akan memperkuat basis data BSKDN sehingga lebih mampu memotret kondisi empiris daerah secara komprehensif. Selain BPS, sinergi dengan kementerian/lembaga lain yang memiliki data sektoral juga menjadi bagian dari strategi perluasan akses data.

Menuju BSKDN Berbasis Data

Transformasi pengelolaan data di BSKDN merupakan keniscayaan yang harus segera diwujudkan. Tanpa sistem pengelolaan data yang terintegrasi, BSKDN berisiko kehilangan peluang untuk menjadi institusi penghasil kebijakan yang responsif, adaptif, dan berkualitas tinggi. Data yang terkelola dengan baik tidak hanya akan mempercepat proses kerja, tetapi juga memperkuat posisi BSKDN sebagai lembaga yang mampu memberikan rekomendasi strategis berbasis bukti.

Ke depan, penguatan pengelolaan data harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan organisasi BSKDN. Melalui pengelolaan data yang terstruktur, terintegrasi, dan didukung oleh teknologi mutakhir, BSKDN akan semakin siap menjadi pusat keunggulan dalam menghasilkan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang solutif dan berdaya saing.

Dengan data yang dikelola secara profesional, BSKDN akan mampu menjawab tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, sekaligus menjadi mitra strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif & efisien.



Perencanaan Outing Day: Kuatkan Sinergi, Mantapkan Strategi



Dalam upaya mempererat kekompakan dan membangkitkan semangat kerja, Tim Perencanaan (Bagren) menggelar “Bagren *Outing Day*” dengan kegiatan *outbond* dan *rafting*. Tidak sekadar rekreasi, kegiatan ini menjadi sarana membangun sinergi tim melalui tantangan bersama di alam terbuka. Manfaat dari kegiatan semacam ini telah banyak didukung oleh riset di bidang psikologi dan organisasi. Salah satunya adalah Attention Restoration Theory yang dikembangkan oleh Kaplan (1995), yang menyatakan bahwa interaksi dengan lingkungan alam dapat memulihkan fokus dan meningkatkan kapasitas kognitif, termasuk kreativitas dan kemampuan menyelesaikan masalah. Aktivitas luar ruang menciptakan suasana yang menyegarkan dan membangun keterlibatan emosional yang lebih dalam antaranggota tim.

Kegiatan fisik di alam terbuka telah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan suasana hati sekaligus produktivitas kerja. Hal ini sejalan dengan hasil meta-analisis Barton & Pretty (2010) mengenai *green exercise*, yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan di lingkungan alami memberikan dampak psikologis yang lebih positif dibandingkan aktivitas serupa di dalam ruangan. Lebih dari sekadar olahraga, aktivitas seperti *rafting* menjadi media kolaboratif yang intens, mendorong kekompakan, memperkuat kepercayaan, dan melatih sinergi tim dalam menghadapi tantangan bersama.

Rafting dalam kegiatan Bagren *Outing Day* memberikan pengalaman luar biasa yang sarat makna. Ketika tim dihadapkan pada derasnya arus sungai, semua perbedaan dan batas peran seketika luruh, yang tersisa hanyalah satu tujuan dan satu semangat. Dalam situasi yang menegangkan namun penuh antusiasme itu, komunikasi yang jernih, pengambilan keputusan yang cepat, dan kepercayaan penuh antaranggota menjadi elemen vital. Temuan Kass & Grandzol (2011) memperkuat hal ini, bahwa pelatihan berbasis tantangan di luar ruang memiliki pengaruh signifikan dalam mengembangkan kepemimpinan dan efektivitas kerja tim.

Melalui semangat “Bagren *Outing Day*”, Kepala Bagian Perencanaan menegaskan komitmennya untuk terus membangun tim yang tangguh, adaptif, dan progresif. Inisiatif ini bukan hanya sebuah kegiatan rekreatif, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi kerja yang berlandaskan kolaborasi, kepemimpinan, dan saling percaya.



GALERI





BAGREN

Seng ada lawan! Nasi Lapola Khas Maluku Utara



Nasi Lapola merupakan olahan kuliner tradisional khas Maluku Utara. Nasi ini adalah kuliner tersohor di daratan Maluku Utara. Rasa gurih dan pulen merupakan rasa dominan dari Nasi Lapola. Nasi ini mengkombinasikan olahan Kacang Tolo, Parutan Kelapa, Beras, Serai, Daun Jeruk, Daun Pandan, serta bumbu pelengkap lainnya. Nasi Lapola biasanya diolah dengan cara dikukus. Nasi Lapola biasa disajikan dengan kuliner khas lain yaitu Kohu-Kohu dan Sambal Colo-Colo.

Penyajian nasi lapola tidak dilakukan sendirian, melainkan ditemani dengan lauk pendamping seperti kohu-kohu yang menggunakan ikan tongkol atau ikan teri basah bersama lalapan mentah dan campuran kelapa parut berbumbu cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan perasan jeruk nipis. Nasi lapola juga kerap dimakan dengan sambal colo-colo khas Maluku yang dibuat dari campuran tomat, cabai rawit, dan bawang merah.

Saat ini, berbagai inisiatif sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dan komunitas pecinta kuliner untuk mempromosikan kembali makanan khas seperti Nasi Lapola ke generasi muda. Beberapa restoran di Ternate dan sekitarnya bahkan mulai memasukkan menu Nasi Lapola dalam daftar hidangan mereka untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal, Nasi Lapola diharapkan bisa menjadi ikon kuliner Maluku Utara yang dikenal lebih luas di kancah nasional bahkan internasional.

Gulai Taboh: Makanan Tradisional Khas Lampung

Gulai Taboh merupakan salah satu warisan kuliner khas Lampung yang mencerminkan kekayaan budaya dan cita rasa Nusantara. Dengan perpaduan santan kental, rempah-rempah, serta bahan seperti ikan atau kacang-kacangan, hidangan ini menawarkan rasa gurih yang khas dan menggugah selera.

Tak hanya lezat, Gulai Taboh juga menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Lampung, sering hadir dalam acara adat maupun sebagai hidangan sehari-hari. Melestarikan dan memperkenalkan Gulai Taboh berarti turut menjaga kekayaan kuliner Indonesia yang begitu beragam.

Gulai Taboh memiliki beberapa variasi, tergantung wilayah dan ketersediaan bahan. Di wilayah pesisir, ikan menjadi bahan utama, sementara di daerah pedalaman, sering kali digunakan daging sapi atau bahkan rebung sebagai bahan utama. Variasi ini memperkaya khazanah kuliner tradisional Lampung dan menunjukkan fleksibilitas budaya kuliner masyarakatnya.



Cobain Yuk Makanan Khas Kalbar Chai Kue, ka nemu' ari pangan tu!



Chai Kue (juga dikenal sebagai Choi Pan) adalah makanan khas Kalimantan Barat, khususnya dari Pontianak, yang berasal dari akulturasi budaya Tionghoa dan lokal. Makanan ini berbentuk seperti pangsit atau pastel mini dengan kulit transparan yang lembut dan kenyal, terbuat dari tepung beras.

Isian Chai Kue umumnya terdiri dari sayuran seperti bengkuang, kucai, talas, atau rebon (udang kecil), yang ditumis dengan bumbu sederhana namun kaya rasa. Camilan ini sering disajikan saat acara keluarga, hari raya, atau dijual di pasar tradisional dan jajanan kaki lima di Pontianak. Cita rasanya yang ringan namun menggoda membuat Chai Kue menjadi salah satu ikon kuliner yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Kalimantan Barat.

Chai Kue menjadi simbol akulturasi budaya antara masyarakat Tionghoa dan lokal Melayu-Dayak yang harmonis di Kalimantan Barat. Tak heran jika kudapan ini mudah ditemukan di Singkawang, Pontianak, hingga Sambas, terutama saat perayaan Imlek, Cap Go Meh, atau di pasar-pasar tradisional dan pusat oleh-oleh.

Jadi, kalau kamu berkunjung ke Kalbar, jangan lupa cobain Chai Kue, ya! Sekali gigit, dijamin bakal bilang: “Ka nemu’ ari pangan tu, enak betul!”

Kuliner Khas Bali Lawar : Ajengan puniki makelo

Lawar Bali bukan sekadar hidangan tradisional, tetapi juga simbol budaya dan kebersamaan dalam masyarakat Bali. Perpaduan daging, sayuran, kelapa parut, dan rempah-rempah khas Bali menciptakan cita rasa yang kuat dan autentik. Lawar memiliki banyak variasi, tergantung jenis daging dan sayuran yang digunakan, serta bumbu yang digunakan.

Lawar sering hadir dalam upacara adat, menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Bali. Melestarikan kuliner seperti Lawar berarti menjaga kekayaan budaya dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.

Kini, Lawar tidak hanya bisa dinikmati saat upacara adat saja. Banyak warung makan dan restoran di Bali yang menyajikan Lawar sebagai menu harian. Bahkan beberapa di antaranya sudah melakukan inovasi agar Lawar bisa dinikmati wisatawan mancanegara tanpa menghilangkan keasliannya.



Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)



Labuan Bajo merupakan destinasi wisata unggulan Indonesia yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa, mulai dari panorama laut yang menakjubkan, pulau-pulau eksotis, hingga kekayaan bawah laut yang memukau. Sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo tidak hanya memanjakan wisatawan dengan pesona alam, tetapi juga menyuguhkan pengalaman budaya dan petualangan yang tak terlupakan. Dengan semakin berkembangnya infrastruktur pariwisata, Labuan Bajo layak menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang mencari perpaduan antara keindahan alam, budaya lokal, dan petualangan berkelas dunia.

Dengan perpaduan alam bawah laut yang spektakuler, destinasi daratan dan budaya yang kaya, serta akses yang kian mudah, Labuan Bajo semakin matang jadi ikon pariwisata NTT. Tantangan lingkungan dan sosial tetap ada, namun dengan pengelolaan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, kota kecil ini berharap bisa terus bercahayabukan hanya di peta wisata Indonesia, tapi di mata dunia.

Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia, Raja Ampat menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan laut biru jernih, pantai pasir putih, dan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi.

Terdiri dari empat pulau utama Waigeo, Misool, Salawati, dan Batanta—serta ratusan pulau kecil lainnya, Raja Ampat menjadi surga bagi para penyelam dan pecinta alam. Terumbu karangnya termasuk yang terkaya di dunia, dengan ribuan spesies ikan dan biota laut. Selain itu, Raja Ampat juga memiliki pesona budaya lokal yang menarik dan masih sangat alami. Kombinasi antara keindahan alam bawah laut, pemandangan pulau-pulau karst yang unik, dan keramahan masyarakat lokal menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata eksklusif dan menakjubkan yang wajib dikunjungi.

Raja Ampat bukan hanya sekadar destinasi wisata yang memukau dengan keindahan alam bawah laut dan panorama kepulauan tropisnya, tetapi juga menjadi simbol penting bagi komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Upaya serius pemerintah dalam mencabut izin tambang yang mengancam ekosistem, memperkuat status kawasan sebagai geopark dunia, serta mendorong ekonomi hijau menjadikan Raja Ampat sebagai contoh ideal pengelolaan pariwisata berbasis konservasi.



Candi Prambanan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar dan termegah di Indonesia yang terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-9 Masehi, candi ini didedikasikan untuk tiga dewa utama dalam agama Hindu: Brahma, Wisnu, dan Siwa—dengan Candi Siwa sebagai bangunan tertingginya.

Keindahan arsitektur Candi Prambanan tampak dari relief-relief indah yang menghiasi dindingnya, yang menggambarkan kisah Ramayana. Sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, Candi Prambanan tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur kuno, tetapi juga pengalaman budaya yang kaya, menjadikannya salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia.

Candi Prambanan terus berkembang sebagai destinasi warisan budaya berkelas dunia—memadukan keagungan arsitektur, spiritualitas, dan inovasi wisata. Strategi pengembangan yang meliputi program spiritual, atraksi kontemporer, serta pelestarian cermat telah terbukti mendongkrak jumlah pengunjung dan kualitas pengalaman wisata. Upaya konservasi yang berkelanjutan, penghormatan terhadap tradisi lokal, serta komitmen menjaga warisan budaya adalah fondasi utama agar Prambanan tetap lestari, relevan, dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi sekarang dan mendatang.

Bromo Tengger Semeru, Provinsi Jawa Timur

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terletak di Provinsi Jawa Timur, mencakup wilayah Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Kawasan ini terkenal sebagai salah satu ikon wisata alam Indonesia yang menakjubkan, dengan Gunung Bromo dan Gunung Semeru sebagai daya tarik utamanya.

Gunung Bromo menawarkan pemandangan dramatis berupa kaldera luas, lautan pasir, dan kawah aktif, serta sunrise di Bukit Penanjakan yang sangat populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Sementara itu, Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, menjadi tujuan favorit para pendaki dan pecinta alam.

Bromo Tengger Semeru tetap menjadi ikon wisata Jawa Timur, menarik ribuan kunjungan tiap momen besar. Pengelolaan yang bijak—atau penutupan saat upacara adat—menunjukkan kesadaran akan nilai budaya dan lingkungan. Namun, tekanan dari kunjungan besar dan kegiatan ilegal seperti penanaman ganja serta kerusakan savana menuntut upaya konservasi lebih gencar. Kolaborasi berbagai pihak, pengawasan ketat, dan edukasi kepada masyarakat serta pengunjung diperlukan agar kawasan ini tidak hanya lestari, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan lokal.



G E D

THANK YOU
VERY MUCH!



KEMENTERIAN
BADAN STRATEGIS



UNG BISMA

ERIAN DALAM NEGERI
GI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

